

711
SAP

P 4

**PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN
SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
PROVINSI GORONTALO**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

HASTO A. SAPOETRO
L4D 002 122



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN
SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
PROVINSI GORONTALO**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

HASTO A. SAPOETRO
L4D002122

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal: 17 Juni 2004

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Juni 2004

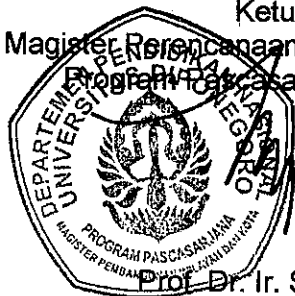
Pembimbing Pendamping

Ir. JAWOTO S. SETYONO, MDP

Pembimbing Utama

Dr. Ir. JOESRON ALIE SYAHBANA, MSc

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

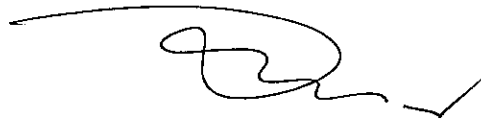


Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Juni 2004



HASTO A. SAPOETRO
L4D 002 122

*Tesis ini kupersembahkan untuk
- Istri tercinta Jani Herdiani & anak-anakku
Muhammad Wildan Sapoetro & Khairunnisa Nur Afifah
- Ibunda, Bapak, serta kel. besar R.Darmono & Harun Hernawan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat memulai dan menyelesaikan Tesis berjudul **Perwilayahan Pembangunan sebagai Masukan Strategi Pengembangan Wilayah Provinsi Gorontalo**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana - Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari, tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir. Nana Rukmana D. Wirapradja, MA selaku Kepala Pusat Pendidikan Keahlian Teknik - BPSDM Departemen Kimpraswil, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pendidikan ini.
2. Bapak DR. Medi Botutihe, SE selaku Walikota Gorontalo yang telah memberikan kesempatan tugas belajar kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.
4. Bapak Ir. Sidarta Saelan, MM selaku Kepala Balai KPDMPPW Semarang beserta seluruh Staf, atas segala perhatian dan arahan selama penulis mengikuti studi.
5. Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc, selaku Mentor dan Bapak Ir. Jawoto S. Setyono, MDP, selaku CoMentor yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran, pendapat, bimbingan serta arahan dalam penyusunan Tesis ini.
6. Bapak Ir. Ragil Haryanto, MSP selaku Sekretaris Program Pascasarjana MPPWK Universitas Diponegoro sekaligus dosen penguji serta Bapak Dipl. Eng. Benjamin, selaku dosen pembahas yang telah banyak memberikan kritik, masukan dan arahan bagi penyempurnaan Tesis ini.
7. Seluruh Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, yang telah mendidik dan memberikan ilmu bagi penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Diponegoro, yang telah banyak membantu dalam segala hal selama penulis mengikuti studi.
9. Rekan-rekan karyasiswa Program Pascasarjana Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, khususnya Angkatan II.
10. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada isteri Dra. Jani Herdiani serta anak-anak tercinta Wildan dan Nisa yang merupakan cambuk tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini, juga kepada ibunda, bapak dan seluruh keluarga besar R.Darmono dan Harun Hernawan yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Kepada semua pihak tersebut, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya. Akhir kata, segala puji bagi Allah SWT dalam mengakhiri penulisan ini, semoga bermanfaat.

Semarang, Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Studi	8
1.4 Sasaran Studi	8
1.5 Ruang Lingkup Studi	9
1.5.1 Ruang Lingkup Spasial	9
1.5.2 Ruang Lingkup Substansial	9
1.6 Kerangka Pemikiran Studi	11
1.7 Metoda Penelitian	14
1.7.1 Kerangka Analisis	15
1.7.2 Tahapan Penelitian	17
1.7.3 Metoda Analisis	20
1.8 Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN LITERATUR PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH MELALUI SISTEM PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN	
2.1 Perencanaan Wilayah	27
2.1.1 Teori Kutub Pertumbuhan	27
2.1.2 Teori Tempat Pusat	33
2.1.3 Konsepsi Simpul Jasa Distribusi	38
2.1.4 Interaksi Keruangan	41
2.2 Pembangunan Wilayah	44
2.2.1 Konsep Perwilayahan	48
2.2.2 Pendekatan Perwilayahan Pembangunan	52

2.3	Studi Kasus Penerapan Startegi Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah	54
2.3.1	Penerapan Startegi Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah	54
2.3.2	Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Penerapan Startegi Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah	56
2.4	Sintesa Kajian Sistem Perwilayahan Pembangunan	59
BAB III MASALAH PENGEMBANGAN WIL. PROVINSI GORONTALO		
3.1	Fisik Dasar	64
3.1.1	Letak Geografis	64
3.1.2	Sumber Daya Alam	66
3.1.2.1	Sumberdaya Lahan	66
3.1.2.2	Sumberdaya Mineral	68
3.1.2.3	Sumberdaya Air	69
3.1.2.4	Sumberdaya Pantai dan Lautan	69
3.1.2.5	Sumberdaya Pariwisata	70
3.1.3	Sumber Daya Buatan	70
3.1.3.1	Transpotasi	70
3.1.3.2	Utilitas	73
3.1.3.3	Prasarana Sosial Budaya	74
3.2	Sosial dan Kependudukan	75
3.2.1	Sosial	75
3.2.2	Kependudukan	75
3.2.2.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	76
3.2.2.2	Kepadatan Penduduk	76
3.3	Ekonomi	76
3.4	Kebijakan Struktur Ruang Provinsi Gorontalo	80
3.5	Masalah Pengembangan Wilayah Provinsi Gorontalo	83
BAB IV ANALISIS PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO		
4.1	Analisis Hirarki Pusat-pusat Pelayanan dan Wilayah Pengaruh	85
4.1.1	Penilaian Kemampuan Pelayanan dan Hirarki Pusat Pelayanan	86
4.1.1.1	Penilaian Kemampuan Pelayanan	87
4.1.1.2	Pembagian Hirarki Pusat Pelayanan	94
4.1.2	Analisis Wilayah Pengaruh	99
4.1.2.1	Analisis Gravitasi	100
4.1.2.2	Analisis Titik Henti	103
4.2	Analisis Potensi Perkembangan Wilayah	109
4.2.1	Metoda Analisis Potensi Perkembangan Wilayah	109
4.2.2	Kriteria Penilaian Potensi Perkembangan Sosial Ekonomi	110

4.2.3	Faktor Perkembangan Sosial Ekonomi Provinsi Gorontalo ...	112
4.2.4	Pengelompokkan Desa-desanya di Provinsi Gorontalo berdasarkan Potensi	123
4.2.4.1	Potensi Pusat Pelayanan Sosial dan Administratif ...	123
4.2.4.2	Potensi Pusat Pelayanan Ekonomi	126
4.2.4.3	Potensi Sosial sebagai Hinterland	128
4.2.4.4	Potensi Ekonomi sebagai Hinterland	130
4.2.5	Analisis Sektor-sektor Ekonomi Basis di Provinsi Gorontalo	133
4.3	Rangkuman Hasil Analisis	139
4.3.1.	Perwilayahan Fungsional	139
4.3.2	Potensi Pusat Pelayanan dan Kegiatan Perkotaan	145
4.3.3	Potensi sebagai Hinterland	146
4.3.4	Perwilayahan Hasil Studi	146
4.4	Implikasi Sistem Perwilayahan Hasil Studi Terhadap Kebijakan Pengembangan Wilayah	151
4.4.1.	Pembahasan Konsep Pendekatan Pengembangan Wilayah, Perwilayahan Eksisting dan Perwilayahan Hasil Studi	151
4.4.2.	Implikasi Sistem Perwilayahan Hasil Studi Terhadap Kebijakan Pengembangan Wilayah	154
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		
5.1	Kesimpulan	157
5.2	Rekomendasi	161
 DAFTAR PUSTAKA		 163
 LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel I.1	PDRB, PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2001	6
Tabel I.2	Pendekatan Studi	15
Tabel II.1	Variabel Penelitian Perwilayahan Pembangunan	62
Tabel III.1	Sebaran Kemiringan Lereng di Provinsi Gorontalo	67
Tabel III.2	Klasifikasi, Panjang dan Kondisi Jalan di Provinsi Gorontalo Tahun 2002	72
Tabel III.3	Keadaan Pelabuhan Laut di Provinsi Gorontalo Tahun 2002	72
Tabel III.4	Nama Wilayah, Luas dan Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2002	77
Tabel III.5	Pertumbuhan Beberapa Sektor Ekonomi di Provinsi Gorontalo Tahun 1993-2000	79
Tabel III.6	Deliniasi Satuan Wilayah Pembangunan Provinsi Gorontalo	81
Tabel IV.1	Penilaian Kemampuan Pelayanan dengan Metoda Skalogram Guttman	90
Tabel IV.2	Pengelompokkan Pusat-pusat Pelayanan Berdasarkan Metoda Skalogram Guttman	91
Tabel IV.3	Indeks Sentralitas Marshall	93
Tabel IV.4	Tingkatan Pusat Pelayanan Berdasarkan Metoda Skalogram Guttman	96
Tabel IV.5	Kemampuan Pelayanan dengan Metoda Indeks Sentralitas Marshall	98
Tabel IV.6	Hasil Interaksi dengan Metoda Gravitasi Menggunakan Variabel Jarak dan Bobot Sentralitas	102
Tabel IV.7	Titik Henti Antar Pusat-pusat Pelayanan Kedua di Provinsi Gorontalo	104
Tabel IV.8	Titik Henti Antar Pusat-pusat Pelayanan Ketiga di Provinsi Gorontalo	105
Tabel IV.9	Nilai Loading Faktor Setelah di Rotasi	116
Tabel IV.10	Kriteria Desa Berdasarkan Potensi Pelayanan Sosial dan Administratif	124
Tabel IV.11	Kriteria Desa Berdasarkan Potensi Pusat Pelayanan Ekonomi	127
Tabel IV.12	Kriteria Desa Berdasarkan Potensi Sosial sebagai Hinterland	129
Tabel IV.13	Kriteria Desa Berdasarkan Potensi Ekonomi sebagai Hinterland ...	131
Tabel IV.14	Nilai LQ Masing-masing Kecamatan terhadap Provinsi Gorontalo menurut Lapangan Usaha Tahun 2002	137
Tabel IV.15	Satuan Wilayah Pembangunan Hasil Studi	149
Tabel IV.16	Implikasi Kebijakan Struktur Perwilayahan Hasil Studi	156

DAFTAR GAMBAR

		halaman
Gambar 1.1	Peta Orientasi Wilayah Studi	10
Gambar 1.2	Kerangka Pikir Studi Perwilayahan Pembangunan sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Provinsi Gorontalo	13
Gambar 1.3	Kerangka Analisis Studi Perwilayahan Pembangunan sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Provinsi Gorontalo	19
Gambar 2.1	Struktur Dasar Pengembangan Wilayah	40
Gambar 3.1	Peta Administrasi Provinsi Gorontalo	65
Gambar 3.2	Peta Kepadatan Penduduk	78
Gambar 3.3	Proporsi Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2002	79
Gambar 3.4	Proporsi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Gorontalo Tahun 2002	80
Gambar 3.5	Peta Wilayah Pembangunan Provinsi Gorontalo	82
Gambar 4.1	Titik Henti Antar Pusat-Pusat Pelayanan Kedua di Provinsi Gorontalo	106
Gambar 4.2	Titik Henti Antar Pusat-Pusat Pelayanan Ketiga di Provinsi Gorontalo	106
Gambar 4.3	Peta Hirarki Pusat-pusat Pelayanan di Provinsi Gorontalo	107
Gambar 4.4	Peta Wilayah Pelayanan berdasarkan Titik Henti	108
Gambar 4.5	Peta Tata Guna Lahan	114
Gambar 4.6	Peta Kemiringan	115
Gambar 4.7	Grafik Pola Faktor I	120
Gambar 4.8	Grafik Pola Faktor II	120
Gambar 4.9	Grafik Pola Faktor III	121
Gambar 4.10	Grafik Pola Faktor IV	121
Gambar 4.11	Grafik Pola Faktor V	122
Gambar 4.12	Plotting Kombinasi Faktor I dan Faktor III	126
Gambar 4.13	Plotting Kombinasi Faktor I dan Faktor IV	128
Gambar 4.14	Plotting Kombinasi Faktor II dan Faktor III	130
Gambar 4.15	Plotting Kombinasi Faktor II dan Faktor V	132
Gambar 4.16	Peta Potensi Ekonomi	138
Gambar 4.17	Peta Potensi Pelayanan Sosial dan Administratif	140
Gambar 4.18	Peta Potensi Pelayanan Ekonomi	141
Gambar 4.19	Peta Potensi Sosial sebagai Hinterland	142
Gambar 4.20	Peta Potensi Ekonomi sebagai Hinterland	143
Gambar 4.21	Peta Satuan Wilayah Pembangunan Hasil Studi	150

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Analisis Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall
- Lampiran B Analisis Titik Henti dan Gravitasi
- Lampiran C Analisis Faktor
- Lampiran D Analisis Location Quotien (LQ)

ABSTRAK

Penerapan otonomi daerah sesuai UU No. 22/1999 adalah sebagai upaya untuk pemeratakan pembangunan, demikian halnya dengan pembentukan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan percepatan pembangunan. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan struktur perwilayahan pembangunan Provinsi Gorontalo yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu telah ditetapkan kebijakan perwilayah pembangunan Provinsi Gorontalo yang terdiri atas tiga satuan wilayah pembangunan. Permasalahan awal yang dihadapi adalah apakah struktur perwilayahan tersebut telah sesuai dengan karakteristik keterkaitan fungsional dan potensi pengembangan yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, studi ini mengkaji perwilayahan pembangunan sebagai masukan strategi pengembangan wilayah.

Kajian dalam studi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perwilayahan fungsional yaitu untuk mengenali karakteristik keterkaitan fungsional dari pusat-pusat yang ada dengan menggunakan metoda analisis Skalogram Guttman, Indeks Sentralitas Marshall, Titik Henti dan metoda Gravitasi. Kedua, pendekatan perwilayahan homogen yaitu untuk mengenali potensi-potensi perkembangan yang dimiliki, dengan menggunakan metoda analisis Faktor dan analisis LQ. Dengan dua sisi pendekatan tersebut dihasilkan suatu konsep perwilayahan pembangunan, sebagai masukan strategi dalam pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo.

Dari hasil kajian studi ini menunjukkan beberapa perbedaan antara perwilayahan pembangunan yang dirumuskan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan perwilayahan pembangunan hasil studi. Dari segi keterkaitan fungsionalnya, perwilayahan yang ada saat ini masih terdapat kerancuan, yaitu: pertama, tidak ada deliniasi yang jelas atas wilayah pelayanan dari masing-masing pusat subwilayahnya; kedua, penetapan Limboto dan Tilamuta sebagai pusat satuan wilayah belum optimal, karena sebagian wilayah yang diharapkan sebagai wilayah belakangnya, sangat terpengaruh oleh pusat-pusat lain yang juga berperan sebagai pusat pelayanan kedua (hirarki II) sehingga peran yang diharapkan dari Limboto dan Tilamuta sebagai pusat pelayanan kedua menjadi tidak efektif. Dilihat dari segi potensi pengembangan, pembagian perwilayahan yang dirumuskan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dilengkapi dengan rumusan bagaimana karakteristik potensi pengembangannya. Pada perwilayahan hasil studi, berdasarkan analisis hirarki pusat-pusat pelayanan dan wilayah pengaruh, menunjukkan: pertama, dapat ditetapkan deliniasi wilayah yang lebih jelas; kedua, sistem pusat-pusat pelayanan relatif tersusun secara hirarkis, yaitu Kota Gorontalo yang berperan sebagai pusat wilayah (hirarki I), dan lima pusat pelayanan kedua (hirarki II) yang memiliki potensi menjadi pusat satuan wilayah pembangunan. Pusat-pusat pelayanan kedua tersebut adalah Limboto, Tilamuta, Marisa, Kabila dan Kwandang.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa struktur perwilayahan pembangunan hasil studi terdiri dari lima satuan wilayah pembangunan yang relatif berbeda dengan perwilayahan pembangunan yang ada. Dalam hal ini terjadi proses restrukturisasi pada wilayah pembangunan II dan pembentukan tiga wilayah pembangunan baru.

Rekomendasi yang diusulkan agar pelaksanaan perwilayahan pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan adalah, perlu berbagai upaya pemantapan berupa peningkatan fungsi dan peranan pada masing-masing pusat satuan wilayah pembangunan serta arahan pengembangan sistem pusat-pusat dengan pengembangan sistem transportasi wilayah.

ABSTRACT

The Application of regional autonomy in accordance with Act No. 22/1999 is an effort to distribute the development evenly, so as the establishment of Gorontalo Province is one of efforts to be able to create the development acceleration. This has an implication to the structure changes of development district matters of Gorontalo Province which is part of North Sulawesi Province before. Therefore, it has been determined the policy of new development district matters consisting of three unit development districts. The faced preliminary problem is whether the district matters structure has been appropriate with the characteristic of functional relatedness and development potential owned by Gorontalo Province. In order to overcome this problem, this study examines the development district matters as a strategy input in regional development.

This study used two approaches, namely : first functional district matters approach, that is to recognize the characteristic of functional relatedness from the existing centers by using an analysis method of Scalogram Guttman, Marshall Centrality Index, Breaking Point and Gravitation Method. Second, Homogeny District Matters Approach, that is to recognize the owned developing potentials by using a Factor Analysis Method and LQ Analysis. With those two approach sides, a concept of developing district matters can be produce as a strategy input in regional development of Gorontalo Province.

The result of this study indicates some differences between development district matters formulated by Regional Government of Gorontalo Province and development district matters from the study result.

From its functional relatedness side, the existing district matters at present still has confusion, namely: first, there is no clear delineation of service district from each sub district centre; second, the determining of Limboto and Tilamuta as the centre of district unit has not been optimum yet since most of districts expected as the back side district are highly influenced by the other centres that also serve as the second service centre (Hierarchy II), thus the expected role from Limboto and Tilamuta as the second service centre is not effective anymore. Viewed from the development potential side, the district matters distribution formulated by the Government of Gorontalo Province has not been completed with the formulation of each development potential characteristics. The district matters from the study result based on the Hierarchy Analysis of Service Centres and influence district, indicates: first, clearer district delineation can be determined; second, a system of service centre arranged in the hierarchy form, namely Gorontalo City has a role as the district centre (Hierarchy I), and five second service centres (Hierarchy II) having potential to be the unit centre of development district. Those second service centres are Limboto, Tilamuta, Marisa, Kabila and Kwandang.

Based on the analysis result it can be concluded that the structure of development district matters from the study result consists of five unit development districts that are relatively different with the existing development district matters. In this case, there is a restructuring process in the second (II) development district and formation of three new development districts.

The suggested recommendation in order that the implementation of development district matters can run well are it is necessary to conduct some stabilization efforts in the form of the increasing of function and role in each unit centre of development district and the directive of centres system developing with the developing of district transportation system.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan regional memiliki peran utama dalam menangani secara langsung persoalan-persoalan fungsional yang berkenaan dengan tingkat regional. Peranan perencanaan regional pada satu pihak adalah suatu perluasan dari perencanaan lokal, dan pada pihak lain perencanaan regional adalah berkenaan dengan arus penduduk dan kesempatan kerja inter-regional. Masalah-masalah daerah perkotaan yang diakibatkan oleh faktor-faktor seperti penambahan penduduk dan urbanisasi, dan semakin bertambahnya mobilitas penduduk telah menimbulkan cara pendekatan perencanaan tata guna tanah yang dipandang sebagai perencanaan intra regional, yaitu perencanaan di dalam daerah-daerah, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi dari pada pemerintahan lokal. Masalah kemerosotan atau ketertinggalan ekonomi di daerah-daerah tertentu telah menimbulkan cara pendekatan perencanaan yang lebih bersifat ekonomi yang berkenaan dengan pengalokasian sumber daya inter-regional, yaitu perencanaan antara daerah-daerah (Glasson, 1977).

Regionalisme menurut Smith didefinisikan sebagai usaha menentukan batas-batas daerah yang biasanya lebih besar dari pada daerah struktur pemerintahan lokal, dengan maksud lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintahan dan perencanaan lokal dan nasional. Tuntutan akan regionalisasi datang dari golongan yang menginginkan desentralisasi dari pemerintah pusat; golongan yang menghendaki re-organisasi pemerintahan lokal dan golongan yang menginginkan sistem perencanaan tata guna tanah yang efisien (Glasson, 1977).

Regionalisasi merupakan proses dalam penentuan batas-batas daerah, dapat memiliki beberapa bentuk, tergantung pada maksud regionalisasi, kriteria yang akan digunakan dan ketersediaan data. Dengan demikian pemecahan persoalan kemerosotan ekonomi dapat mencakup penentuan batas-batas daerah formal dengan menggunakan kriteria tertentu yang relevan, sedang pemecahan persoalan kongesti dapat mencakup penentuan batas-batas daerah fungsional.

Pembangunan dan pengembangan saat ini sering digunakan untuk maksud yang sama. Pembangunan pada hakekatnya adalah proses mengadakan, membuat, dan mengatur sesuatu yang belum ada, sementara pengembangan merupakan proses memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Baik pembangunan maupun pengembangan dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan tersebut dapat merupakan pembangunan atau pengembangan fisik dan dapat merupakan pembangunan atau pengembangan sosial ekonomi (Jayadinata, 1986).

Pembangunan dan pengembangan wilayah mengacu kepada adanya perubahan dalam produktivitas wilayah, yang lebih mengarah kepada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi kurang berkembang menjadi berkembang. Hal ini terjadi karena disadari bahwa pengembangan terjadi tidak secara merata di seluruh Wilayah. Ada wilayah-wilayah tertentu yang lebih berkembang dari pada wilayah lainnya. Dengan demikian efek dari pengembangan akan berbeda apabila lokasinya berbeda, sehingga persoalan pengembangan wilayah adalah persoalan ruang (Friedmann, 1966).

Pembangunan atau pengembangan wilayah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antarsektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan dari daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang

merata di seluruh pelosok tanah air. Dengan perkataan lain perencanaan regional dapat memberikan kerangka dasar dalam proses pembangunan, baik nasional, regional maupun lokal yang dapat dipertemukan secara seimbang dan dapat menempati kedudukan yang sebenarnya dalam suatu rangkaian pembangunan atau pengembangan wilayah secara menyeluruh.

Pengembangan wilayah memerlukan strategi untuk mewujudkan keseimbangan antardaerah dalam tingkat pertumbuhan yang akan mendorong perdagangan antardaerah yang semakin efisien dan intensif sehingga merangsang timbulnya spesialisasi daerah. Spesialisasi daerah tersebut akan membuka kesempatan untuk berkembang bagi masing-masing daerah untuk memperkokoh perekonomian (Hadjisarosa, 1982). Salah satu strategi pengembangan wilayah yang erat kaitannya dengan aspek tata ruang adalah konsepsi perwilayahan pembangunan.

Konsepsi perwilayahan pembangunan merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan pengembangan wilayah yang dilakukan dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pemanfaatan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh daerah-daerah pemusatan dalam membangkitkan pertumbuhan dan menyalurkan perkembangan ke daerah belakangnya. Supaya penerapan strategi perwilayahan pembangunan dapat berjalan maka setiap pusat harus mempunyai fungsi dan peran yang jelas dalam sistem pusat-pusat yang terpadu dan tersusun secara hirarkis.

Diberalakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan arah perubahan yang besar dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya pelaksanaan otonomi daerah apabila dibandingkan dengan pelaksanaan desentralisasi pada masa lalu. Pelaksanaan azas

desentralisasi daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan masing-masing daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan tata jenjang (secara hierarki) antara satu dengan lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka akan muncul rigiditas dan kekakuan antardaerah. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut melalui pengembangan paradigma pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan kewilayahan.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan penuh untuk memberdayakan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan daerah melalui pembiayaan sendiri. Kewenangan ini mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan secara dini kemampuan pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk itu daerah dituntut untuk memiliki kemampuan pembangunan yang memadai, yang ditunjang oleh sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan, sumber daya alam yang dikelola dengan baik, serta sarana dan prasarana yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan tingkat kota maupun tingkat wilayah.

Bersamaan dengan perubahan-perubahan tersebut serta berkembangnya demokrasi saat ini yang mengutamakan aspirasi masyarakat dan keinginan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya satuan-satuan administrasi baru di Indonesia. Salah satu satuan administrasi baru tersebut adalah Provinsi Gorontalo, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000. Sebagai provinsi baru dan sesuai nafas otonomi daerah, Provinsi Gorontalo harus mampu merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunannya secara mandiri.

Di sisi lain terbentuknya provinsi baru ini memunculkan berbagai tantangan, antara lain:

- Peningkatan kesejahteraan rakyat sangat rentan untuk dicapai dengan segala cara tanpa memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
- Pembangunan infrastruktur untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah sering hanya ditinjau dari kepentingan lokal dan melupakan efisiensi secara lebih luas; serta
- Pengembangan ekonomi lokal yang hanya meninjau keunggulan komparatif lokal tanpa melihat keunggulan kompetitif secara lebih luas yang dapat mengakibatkan persaingan antarwilayah provinsi yang tidak sehat untuk komoditas-komoditas yang sejenis.

Persoalan yang dihadapi Provinsi Gorontalo saat ini cukup berat, selain ketertinggalan dengan wilayah lain, sebagian besar desa yang ada di Provinsi Gorontalo berkualitas sebagai desa tertinggal. Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I mencapai 70,14% dari seluruh keluarga yang ada di Provinsi Gorontalo (199.050 KK). PDRB Gorontalo pada tahun 2001 atas harga konstan hanya sebesar Rp. 968.045 juta, dan pendapatan per kapitanya hanya Rp. 1.075.951,- (US\$ 103,45). Jika diasumsikan rata-rata keluarga menganut catur warga, yaitu sepasang suami istri dengan dua anak, maka rata-rata penghasilan keluarga di Provinsi Gorontalo hanya Rp. 358.650,- (US\$ 34,48) per bulan atau Rp. 12.000,- (US \$ 1,15) per hari. Pendapatan per kapita Sulawesi Utara (sebagai provinsi induk) sudah mencapai Rp. 1.480.636,- (US\$ 142,36) atau 37,63% lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita Gorontalo. Sementara pendapatan per kapita Nasional sudah mencapai Rp. 1.718.321,- (US\$ 165,22) atau 59,70% lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita Gorontalo. PDRB, PDRB per kapita dan Pendapatan per kapita Provinsi Gorontalo tahun 2001 dapat dilihat pada Tabel I.1.

TABEL I.1
PDRB PER KAPITA DAN PENDAPATAN PER KAPITA
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2001

No	Uraian (Rp)	SULTRA	SULTENG	SULUT	GORONTALO	NASIONAL *)
1	PDRB/PDB*) ADHB (jutaan)	6.856.220	9.992.169	9.968.063	1.896.306	1.610.011.600
2	PDRB/PDB*) ADHK (jutaan)	1.766.340	2.507.463	3.357.568	968.045	426.740.500
3	PDRB/PDB*) per kapita ADHB	3.774.412	4.742.193	4.981.862	2.248.782	7.594.286
4	PDRB/PDB*) per kapita ADHK	972.386	1.190.019	1.678.053	1.147.981	2.012.898
5	Pendapatan per kapita ADHB	3.146.868	4.334.204	4.397.572	2.128.575	6.511.742
6	Pendapatan per kapita ADHK	964.749	1.084.622	1.480.636	1.075.951	1.718.321

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo dan Statistik Indonesia 2002

Catatan: ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku), ADHK (Atas Dasar Harga Konstan)

Dengan keterbatasan yang dimiliki Provinsi Gorontalo, baik keterbatasan luas wilayah maupun sumber daya alamnya, diperlukan optimalisasi potensi yang ada untuk dapat mengantisipasi persaingan dan tetap dapat eksis di era otonomi daerah saat ini. Karena dalam era otonomi daerah ini daerah dituntut untuk dapat mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri dalam mewujudkan kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang harus ditempuh adalah menyusun strategi pembangunan dengan pendekatan keruangan dan mengembangkan sektor-sektor perekonomian basis yang memiliki keunggulan komparatif, melalui perumusan konsep perwilayahan pembangunan yang tepat guna.

1.2 Rumusan Masalah

Perwilayahan pembangunan dengan mengembangkan pusat dan daerah pelayanan telah diimplementasikan selama ini, hanya saja terpolarisasinya investasi pada titik-titik pertumbuhan tertentu, tidak mampu mengakomodir permintaan pelayanan (*services demand*) yang optimal dari daerah-daerah belakangnya. Potensi dan aktivitas produksi lokal yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan wilayah belum dapat dimanfaatkan

dengan optimal. Kondisi ini perlu dicari alternatif-alternatif pemecahannya dengan menciptakan rumusan arahan strategi pengembangan wilayah melalui perwilayahan pembangunan. Melalui perwilayahan pembangunan ini diciptakan interaksi ruang atau wilayah yang kondusif dan mampu menciptakan akses terhadap upaya mengakomodir perkembangan potensi dan aktivitas produksi lokal, yang menyentuh karakter ruang atau wilayah secara keseluruhan.

Hakekat perwilayahan pembangunan adalah perangkat organisasi yang ditujukan untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat. Esensi pemekaran wilayah dilandasi oleh pemikiran tersebut sehingga upaya-upaya untuk penciptaan kesejahteraan penduduk di kabupaten-kabupaten di Provinsi Gorontalo dapat menemukan bentuknya. Pemekaran kabupaten sebagai daerah otonom baru di Provinsi Gorontalo merupakan suatu bagian dari proses awal untuk meningkatkan penggalian kemampuan atau potensi daerah secara langsung sesuai dengan kondisi dan limitasi pengembangan yang dihadapi. Pemekaran kabupaten berarti menciptakan ruang atau batasan regionalisme baru untuk lebih tumbuh berkembang dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi Provinsi Gorontalo saat ini adalah ketertinggalan dengan wilayah lain. Untuk menciptakan kesejahteraan penduduk serta mengejar ketertinggalan Provinsi Gorontalo tersebut, diperlukan strategi pembangunan dengan pendekatan pengembangan wilayah.

Dengan demikian perlu dikaji dan dirumuskan perwilayahan pembangunan yang terintegrasi dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi pelayanan dan karakteristik wilayah yang mendukung perkembangan potensi dan aktivitas produksi di Provinsi Gorontalo. Dari pembahasan ini dapat dirumuskan *problem statement* dalam studi ini yaitu: "Perwilayahan merupakan pendekatan yang efektif dalam pengembangan wilayah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi".

Untuk menjawab permasalahan utama yang telah diidentifikasi, dilakukan pendekatan melalui pertanyaan penelitian yaitu: **“Bagaimanakah satuan perwilayahan pembangunan yang tepat guna untuk diterapkan dalam rangka pengembangan wilayah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo”**.

1.3 Tujuan Studi

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan memberikan alternatif konsep satuan ruang perwilayahan pembangunan yang tepat guna untuk diterapkan di Provinsi Gorontalo, sebagai masukan strategi dalam pengembangan wilayah.

1.4 Sasaran Studi

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Menemukenali karakteristik fisik dasar dan sosial ekonomi serta mengkaji permasalahan yang menyangkut sistem perwilayahan pembangunan.
2. Menganalisis sistem interaksi antar satuan wilayah yang merupakan aspek penentu sistem perwilayahan dari polarisasi ruang yang terbentuk, dengan mengidentifikasi hirarki pusat-pusat pelayanan, keterkaitan spasial antar pusat pelayanan dengan pusat utama melalui pendekatan perwilayahan fungsional.
3. Menganalisis potensi dan peranan sektor dalam mendukung perkembangan wilayah melalui pendekatan perwilayahan homogenitas.
4. Menemukan suatu alternatif struktur perwilayahan pembangunan sesuai dengan kajian yang ada saat ini.
5. Mengkaji implikasi perwilayahan pembangunan sebagai masukan strategi dalam pengembangan wilayah di Provinsi Gorontalo.

1.5 Ruang Lingkup Studi

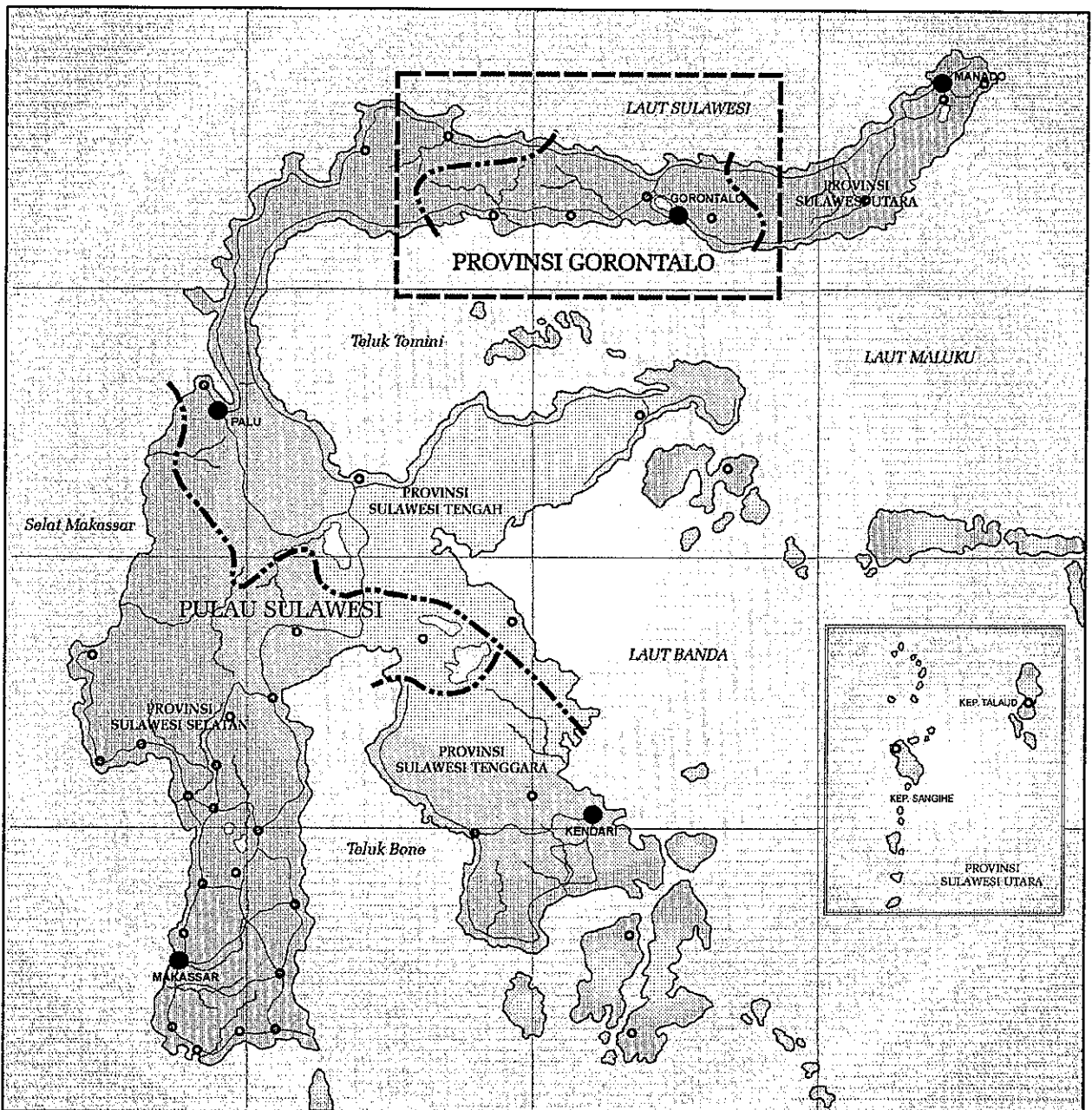
1.5.1 Ruang Lingkup Spasial



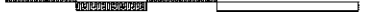



Penentuan wilayah penelitian ini didasarkan pada kebutuhan unit analisis yang akan dikaji yang meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Gorontalo, yaitu terdiri dari 376 desa/kelurahan pada 38 kecamatan, terbagi dalam 4 kabupaten (yaitu: Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango) dan 1 kota (Kota Gorontalo) yang semuanya termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Gorontalo (lihat Gambar 1.1)

1.5.2 Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial dari studi ini dijabarkan dalam upaya merumuskan perwilayahan pembangunan sebagai masukan strategi dalam pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo. Secara lebih rinci lingkup materi studi ini adalah meliputi :

- Perwilayahan Pembangunan adalah sistem regionalisasi dari pembangunan nasional dan pengembangan kota, serta kota-kota pusat pembangunan.
- Wilayah Pengaruh atau wilayah pelayanan adalah merupakan luas jangkauan pelayanan masing-masing pusat atau simpul yang bersangkutan, yang pada hakekatnya merupakan fungsi dari tingkat kegiatan di pusat atau simpul tersebut dan respons penduduk di daerah belakangnya.
- Wilayah Fungsional, adalah wilayah geografik yang memperlihatkan suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian bila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen yang secara fungsional saling berkaitan.
- Wilayah Homogen, adalah wilayah geografik yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan wilayah ini adalah kriteria fisik dan kriteria sosial ekonomi.



 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	LEGENDA :  <ul style="list-style-type: none"> Batas Provinsi Batas Kabupaten Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Sungai / Anak Sungai Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten Wilayah Studi 	SKALA								
TESIS		0 50 100 150 250 km 	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>UTARA</td> <td>NO. PETA</td> <td>HALAMAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.1</td> <td>10</td> </tr> </table>		UTARA	NO. PETA	HALAMAN		1.1	10
UTARA		NO. PETA	HALAMAN							
		1.1	10							
PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO	SUMBER									
PETA	ATLAS INDONESIA dan BPN Provinsi Gorontalo									

1.6 Kerangka Pemikiran Studi

Paradigma otonomi daerah telah memberikan arah perubahan yang besar dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu daerah dituntut untuk memiliki kemampuan pembangunan yang memadai, selain didukung oleh sumberdaya manusia sebagai penggerak pembangunan, juga harus ditunjang dengan pengelolaan sumberdaya alam yang baik serta sarana dan prasarana yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan tingkat kota maupun tingkat wilayah.

Sebagai satuan administrasi baru hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara yang terbentuk bersamaan dengan perubahan-perubahan tersebut, Provinsi Gorontalo dituntut harus mampu merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri. Selain itu baik pemekaran Provinsi Gorontalo maupun pemekaran kabupaten di Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom baru, berarti menciptakan ruang atau batasan regionalisasi baru untuk dapat lebih berkembang dan merupakan suatu bagian dari proses awal untuk meningkatkan kemampuan daerah secara langsung sesuai dengan kondisi, limitasi pengembangan dan tantangan yang dihadapi.

Menghadapi kondisi tersebut diperlukan optimalisasi potensi yang ada untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang dihadapi yang salah satunya adalah dengan pendekatan pengembangan wilayah. Untuk itu telah ditetapkan kebijakan perwilayahan baru di Provinsi Gorontalo, sebagai implikasi dari perubahan struktur perwilayahan yang sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara sebagai provinsi induk. Permasalahan awal yang dihadapi yaitu apakah struktur perwilayahan baru tersebut telah sesuai dengan karakteristik fungsional dan potensi pengembangan Provinsi Gorontalo.

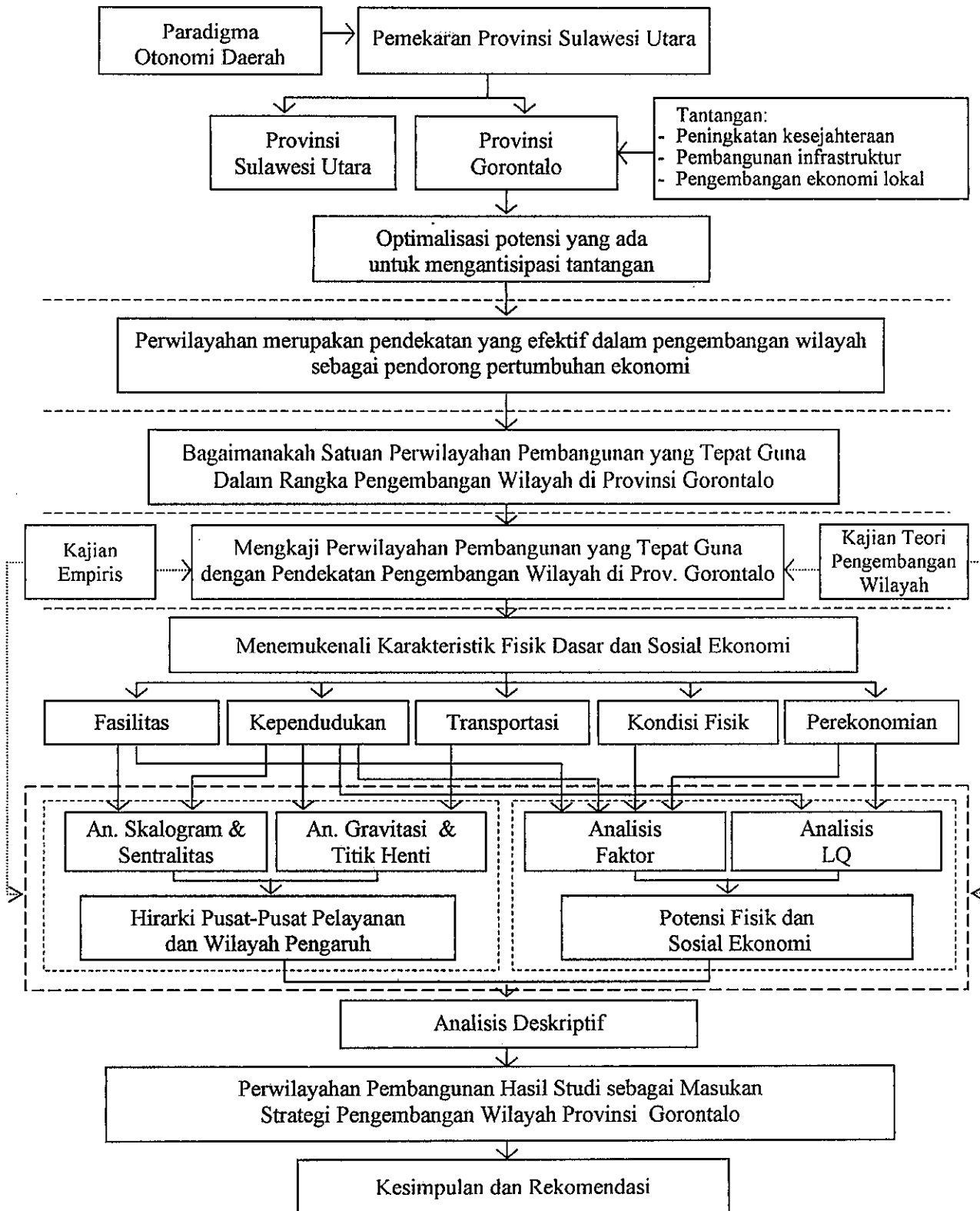
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang harus ditempuh adalah dengan mengkaji konsep perwilayahan pembangunan yang tepat guna sebagai masukan

strategi dalam pengembangan wilayah di Provinsi Gorontalo yang terintegrasi dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi pelayanan dan karakteristik wilayah.

Sebagai langkah pertama, pada kerangka yang merupakan gambaran umum alur berpikir dari studi yang dilakukan ini, adalah mendeskripsikan isu, fenomena dan permasalahan sebagai latar belakang pemilihan tema, yaitu melakukan pengkajian terhadap strategi perwilayahan pembangunan melalui pendekatan pengembangan wilayah, baik dari segi teoritis maupun empiris melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengembangan wilayah.

Tahapan berikutnya adalah menemukenali karakteristik wilayah studi, yaitu dari aspek-aspek fisik, sosial dan ekonomi. Kajian dalam studi ini, aspek-aspek tersebut meliputi karakteristik fasilitas, kependudukan, transportasi, kondisi fisik dan perekonomian. Langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya dalam mengkaji perwilayahan pembangunan dengan pendekatan pengembangan wilayah di Provinsi Gorontalo, adalah dengan melakukan analisis terhadap sistem perwilayahan. Hal tersebut dilakukan melalui pendekatan perwilayahan fungsional dan perwilayahan homogen. Pendekatan Perwilayahan fungsional dilakukan dengan menggunakan metoda analisis Skalogram Guttman, Indeks Sentralitas Marshall, Gravitasi dan metoda analisis Titik henti. Adapun pendekatan perwilayahan homogen menggunakan metoda analisis Faktor dan LQ.

Selanjutnya hasil analisis tersebut diatas digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merumuskan konsep perwilayahan pembangunan hasil studi Pada bagian akhir adalah merekomendasikan rumusan perwilayahan pembangunan hasil studi sebagai masukan strategi dalam pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo. Adapun kerangka pemikiran yang mendasari pendekatan tersebut, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.2.



GAMBAR 1.2
KERANGKA PIKIR STUDI
PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MASUKAN STRATEGI
PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO

1.7 Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya berdasarkan ruang lingkup studi dilakukan beberapa pendekatan dalam proses analisis, yaitu dengan terlebih dahulu adalah memahami keterkaitan fungsional yang terjadi, dilakukan pendekatan perwilayahan fungsional dari pusat-pusat yang ada di wilayah studi. Berikutnya untuk melihat potensi perkembangan di wilayah studi dengan melakukan pendekatan perwilayahan secara homogen. Dari kedua pendekatan perwilayahan tersebut dihasilkan suatu perwilayahan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Metoda pendekatan perwilayahan fungsional lebih menyangkut interdependensi atas bagian-bagian, bukan merupakan keseragaman. Metoda yang akan digunakan untuk melakukan pendekatan perwilayahan fungsional adalah dengan menggunakan metoda analisis Skalogram Guttman, Indeks Sentralitas Marshall, metoda analisis Titik henti dan analisis Gravitasi.

Analisis skalogram Guttman digunakan untuk menentukan pusat-pusat yang akan dijadikan sebagai pusat pelayanan serta menentukan wilayah yang dipengaruhi oleh pusat tersebut. Analisis indeks sentralitas juga digunakan untuk menilai kemampuan dan hirarki pusat pelayanan. Sedang analisis titik henti dan gravitasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana jangkauan pelayanan atau batas wilayah pengaruh dari masing-masing pusat pelayanan. Metoda analisis titik henti dan gravitasional, bukan mengenai arus yang sesungguhnya terjadi, tetapi berkaitan dengan kekuatan-kekuatan daya tarik yang bersifat teoritik antara pusat-pusat.

Metoda pendekatan perwilayahan Homogen mempunyai pengertian bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tertentu wilayah tersebut seragam. Suatu wilayah homogen dapat dicirikan oleh sifat-sifat geografi, fisik, sosial, politik, institusi atau oleh sifat-sifat

ekonomi (Pealick dan Nijkamp, 1978 : 191). Pembagian wilayah secara homogen merupakan suatu usaha untuk mengelompokkan satuan-satuan wilayah dalam kelas yang sama ditinjau dari kriteria-kriteria tertentu. Metoda yang akan digunakan untuk melakukan pendekatan perwilayahan homogenitas adalah dengan menggunakan analisis faktor.

TABEL 1.2
PENDEKATAN STUDI

Pendekatan	Keruangan	Ekonomi
Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> ● Hirarki Pusat-pusat Pelayanan ● Wilayah Pengaruh 	-
Homogen	-	<ul style="list-style-type: none"> ● Karakteristik Perkembangan Wil. ● Peranan Sektor-sektor Enonomi

Sumber : Pendekatan studi, 2004

1.7.1 Kerangka Analisis

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan studi ini, digunakan beberapa alat analisis yang akan dilakukan dalam upaya mendukung tercapainya tujuan penelitian. Analisis- analisis yang akan dilakukan disesuaikan dengan sasaran-sasaran studi ini.

Analisis perwilayahan fungsional bertujuan untuk menentukan pusat utama dan batasan wilayah pengaruhnya, dilakukan melalui metode regionalisasi yang menggunakan pendekatan berdasarkan keeratan hubungan fungsional antar kota maupun antar bagian wilayah di Propinsi Gorontalo. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam setiap tahapan analisisnya adalah sebagai berikut :

- Pendekatan yang digunakan dalam penilaian hirarki kota adalah berdasarkan kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing kota. Semakin lengkap jenis fasilitas yang dimiliki oleh suatu kota maka akan menunjukkan hirarki yang semakin tinggi.
- Pendekatan yang digunakan dalam penentuan pusat-pusat utama yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai pusat wilayah pembangunan yang merupakan pendekatan dalam penetapan perwilayahan pembangunan adalah berdasarkan hasil penilaian hirarki kota disertai dengan pertimbangan terhadap hirarki wilayah secara fungsional dari wilayah pembangunan terhadap wilayah propinsi, yaitu bahwa wilayah pembangunan secara fungsional berada satu tingkat dibawah propinsi. Oleh karena itu kota-kota yang layak dijadikan sebagai pusat wilayah pembangunan adalah yang memiliki orde setingkat dibawah pusat propinsi, yaitu yang mempunyai orde I dan II.
- Batas-batas atau cakupan wilayah pembangunan ditentukan dengan menggunakan pendekatan terhadap nilai interaksi antar suatu kota dengan pusat utama yang dijadikan sebagai pusat wilayah pembangunan. Nilai interaksi terbesar dari suatu kota terhadap salah satu pusat wilayah pembangunan menunjukkan suatu kota memiliki hubungan fungsional yang lebih erat atau lebih dipengaruhi oleh pusat wilayah pembangunan tersebut dari pada terhadap pusat wilayah pembangunan lainnya, sehingga kota tersebut ditetapkan sebagai wilayah pengaruhnya.

Analisis perwilayahan homogen terhadap suatu wilayah merupakan suatu pendekatan terhadap daerah geografis yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Melalui pendekatan ini diharapkan terbentuk klasifikasi daerah homogen atau formal. Regionalisasi secara homogen atau formal berarti pengelompokan unit-unit lokal yang mempunyai ciri-ciri serupa menurut kriteria yang dipergunakan secara jelas, tetapi

berbeda secara nyata dari unit-unit di luar daerah berdasarkan kriteria yang dipilih (Glasson, 1977).

Pendekatan lain yang juga digunakan untuk hal tersebut adalah dengan mengidentifikasi potensi sektor-sektor ekonomi dalam mengembangkan perekonomian wilayah, yang diasumsikan atas keunggulan komparatif masing-masing sektor melalui peranan dan tingkat perkembangannya. Peranan sektor-sektor ekonomi diamati berdasarkan kontribusi sektoral dalam keseluruhan perekonomian wilayah. Sedangkan tingkat perkembangan dan potensi ekspor sektor-sektor ekonomi diukur dengan menggunakan metoda analisis *Location Quotien (LQ)*. Selanjutnya sektor-sektor yang kemudian dianggap berpotensi dijadikan sektor strategis/unggulan. Melalui pendekatan tersebut sektor unggulan yang berperan penting sekaligus memiliki potensi perkembangan yang baik, sehingga diharapkan perkembangannya akan dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah.

1.7.2 Tahapan Penelitian

Sesuai dengan tujuan studi, untuk melaksanakan penelitian akan dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

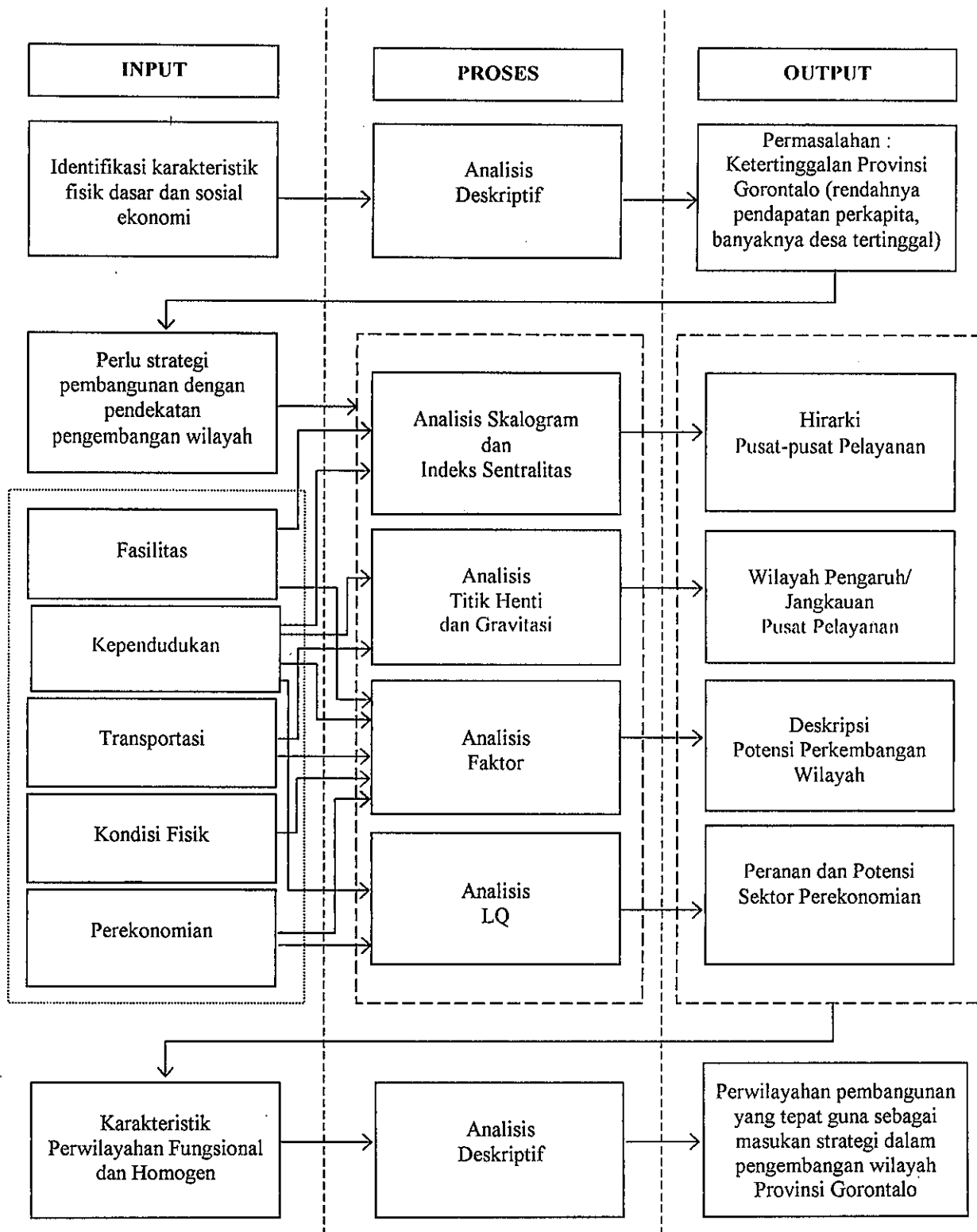
- Mengidentifikasi perwilayahan secara fungsional melalui pendekatan potensi aliran demografis dari fungsi-fungsi pelayanan sosial ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Pendekatan analisis terhadap kekuatan interaksi dari suatu tempat pusat terhadap daerah pelayanannya dilihat berdasarkan batas ambang pengaruh pelayanan aktifitas sosial ekonomi, dengan menggunakan metoda analisis titik henti (*breaking point*) dan analisis gravitasi. Wilayah pengaruh suatu fungsi pelayanan akan menjelaskan besar

potensi aliran demografis dari atau menuju pusat interaksi yang dianalisis. Pusat interaksi sosial ekonomi yang dinilai kekuatan pengaruh pelayanannya adalah pusat-pusat di wilayah Provinsi Gorontalo yang sudah teridentifikasi sebelumnya.

- Mengidentifikasi perwilayahan/regionalisasi secara fungsional melalui pendekatan hirarki pusat-pusat pertumbuhan. Perwilayahan ini dilakukan dengan menggunakan metoda kuantitatif yaitu dilakukan dengan mengetahui nilai kelengkapan dan keterpusatan fungsional pelayanan di wilayah Provinsi Gorontalo, dan yang akan ditinjau adalah kemampuan pelayanan suatu tempat pusat terhadap wilayahnya sendiri dan daerah pelayanannya. Kemampuan terhadap tempat pusat dalam metode ini akan memperlihatkan hirarki wilayah Provinsi Gorontalo berdasarkan kelengkapan dan keterpusatan fasilitas baik ekonomi, sosial maupun fasilitas umum. Metoda analisis yang digunakan adalah metoda skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall.
- Mengetahui perwilayahan Provinsi Gorontalo secara homogen. Perwilayahan yang terbentuk diharapkan dapat memperlihatkan potensi dan gambaran karakter dasar wilayah yang membangun interaksi ruang wilayah secara homogen. Metode dalam analisis ini adalah dengan menggunakan metoda analisis faktor dan LQ.
- Dari hasil analisis perwilayahan secara fungsional dan homogen tersebut diatas dapat diidentifikasi karakteristik perwilayahan fungsional dan perwilayahan homogen, yang selanjutnya dilakukan analisis deskriptif untuk mendapatkan Perwilayahan hasil studi sebagai masukan strategi dalam pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo.

Tahapan penelitian tersebut secara diagramatis dapat digambarkan dalam kerangka analisis pada Gambar 1.3.



GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISIS
PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MASUKAN STRATEGI
PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO

1.7.3 Metode Analisis

Metode analisis yang dipergunakan dalam studi ini adalah secara deskriptif kualitatif yang didukung dengan analisis kuantitatif. Untuk melakukan analisis perwilayahan fungsional menggunakan metoda analisis skalogram Guttman, indeks sentralitas Marshall, gravitasi, dan titik henti. Sedang untuk analisis perwilayahan homogen menggunakan metoda analisis faktor dan LQ.

A. Analisis Skalogram Guttman

Tujuan dari metoda analisis Skalogram Guttman ini pada dasarnya untuk memberi gambaran adanya pengelompokan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan berdasarkan kelengkapan fungsi pelayannya. Dalam hal ini fungsi pelayanan ditentukan melalui jenis fasilitas yang dimiliki oleh pusat-pusat tersebut.

Ukuran fasilitas yang dinilai adalah jumlah dan kelengkapannya. Jumlah menyatakan banyaknya satuan fasilitas dan kelengkapan menyatakan jenis-jenis fasilitas yang ada. Fasilitas yang digunakan dalam penilaian ini adalah fasilitas yang mencirikan fungsi pelayanan sosial dan ekonomi, objeknya tunggal dan terukur, serta diusahakan memiliki karakteristik hirarkis atau berjenjang (Rondinelli, 1985 : 107).

B. Analisis Indeks Sentralitas

Metoda Indeks Sentralitas Marshall pada dasarnya juga bertujuan untuk menilai jumlah unit setiap jenis fasilitas pada suatu pusat pelayanan dibandingkan terhadap pusat pelayanan lainnya. Nilai yang dihasilkan adalah nilai keterpusatan fasilitas. Nilai keterpusatan tersebut merupakan indikator yang dapat menunjukkan kemampuan pelayanan suatu pusat pelayanan, sehingga semakin tinggi nilai keterpusatan suatu fasilitas maka semakin tinggi kemampuan pelayannya. Berdasarkan nilai keterpusatan tersebut akan dapat diketahui urutan kemampuan pelayanan setiap pusat pelayanan.

Pada metoda ini akan dilakukan pembobotan terhadap jenis fasilitas-fasilitas tersebut sebagai nilai sentralitas gabungan, sedang pembobotan terhadap jumlah unit fasilitas disebut sebagai nilai sentralitas fasilitas. Dalam pembobotan digunakan asumsi bahwa nilai sentralitas gabungan setiap jenis fasilitas dianggap sama. Berdasarkan anggapan tersebut maka pembobotan unit fasilitas dapat dilakukan dengan cara membagi nilai sentralitas gabungan dengan jumlah total unit fasilitas yang ada di seluruh pusat pelayanan. Dengan demikian fasilitas yang jumlah unitnya relatif kecil akan memiliki bobot atau nilai sentralitas lebih besar (Rondinelli, 1985 : 125)

C. Analisis Gravitasi

Model Gravitasi merupakan salah satu pendekatan untuk melihat atau menilai hubungan antardaerah, dan disini daerah dianggap sebagai suatu massa. Model gravitasi diambil dari konsepsi fisika yang menyatakan daya tarik menarik antar dua kutub magnet. Hubungan antardaerah diasumsikan sama dengan hubungan antar massa. Massa wilayah juga mempunyai daya tarik, sehingga terjadi pengaruh mempengaruhi antardaerah sebagai perwujudan kekuatan tarik menarik antardaerah. Oleh karena itu dengan modifikasi tertentu sesuai dengan karakteristik massa yang dihadapi, model gravitasi dapat diterapkan sebagai salah satu model analisis (Warpani, 1984 : 111).

Dalam analisis wilayah dan kota, pengelompokkan penduduk, pemusatan kegiatan, atau potensi sumber daya alam, dianggap mempunyai daya tarik yang dapat dianalogikan dengan daya tarik menarik magnet. Penggunaan metoda ini dalam analisis wilayah masih mengandung beberapa kelemahan, terutama terletak pada variabel yang digunakan sebagai ukuran. Untuk mengurangi kelemahan ini model gravitasi telah banyak dikembangkan dengan tidak hanya menggunakan variabel massa, tetapi juga faktor-faktor lain yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang dikaji seperti misalnya menggunakan

variabel kemampuan pelayanan atau indeks sentralitas fasilitas yang kemudian disebut dengan bobot. Walaupun demikian hal tersebut tidak mengurangi arti pentingnya model ini dalam analisis.

D. Analisis Titik Henti

Analisis titik henti digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana jangkauan pelayanan atau batas wilayah pengaruh pusat-pusat dengan *hinterland*. Metoda analisis titik henti dikemukakan oleh Whyne-Hammond dalam bukunya yang memberikan pedoman dengan jelas mengenai batas pengaruh suatu pusat pelayanan atau kota terhadap wilayah sekitarnya (Daldjoeni, 1997 : 211).

Titik henti antara dua pusat permukiman atau kota pada dasarnya berfungsi membagi penduduk yang menggantungkan diri pada pelayanan pusat permukiman yang satu dan penduduk yang menggantungkan diri pada pelayanan pusat permukiman yang lainnya. Apabila dua pusat permukiman tersebut sama besar dan pentingnya, maka titik henti akan terletak di tengah-tengah kedua pusat permukiman tersebut. Akan tetapi apabila tidak sama besarnya maka pusat permukiman yang lebih besar cenderung memiliki tarikan melebihi apa yang dimiliki pusat permukiman yang lebih kecil, demikian halnya lokasi titik hentinya akan mendekati pusat permukiman yang lebih kecil tersebut. (Daldjoeni, 1997 : 212-213). Dengan demikian batas wilayah pengaruh didapatkan dari besaran angka wilayah pengaruh atau kekuatan daya tarik yang terjadi yaitu dimana lokasi titik hentinya.

E. Analisis Faktor

Metoda yang digunakan untuk melakukan perwilayahan dengan pendekatan secara homogen dalam studi ini adalah model analisis faktor. Analisis faktor merupakan bagian dari analisis variasi ganda (*multivariate analysis*) dalam ilmu statistik, yang pada masa sekarang telah berkembang dan digunakan pada berbagai cabang ilmu, antara lain

dalam perencanaan wilayah. Analisis faktor memungkinkan dilakukan pengurangan dari sejumlah besar variabel menjadi dimensi-dimensi dasar yang berjumlah lebih kecil yang menjelaskan pengamatan tersebut pada sifat dasarnya, sementara relevansi statistik dan informasi yang tetap terjaga tidak berkurang (Paelinck dan Nijkamp, 1978 : 207). Dari hal tersebut analisis faktor dapat berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersamar yang sebenarnya mendasari variabel-variabel dalam suatu observasi.

Pertimbangan lain penggunaan metoda analisis faktor antara lain adalah :

- Analisis faktor dapat mengurai karakteristik wilayah melalui interpretasi faktor-faktor dasarnya.
- Analisis faktor dapat membantu dalam menentukan apa dan bagaimana setelah perwilayahan dilakukan, karena faktor-faktor yang menjadi penentu homogenitas wilayah dihasilkan dari pengolahan data empiris.
- Loading faktor untuk setiap variabel merupakan hasil pengolahan data-data sehingga bersifat obyektif dan empiris.

Metode metode analisis faktor dalam studi ini digunakan untuk membantu memahami dan mendefinisikan karakteristik suatu wilayah yang homogen dengan menemukan faktor-faktor dasar apa yang sebenarnya ada dibalik sejumlah variabel dan observasi yang besar. Hasil dari analisis faktor ini berupa potensi perkembangan sosial ekonomi di Provinsi Gorontalo.

F. Analisis LQ

Dalam menganalisis peran sektor-sektor ekonomi basis dalam studi ini menggunakan metoda analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan sektor-sektor ekonomi pada tiap pusat-pusat pelayanan, yaitu dengan membandingkan sumbangan sektor-sektor yang ada pada suatu pusat pelayanan

terhadap sumbangan sektor yang sama pada tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini provinsi.

Sektor-sektor utama yang diharapkan dapat mendorong dan memperkuat perkembangan wilayahnya, adalah sektor-sektor yang memiliki keunggulan di masing-masing wilayahnya. Keunggulan tersebut antara lain dalam hal peranan sektor terhadap perekonomian wilayahnya. Peranan sektor yang semakin besar akan menunjukkan semakin tingginya potensi sektor tersebut dalam mengembangkan perekonomian wilayah, yang selanjutnya akan memperkuat perkembangan wilayah.

Variabel yang dipergunakan dalam analisis ini adalah jumlah tenaga kerja pada tiap-tiap sektor ekonomi, yang terdiri dari 9 sektor yaitu sektor primer (pertanian; pertambangan dan galian); sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan/konstruksi); dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan; dan sektor jasa).

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam studi ini terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan latar belakang permasalahan dan perlunya mengkaji strategi pengembangan wilayah yang dilakukan melalui pendekatan perwilayahan pembangunan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari studi ini. Selanjutnya dikemukakan ruang lingkup; kerangka pemikiran; metoda studi, dan sistematika penulisan.

Bab. II Konsep Pendekatan Pengembangan Wilayah melalui Sistem Perwilayahan Pembangunan

Bab ini mencakup uraian tentang tinjauan aspek teoritik dari berbagai literatur yang bertujuan untuk memahami konsep dasar pola hubungan fungsional antarwilayah

yang mengadopsi teori pusat pertumbuhan dan teori tempat pusat yang terdapat dalam teori perencanaan wilayah. Selanjutnya konsep dasar tersebut yang akan digunakan sebagai pendekatan dalam merumuskan perwilayahan pembangunan sebagai salah satu strategi pengembangan wilayah.

Bab. III Masalah Pengembangan Wilayah Provinsi Gorontalo

Pada bab ini menggambarkan secara umum mengenai karakteristik wilayah studi, yang meliputi keadaan fisik dasar; kependudukan; sosial budaya; perekonomian, kelembagaan dan kebijaksanaan pengembangan wilayah di Provinsi Gorontalo. Bab ini juga merupakan suatu tinjauan terhadap potensi-potensi yang dimiliki wilayah studi sebagai suatu pra-analisis terhadap daerah studi.

Bab. IV Analisis Perwilayahan Pembangunan sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Provinsi Gorontalo

Pada bagian pertama pada bab ini mengemukakan analisis perwilayahan fungsional. Tahapan pada analisis ini meliputi penilaian kemampuan pelayanan dan hirarki pusat pelayanan wilayah pengaruhnya. Selanjutnya mengemukakan analisis perwilayahan secara homogen dimulai dari tahapan metoda analisis potensi perkembangan wilayah, kriteria penilaian potensi perkembangan sosial ekonomi, faktor perkembangan sosial ekonomi, pengelompokan desa-desa, analisis sektor-sektor ekonomi basis di Provinsi Gorontalo. Pada bagian akhir bab ini dikemukakan pembahasan hasil analisis studi, kondisi eksisting dan teori pengembangan wilayah yang digunakan sebagai pendekatan pada studi ini.

Bab.V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam studi ini dan rekomendasi berdasarkan kesimpulan tersebut.

BAB II

KONSEP PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH MELALUI SISTEM PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN

Perbedaan antardaerah dalam suatu wilayah baik alamiah maupun buatan menyebabkan adanya perbedaan dalam peluang untuk tumbuh dan berkembang. Perbedaan tersebut telah mendorong terciptanya kecenderungan bagi penduduk dan aktifitas sosial ekonomi serta berbagai fasilitas pelayanan untuk mengelompok pada daerah tertentu yang merupakan pemusatan dalam suatu ruang wilayah. Oleh karena itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan potensi serta keadaan wilayah lainnya, sehingga dapat terwujud hubungan ketergantungan dan interaksi kegiatan sosial ekonomi yang menunjang antarwilayah. Hal tersebut perlu dikembangkan untuk mencapai terwujudnya usaha pembangunan dengan kekuatan masing-masing wilayah, dan pada gilirannya dapat lebih memacu percepatan pembangunan daerah dengan pendekatan kebijakan pengembangan wilayah.

Pengembangan wilayah merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan desentralisasi yang berorientasi pada pemecahan masalah ketertinggalan dan ketimpangan antarwilayah dalam tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang terpusat telah berdampak terhadap kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal dan kemandirian pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada perlunya dipertimbangkan kembali arahan pengembangan wilayah yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Arahan pengembangan wilayah dalam pelaksanaan desentralisasi dapat dipelajari dari regionalisasi pembangunan daerah.

2.1 Perencanaan Wilayah

Kajian literatur *regional planning* sebagai pendekatan dalam pengembangan wilayah melalui sistem perwilayahan pembangunan, antara lain adalah teori tentang kutub pertumbuhan, tempat pusat dan konsepsi simpul jasa distribusi. Konsep kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan telah dipergunakan baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Konsep tersebut dipergunakan untuk mempercepat perkembangan daerah terbelakang melalui pemusatan investasi dalam suatu daerah tertentu, sehingga terjadi keuntungan ekonomi pada daerah pengaruh (Hansen, 1972: Richardson, 1976 dalam Warsilan, 1993: 19). Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut untuk memahami penerapan konsep-konsep tersebut dalam kebijakan pengembangan wilayah.

2.1.1 Teori Kutub Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan pertama kali dikemukakan oleh Francois Perroux. Perroux berpendapat bahwa fakta dasar dari perkembangan spasial, sebagaimana halnya dengan perkembangan industri, adalah bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak; pertumbuhan tersebut terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berubah-ubah; pertumbuhan tersebut menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan ekonomi. Lebih spesifik lagi, Boundeville mendefinisikan kutub pertumbuhan regional sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh wilayah pengaruhnya (Glasson, 1977).

Elemen-elemen yang mendasari teori kutub pertumbuhan dijelaskan sebagai berikut (Glasson, 1977):

1. Industri utama (*leading industry*) dan industri pendorong (*propulsive industry*). Dalam konsep ini menyatakan bahwa pada pusat atau kutub pertumbuhan terdapat industri pendorong yang besar, yang termasuk dalam industri utama yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Ada kemungkinan bahwa suatu kompleks industri hanya terdiri satu atau beberapa industri pendorong yang dominan.

Lokasi geografis dari industri-industri tersebut pada titik-titik tertentu dalam suatu wilayah, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor lokalisasi sumber daya alam, lokalisasi kemanfaatan buatan manusia (seperti komunikasi, atau tempat pusat yang berlandaskan kegiatan jasa yang sudah ada, dimana terdapat keuntungan-keuntungan karena prasarana dan penawaran tenaga kerja), atau hanya karena bersifat kebetulan saja. Dalam kenyataannya titik-titik pertumbuhan tersebut seringkali dicangkokkan pada kerangka tempat-tempat pusat (*central places*) yang sudah ada.

2. Polarisasi, menurut konsep ini dinyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari industri utama (*leading industry*) mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub pertumbuhan. Secara implisit proses polarisasi ini terjadi karena berbagai macam keuntungan aglomerasi. Polarisasi ekonomi ini akan menimbulkan polarisasi geografis dengan mengalirnya sumber daya ke konsentrasi kegiatan ekonomi pada pusat-pusat yang jumlahnya terbatas di dalam suatu wilayah.
3. Penyebaran (*spread effect*), konsep penyebaran ini menyatakan bahwa pada waktunya, pertumbuhan dan perkembangan pada pusat atau kutub pertumbuhan akan memancar ke luar dan memasuki ruang disekitarnya. Pada awalnya pengaruh tersebut dirasakan di kota-kota dan daerah pedesaan yang terletak di sekitar kutub pertumbuhan, kemudian efeknya menyebar ke celah-celah wilayah belakangnya.

Perroux menjelaskan bahwa pertumbuhan tidak terjadi secara serentak. Pertumbuhan tersebut terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda-beda. Konsep Perroux yang menekankan pada perkembangan kutub pertumbuhan pada di dalam ruang ekonomi, dengan mengembangkan suatu tipologi ruang ekonomi yang terdiri dari pusat-pusat yang memancarkan kekuatan sentrifugal dan menarik kekuatan sentripetal. Konsep Perroux ini selanjutnya dikembangkan oleh beberapa ahli dengan nama yang berbeda-beda, seperti kutub pengembangan, pusat pertumbuhan, titik pertumbuhan dan sebagainya. Tidak seperti konsep asli Perroux, konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam ruang geografis (Glasson, 1977).

Kutub-kutub pertumbuhan maupun pusat-pusat pertumbuhan pada hakekatnya adalah sebagai upaya untuk menimbulkan pertumbuhan ke daerah-daerah yang terbelakang atau daerah-daerah yang mengalami kemunduran. Selanjutnya diharapkan pusat-pusat pertumbuhan ini juga mengandung hubungan timbal balik antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya (Darwent, 1975). Pada dasarnya konsep tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan wilayah melalui kutub atau pusat pertumbuhan. Dari kutub atau pusat pertumbuhan diharapkan terjadi dorongan perkembangan ke wilayah sekitarnya, sehingga dapat memperkecil ketidak-seimbangan antardaerah. Dalam hal ini terdapat dua hipotesa yang mendasari (Miller dalam Warsilan, 1993):

1. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dimulai dan mencapai puncaknya pada sejumlah pusat-pusat tertentu.
2. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dijalarkan dari pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan secara nasional melalui jenjang kota-kota, dan secara kewilayahan melalui pusat-pusat perkotaan ke daerah belakangnya.

Dengan demikian, agar pendekatan pengembangan wilayah melalui pusat pertumbuhan dapat berjalan sebagaimana diharapkan, tiap pertumbuhan harus mempunyai fungsi dan peran yang jelas secara hirarkis dalam sistem pusat pertumbuhannya. Karena tanpa adanya hirarki pusat-pusat pertumbuhan yang jelas sangat sulit diharapkan adanya hubungan timbal balik antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya. Dalam pengembangan daerah melalui teori pusat-pusat, kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki dan fungsinya.

Dalam skala regional sesuai dengan fungsinya, ada beberapa jenjang hirarki pusat-pusat pertumbuhan, antara lain (Friedmann, 1966):

1. Pusat Pertumbuhan Primer

Pusat pertumbuhan primer berfungsi sebagai pusat utama, dengan demikian pusat pertumbuhan primer dapat merangsang pertumbuhan yang lebih rendah tingkatannya. Pusat pertumbuhan primer biasanya dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar yang mempunyai daerah belakang yang paling kuat dan lebih banyak memiliki fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya. Pusat pertumbuhan primer juga sering berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan dalam wilayah keseluruhan.

2. Pusat Pertumbuhan Sekunder

Pusat pertumbuhan sekunder merupakan pusat orde kedua dalam suatu daerah dan merupakan pusat dari sub daerah. Seringkali pusat pertumbuhan sekunder diciptakan untuk mengembangkan sub daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan primer, sehingga pengaruh perambatan perkembangannya tidak terjangkau oleh pusat pertumbuhan primer dapat dilakukan oleh pusat pertumbuhan sekunder. Dalam hal tertentu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sekunder merupakan suatu cara untuk merelokasi tenaga kerja dari pusat pertumbuhan primer dan sektor ekonomi berlebihan.

3. Pusat Pertumbuhan Tersier

Pusat pertumbuhan tersier merupakan pusat orde ketiga dalam suatu daerah dan merupakan titik pertumbuhan terhadap daerah belakangnya. Perkembangan pusat tersier ini lebih banyak dipengaruhi pusat yang lebih tinggi tingkatannya, terutama pusat pertumbuhan sekunder. Tetapi pusat pertumbuhan tersier dapat pula berkembang karena pengaruh langsung dari pusat pertumbuhan primer.

Dalam penerapannya, teori kutub pertumbuhan atau pusat pertumbuhan digunakan sebagai alat kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Banyak negara telah menerima konsep kutub pertumbuhan sebagai suatu alat transformasi ekonomi dan sosial pada skala regional. Namun demikian konsep kutub pertumbuhan ini banyak mendapat kritik para ahli, yang pada umumnya berpendapat bahwa penerapan konsep ini cenderung semakin meningkatkan disparitas wilayah di negara sedang berkembang, terutama antardaerah pusat atau kutub dengan daerah pengaruhnya. Daerah pusat atau kutub cenderung lebih banyak menarik sumber daya dari daerah belakang daripada *spread effect* yang ditimbulkannya, akibatnya daerah pusat yang lebih maju akan bertambah maju, sedangkan daerah belakang akan semakin tertinggal.

Mungkin terlalu dini untuk menolak konsep ini untuk diterapkan di negara sedang berkembang, menurut Hirschman (Andusti, 1995) bahwa secara geografis perkembangan daerah tidaklah sama. Pada titik-titik pertumbuhan tertentu pada beberapa wilayah tertentu terjadi kekuatan-kekuatan besar yang mendorong pemusatan pertumbuhan ekonomi spasial di sekitar titik-titik tolak pertumbuhan. Pemusatan pertumbuhan tersebut cenderung akan semakin besar disebabkan oleh adanya keuntungan eksternal pada titik-titik pertumbuhan tersebut. Proses ini disebut proses polarisasi, yang karena semakin kuatnya wilayah yang maju maka akan menyerap tenaga kerja terlatih dan investasi dari wilayah yang belum

berkembang. Akibatnya wilayah yang lemah akan semakin lemah dan yang maju semakin berkembang dengan cepat.

Keterkaitan dan saling pengaruh antardaerah maju dan terbelakang tersebut dalam kegiatan ekonomi kedua wilayah yang bersifat komplemen dapat terjadi suatu efek menetes ke bawah (*trickling down effect*), yang justru akan merangsang dan mengembangkan daerah yang belum berkembang tersebut pada suatu waktu tertentu. Walaupun pada mulanya wilayah yang lebih maju tersebut berkembang lebih dahulu, dengan adanya peningkatan pendapatan maka akan timbul peningkatan permintaan jasa dari wilayah yang tidak berkembang. Selanjutnya dengan keuntungan dari kegiatan ekonomi di daerah maju, maka suatu saat daerah maju akan melakukan investasi di wilayah tidak berkembang, yang akan mendorong meningkatnya tingkat pendapatan. Hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan tabungan masyarakat serta akan menumbuhkan investasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi dan sumber lokal yang memiliki keunggulan komparatif. Pada akhirnya untuk jangka waktu tertentu daerah tidak berkembang tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Dengan demikian ketimpangan wilayah akibat dari penerapan konsep kutub atau pusat pertumbuhan hanya suatu fase dari keseluruhan proses perkembangan.

Beberapa hal yang juga menyebabkan konsep kutub pertumbuhan atau pusat pertumbuhan menarik untuk dijadikan sebagai sarana kebijaksanaan, yaitu adanya berbagai macam keuntungan aglomerasi yang sangat efisien untuk menimbulkan perkembangan dan efisiensi anggaran karena pemusatan penanaman modal pada titik-titik pertumbuhan tertentu lebih murah dari pada pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah (Glasson, 1977).

2.1.2 Teori Tempat Pusat

Teori tempat pusat (*central place theory*) yang terkenal dicetuskan oleh Walter Christaller, dikembangkan dari teori Von Thunen mengenai keterpusatan suatu kota sebagai pasar terhadap hasil pertanian regionnya menjadi struktur spasial pusat-pusat dalam suatu sistem fungsional. Christaller memulai analisisnya dengan berpendapat bahwa prinsip sentralitas yang ada pada struktur atom berlaku juga pada kehidupan sosial ekonomi manusia. Oleh karena itu fungsi utama suatu kota adalah sebagai pusat bagi suatu wilayah yang disebut *hinterland*. Selanjutnya Christaller menggunakan istilah *central place* bukan kota karena kata *place* lebih bersifat netral.

Dalam teori tempat pusat dianggap bahwa terdapat hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat pusat didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat pusat tersebut merupakan suatu permukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat pusat ini dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, seperti misalnya perlunya dilakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah dapat menjadi wilayah penyedia jasa sedang lainnya hanya sebagai daerah permukiman.

Jenis-jenis kegiatan yang mempunyai sifat pusat (baik pelayanan/jasa koleksi distribusi) akan mendapat keuntungan jika mengumpul di tempat-tempat tertentu saja, dibandingkan jika menyebar tidak beraturan. Keuntungan tersebut dikatakan sebagai keuntungan aglomerasi beberapa jenis kegiatan. Aglomerasi tersebut selanjutnya akan menarik kegiatan lainnya untuk berlokasi di tempat tersebut karena beberapa kebutuhannya dapat terlayani pada suatu lokasi sekaligus. Dengan demikian system keterpusatan tersebut memberikan keuntungan baik bagi produsen maupun konsumen.

Mengikuti istilah Christaller, suatu tempat pusat akan terbentuk oleh adanya profesi yang bersifat pusat dan pusat barang atau jasa. Bersifat pusat artinya diproduksi dan atau dijual pada beberapa titik sentral saja, untuk melayani populasi yang tersebar. Tetapi juga harus diingat bahwa kota-kota atau pusat-pusat tersebut sangat beragam dalam ukuran dan jenis serta fungsinya. Oleh karena itu Christaller kemudian mempertimbangkan fungsi-fungsi yang terhirarki dari tempat-tempat pusat tersebut, yaitu ada tempat pusat yang mempunyai orde paling tinggi hingga orde yang paling rendah. Wilayah yang dilayani oleh tempat pusat disebut wilayah komplementer (*complementary region*) atau wilayah belakang (*hinterland*), atau ada yang menyebut sebagai wilayah pengaruh atau wilayah pelayanan. Secara umum ukuran wilayah komplementer adalah relatif konstan, karena radiusnya merupakan fungsi dari jarak ekonomi (*economic distance*). Jarak ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor seperti biaya transport, waktu perjalanan, transit dan ketidaknyamanan perjalanan. Jadi jarak ekonomi adalah kesediaan penduduk menempuh perjalanan maksimum untuk membeli pelayanan barang dan jasa yang tersedia di tempat pusat. Daya tarik tempat pusat terhadap penduduk yang tersebar di wilayah komplementer tidak tergantung hanya pada jarak, tetapi juga pada macam, kualitas dan harga dari barang dan pelayanan jasa di pusat.

Perkembangan tempat pusat tergantung pada konsumsi barang pusat, sedang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi antara lain: penduduk (meliputi distribusi, kepadatan dan struktur), permintaan, penawaran dan harga barang/jasa serta kondisi wilayah dan transportasi. Konsumsi barang/jasa berkurang jika penduduknya kurang, dan usaha pertanian terpencar. Sebaliknya konsumsi bertambah jika penduduk menumpuk dekat dan padat. Penghasilan penduduk ikut menentukan sedikit banyaknya penawaran dan permintaan, karena harga barang. Topografi wilayah serta lancarnya transportasi

menentukan terjangkaunya barang-barang pusat dan pertumbuhan tempat pusat (Daldjoeni, 1992).

Terdapat empat unsur penting untuk menjelaskan terselenggaranya kegiatan di pusat-pusat pelayanan dalam hubungan tempat pusat dan wilayah pelayanannya (Johnson, 1975: 123-135; Glasson, 1977 : 148-156), yaitu:

- Hirarki, bahwa kegiatan pelayanan mempunyai tingkatan, dimulai dari tingkatan rendah di permukiman kecil sampai pada tingkatan tinggi.
- Batas ambang penduduk (*threshold population*), adalah jumlah penduduk minimum yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan di tempat pusat agar dapat menguntungkan. Jika penduduk suatu wilayah dengan satu pusat telah melebihi batas ambang dan terus meningkat hingga mencapai jumlah tertentu, maka kemungkinan penduduk yang jaraknya terjauh dari tempat pusat telah melebihi jarak ekonomi, sehingga akan mencari pelayanan pada pusat lainnya yang lebih dekat.
- Lingkup pelayanan, adalah jangkauan terjauh dari pelayanan suatu pusat dan diluar itu penduduk akan mencari pusat lain.
- Fungsi, yaitu jenis kegiatan pelayanan dan kelengkapan fasilitasnya.

Menurut pendapat Johnson, penyebab semakin buruknya masalah keterbalakangan di negara-negara sedang berkembang adalah kurang berperannya sistem pusat-pusat pelayanan. Aksesibilitas daerah belakang untuk mencapai pasar sangat kurang. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pengembangan pusat-pusat pelayanan. Hal yang sama dikemukakan oleh Rondinelli yang berpendapat bahwa sistem permukiman di negara-negara sedang berkembang tidak seimbang, oleh karena pengaruh perekonomian masa penjajahan, maka pusat pelayanan terbesar tampak sangat dominan dan tidak terintegrasi dengan daerah belakangnya (Rondinelli, 1978: 55)

Argumentasi dasar yang mendukung penggunaan tempat pusat dalam perencanaan wilayah adalah suatu system pusat yang hirarkis dapat menghindari duplikasi dan pemborosan. Sistem hirarki adalah suatu cara yang relatif efisien untuk peng-administrasian dan pengalokasian sumber daya di dalam suatu wilayah, memudahkan terwujudnya manfaat-manfaat sosial yang ditimbulkan oleh keuntungan-keuntungan skala. Selain itu jaringan pusat-pusat yang saling berkaitan memberikan arti bahwa perencanaan suatu pusat di suatu wilayah harus memperhitungkan implikasi-implikasinya bagi pusat-pusat lain di daerah tersebut. Karena dengan kurang ditaatinya prinsip ini telah menimbulkan banyak duplikasi yang memboroskan di suatu wilayah. Hilhorst mengemukakan dalam suatu pendekatan yang menarik mengenai sintesa dari teori wilayah, juga berpendapat bahwa daya tahan perekonomian suatu wilayah terhadap guncangan atau kejutan adalah jauh lebih besar dimana struktur ruang dari wilayah yang bersangkutan sudah terjalin erat.

Teori ini pada dasarnya adalah statik, menjelaskan adanya struktur ruang regional tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya struktur tersebut dan bagaimana perubahannya di masa yang akan datang. Walaupun penerapannya secara langsung dalam praktek perencanaan regional mungkin terlihat tidak begitu mudah, terlebih-lebih di daerah maju dimana terdapat struktur pemukiman yang kompleks. Namun teori ini masih mempunyai peranan yang sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang sangat penting bagi perencana regional, seperti interdependensi kota dan daerah, hirarki fungsi dan pusat, serta lingkup pasar dan penduduk ambang (Glasson, 1977).

Menurut pendekatan teori tempat pusat, sistem permukiman di negara sedang berkembang dapat dibagi menjadi empat tingkatan. Tingkatan tersebut disusun berdasarkan peranan dan fungsinya sebagai pusat pelayanan (Rondinelli, 1978: 64-75; ESCAP, 1979: 101-104), yaitu:

1. Pusat Pedesaan, yaitu melayani desa-desa di sekitarnya. Jumlah penduduk 500-2.500 jiwa dengan jumlah seluruh pelayanan 5.000 – 20.000 jiwa. Radius pelayanan 7,5-15 Km dengan luas 200-700 km². Menyediakan kebutuhan dasar bagi keperluan-keperluan rumah tangga dan pertanian. Menyediakan fasilitas sosial untuk meningkatkan taraf hidup pedesaan. Memiliki organisasi yang kooperatif untuk memadukan program pembangunan dari atas dan dari bawah.
2. Kota Kecil, jumlah penduduk berkisar antara 2.500-25.000 jiwa, dengan jumlah keseluruhan yang dilayani 20.000-200.000 jiwa. Radius pelayanannya 15-50 km, dengan luas 700-750 km². Berfungsi sebagai kota pasar dan berperan penting untuk mentransformasikan pertanian komersil. Sudah melibatkan swasta dalam proses pembangunan. Umumnya fasilitas yang tersedia erat keitannya dengan kegiatan perdagangan pertanian.
3. Kota Menengah, jumlah penduduk 25.000-200.000 jiwa dengan jumlah keseluruhan yang dilayani antara 200.000-800.000 jiwa. Radius pelayanannya 50-100 km dengan luas 7.500 – 30.000 km². Berperan penting dalam menjembatani dan mengintegrasikan perkembangan kota utama dengan daerah belakangnya. Oleh karena itu kegiatan sosial ekonominya merupakan campuran antara tradisional dan modern, informal dan formal, desa dan kota. Berpotensi untuk mencegah dan menyerap migrasi menuju ke kota utama. Berkemampuan untuk menyerap sebagian fungsi yang terkonsentrasi di kota utama. Fungsi pelayanannya antara lain adalah pusat perdagangan dan pemasaran di wilayahnya, kegiatan agro-industri dan menyediakan perlengkapan pertanian, lapangan kerja jasa dan komersil yang erat hubungannya dengan sektor informal, dan sebagai pusat pelayanan sosial di wilayahnya.

4. Kota Utama, melayani seluruh daerah dengan radius pelayanan 100-500 km dan luas 30.000-750.000 km². Dengan penduduk kotanya berkisar antara 200.000 – 5.000.000 jiwa dengan jumlah keseluruhan yang dilayani 8.000.000 – 20.000.000 jiwa. Memiliki kedudukan dominan dan berfungsi sebagai pusat utama kegiatan komersil, jasa, perdagangan, pendidikan, administrasi dan industri. Pertumbuhannya cenderung ke kegiatan tersier.

Pengelompokkan keempat tingkatan permukiman tersebut diatas, pada prinsipnya masih bersifat umum, dan merupakan hasil generalisasi tingkatan pusat-pusat pelayanan yang disimpulkan dari negara-negara sedang berkembang. Lebih jauh Rondinelli berpendapat, seharusnya pembagian tingkatan dilakukan berdasarkan hasil analisis karakteristik daerahnya. Dengan demikian dapat diperoleh hasil yang optimal berdasarkan kemampuan pelayanan setiap tingkatan permukimannya (Rondinelli, 1978: 63-64). Artinya, tingkatan tersebut pada prinsipnya masih dapat dibagi lagi sesuai dengan kebutuhan karakteristik pelayanan setiap daerah. Namun demikian, dalam hubungan untuk menyusun tingkatan permukiman berdasarkan pendekatan teori tempat pusat, keempat pembagian tingkatan tersebut dapat dijadikan bahan rujukan.

2.1.3 Konsepsi Simpul Jasa Distribusi

Pengembangan wilayah menurut Hadjisarosa (1982), akan terjadi oleh adanya pertumbuhan modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia maupun sumberdaya alamnya dan berlangsungnya pengembangan kedua jenis sumberdaya tersebut menimbulkan terjadinya arus barang. Arus barang dianggap sebagai salah satu gejala ekonomi yang paling menonjol dan merupakan wujud fisik perdagangan antardaerah, antarpulau maupun antarnegara yang didukung langsung oleh jasa perdagangan dan jasa distribusi. Dengan demikian jasa distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting

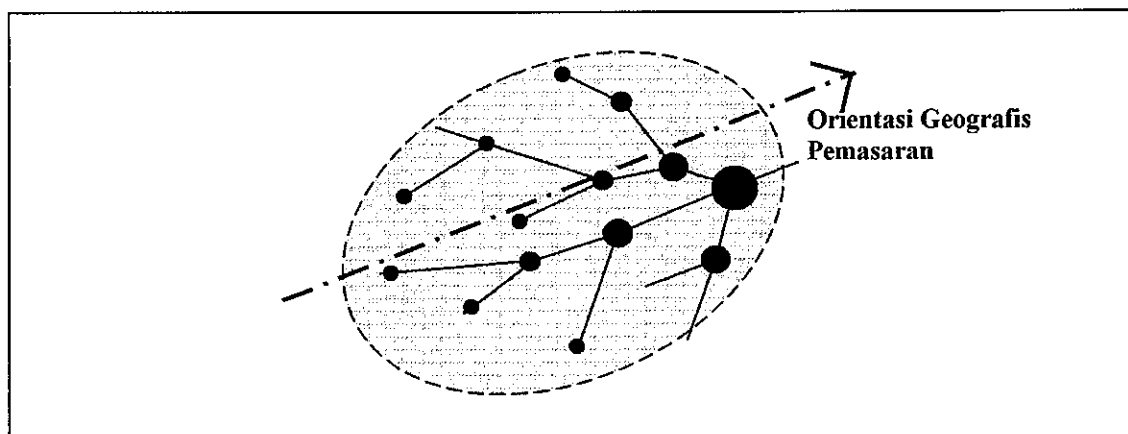
fungsinya dalam kehidupan manusia dan pembangunan secara fisik serta dalam proses pengembangan wilayah, terutama jika ditinjau dari pengaruhnya dalam penentuan lokasi berkelompoknya berbagai kegiatan usaha dan pelayanan.

Kriteria yang dipilih untuk menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah adalah tingkat kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, baik berupa kebutuhan hidup maupun kebutuhan untuk melakukan kegiatan usaha. Pemakaian kriteria pendapatan daerah perkapita sangat sulit untuk mencari keterkaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, karena belum dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat, pendapatan tinggi belum berarti merupakan suatu bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya (Hadjisarosa, 1982).

Kemudahan yang diartikan sebagai kesempatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, pada umumnya banyak terdapat di kota. Semakin tinggi tingkat kemudahan pada suatu tempat, berarti akan semakin kuat daya tariknya terhadap arus manusia dan kegiatan ekonomi. Diantara kemudahan-kemudahan tersebut jasa distribusi merupakan unsur yang sangat penting, oleh karena itu pada umumnya kota-kota merupakan simpul jasa distribusi.

Interaksi antara simpul besar dengan simpul-simpul kecil dan daerah-daerah belakangnya yang berada dalam wilayah pengaruhnya merupakan unsur yang penting dalam konsepsi simpul jasa distribusi. Semakin kuat ciri-ciri simpul berarti semakin luas dan jauh jangkauan wilayah pengaruhnya, dan semakin dekat ke simpul berarti lebih banyak jenis barang yang terjangkau oleh pelayanan pemasaran, yang berarti pula tersedia kesempatan yang lebih besar untuk pengembangan kegiatan usaha. Karena simpul juga merupakan konsentrasi penduduk, maka dapat diartikan bahwa interaksi antar simpul berkorelasi terhadap jumlah penduduk, tetapi interaksi antar simpul tersebut menunjukkan korelasi yang negatif dengan jarak.

Dalam pemahaman peranan simpul-simpul, terdapat dua faktor penting yaitu mengenai fungsi simpul dan hirarki simpul dalam sistim spasial. Fungsi primer suatu simpul adalah sebagai pusat pelayanan jasa distribusi bagi wilayah pengembangannya (bersifat keluar), sedang fungsi sekunder adalah kehidupan masyarakat di simpul yang bersangkutan (bersifat kedalam). Perbedaan fungsi simpul tersebut mencerminkan pula perbedaan dalam jenis dan kapasitas yang tersedia di masing-masing simpul. Hirarki tiap simpul ditentukan oleh kedudukannya dalam hubungan fungsional antar simpul. Simpul orde distribusi I tidak berada dalam sub ordinasi simpul-simpul lain, simpul-simpul orde distribusi II berada dalam sub ordinasi simpul orde distribusi I, demikian seterusnya untuk simpul-simpul orde distribusi dibawahnya. Pada umumnya simpul-simpul yang lebih tinggi ordenya, tersedia fasilitas jasa distribusi yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan simpul-simpul yang lebih rendah ordenya. Antara simpul-simpul tersebut baik yang mempunyai tingkat orde yang sama ataupun berbeda, terdapat keterhubungan dan ketergantungan. Berdasarkan susunan hirarki serta keterhubungan dan ketergantungan antar simpul dapat ditentukan arah pengembangan pemasarannya secara geografis, seperti terlihat pada Gambar 2.1.



GAMBAR 2.1
STRUKTUR DASAR PENGEMBANGAN WILAYAH

Sumber : Hadjisarosa, 1982

Konsepsi simpul jasa distribusi merupakan konsep yang akomodatif menggunakan pendekatan yang realistik dengan tinjauan obyek yang nyata. Analisisnya bertitik tolak pada kehidupan masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya yang digambarkan sebagai pengembangan kegiatan-kegiatan manusia dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam susunan spasial yang menimbulkan pertumbuhan modal untuk pembangunan selanjutnya dalam kerangka pengembangan wilayah.

Kelebihan konsepsi simpul jasa distribusi dibandingkan dengan teori-teori lain adalah : Pertama, pendekatan dan cara pandangnya yang realistik berakar pada kenyataan dalam masyarakat. Kedua, membedakan wilayah administratif dan wilayah pengembangan. Secara administratif, wilayah terbagi habis tetapi tidak berarti bahwa seluruh administrasi secara otomatis tercakup dalam wilayah pengembangan. Dalam kenyataannya beberapa bagian wilayah administrasi tidak terjangkau oleh pelayanan distribusi, karena hambatan-hambatan geografis atau belum tersedianya prasarana distribusi ke atau dari bagian-bagian wilayah tersebut. Ketiga, bertitik tolak pada pemahaman struktur wilayah yang memformulasikan struktur pengembangan wilayah secara nasional (Indonesia), yaitu memberikan gambaran tentang : penyebaran satuan-satuan wilayah pengembangan pada wilayah nasional; orientasi dan tingkat perkembangan masing-masing satuan wilayah pengembangan; dan hubungan ketergantungan antar satuan wilayah pengembangan melalui masing-masing simpulnya. Keempat, arus barang ditinjau dalam rangkaian kegiatan distribusi menurut apa adanya, yaitu meliputi beberapa unit produksi dan beberapa unit pasar.

2.1.4 Interaksi Keruangan

Interaksi, menurut para geografer dapat dijelaskan dalam tiga bentuk utama, yaitu: migrasi, jika menyangkut arus manusia; komunikasi, jika menyangkut gerakan atau

perpindahan gagasan dan informasi; transportasi, jika menyangkut materi dan energi. Istilah interaksi keruangan diciptakan oleh E. L. Hilman (Daldjoeni, 1997: 189) untuk menentukan interdependensi antarwilayah geografis. Interaksi keruangan dilihat sebagai suatu fokus utama dalam kajian geografis, yang didalamnya mencakup gerakan barang, orang, uang, penumpang, gagasan dan sebagainya antarwilayah. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa migrasi, komunikasi dan transportasi dapat terjadi jika dipenuhi oleh tiga persyaratan, yaitu: pertama, komplementaritas yaitu dapat diartikan sebagai perbedaan karakteristik antarwilayah yang saling melengkapi dan selanjutnya melahirkan permintaan dan permintaan; kedua, transferabilitas yaitu semakin kecilnya hambatan dalam hal waktu dan biaya sehingga interaksi antarwilayah relatif lebih mudah; dan ketiga, *intervening opportunities* (absennya alternatif lain) adalah tidak adanya pilihan atau alternatif lain dalam hal pemenuhan kebutuhan, sehingga perlu berinteraksi dengan wilayah lain (Daldjoeni, 1997: 190).

Menurut Rondinelli (1978), interaksi keruangan dalam pengembangan wilayah terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- interaksi fisik, berbentuk integrasi keruangan dari sekelompok permukiman menciptakan interaksi fisik melalui jaringan transportasi baik alami maupun buatan.
- interaksi ekonomi, juga membentuk integrasi keruangan dari jaringan pemasaran dari berbagai kegiatan ekonomi.
- interaksi pergerakan penduduk yang merupakan gambaran dari interaksi desa-kota.
- interaksi teknologi, interaksi ini juga harus terintegrasi secara keruangan dan fungsional.
- interaksi sosial, merupakan dampak dari interaksi ekonomi terhadap pola hubungan sosial masyarakat.

- interaksi pelayanan sosial, merupakan interaksi yang terbentuk oleh aktivitas kebutuhan pelayanan umum, interaksi ini juga dipengaruhi oleh jumlah dan kepadatan penduduk.
- interaksi politik, administrasi dan kelembagaan, merupakan interaksi ruang yang diintegrasikan dan ditransformasikan melalui struktur politik, administratif dan kelembagaan, serta saling ketergantungan antar lembaga.

Interaksi keruangan sangat terkait dengan teori pusat-pusat pertumbuhan dan kutub-kutub pertumbuhan, yang selanjutnya interaksi ini akan membentuk pola ruang sebagai berikut (Harris dan Ullman, 1978):

- *Uniform*, pola ruang ini menggambarkan bahwa tempat-tempat pusat di distribusikan ke dalam suatu pola seragam, yang berfungsi menyediakan barang dan jasa ke wilayah sekitarnya.
- *Specialization function*, pola ini cenderung memperlihatkan pengelompokan karakteristik tapak, atau aktifitas lain yang saling melengkapi.
- *Transport center*, pola ini dibentuk dari besarnya aktivitas fisik, komersil atau politik yang terjadi dalam aktivitas transportasi secara terus menerus.
- *Combines*, pola ini merupakan pola gabungan dari beberapa pola tersebut diatas.

Terjadinya interaksi merupakan akibat dari aktivitas yang terjadi dalam suatu wilayah dan tidak terlepas dari aktivitas di wilayah lainnya, yang selanjutnya akan menciptakan hubungan antarwilayah. Hubungan antarwilayah ini pada umumnya terfokus dalam aktivitas ekonomi, yang meliputi hubungan dari proses produksi sampai dengan proses konsumsi atau pemanfaatan hasil produksi. Pada proses tersebut dapat ditemukan adanya proses koleksi dan distribusi yang meliputi beberapa elemen komoditi baik barang maupun jasa serta aliran uang.

Aliran barang dan jasa pada umumnya mempunyai pengaruh yang relatif besar dalam hubungan antarwilayah. Proses aliran barang dan jasa ini sangat tergantung dari ketersediaan prasarana pendukung berupa prasarana transportasi. Dengan tersedianya prasarana transportasi yang memadai, maka daerah tidak hanya mampu memanfaatkan potensi yang tersedia, tetapi juga dapat membuka peluang baru yang sebelumnya belum diketahui. Demikian halnya dengan aliran uang, juga memiliki peran yang tidak kalah penting, pengiriman hasil produksi dan atau tenaga kerja antarwilayah akan menuntut biaya dari hasil hubungan antarwilayah tersebut dalam bentuk aliran uang. Proses interaksi yang konsisten tersebut dalam kurun waktu tertentu akan menciptakan saling ketergantungan antarwilayah.

2.2 Pembangunan Wilayah

Untuk dapat memberikan gambaran bagaimana pembangunan yang akan digunakan dalam studi ini, sebelumnya dapat dijelaskan tentang teori pembangunan secara umum. Menurut pengertiannya pembangunan memiliki banyak definisi, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:

- Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*) (Siagian, 1984).
- Pembangunan bukan semata-mata merupakan fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, pembangunan haruslah mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial (Todaro, 1983)

- Pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada, yang dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut dapat merupakan pembangunan fisik dan dapat merupakan pembangunan sosial ekonomi. Sedang pembangunan regional meliputi suatu wilayah dan mempunyai tekanan utama pada perekonomian dan tekanan berikutnya pada keadaan fisik, sehingga merupakan gabungan dari kedua hal tersebut diatas. Pembangunan meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan (Jayadinata, 1986), yaitu: Pertama, menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan, dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat. Kedua, memilih metode yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, menyusun kembali (*restructuring*) masyarakat dengan maksud supaya timbul pertumbuhan sosial ekonomi yang kuat.
- Pembangunan diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan untuk mempengaruhi masa depan. Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, mencakup keadilan (*equity*), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat memilih kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Akhirnya pembangunan berarti perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya (Bryant dan White, 1987).

Berdasarkan skalanya, pembangunan dapat mempunyai skala nasional, regional atau lokal. Pembangunan nasional meliputi seluruh negara dengan tekanan pada perekonomian. Pembangunan lokal meliputi kawasan kecil dengan tekanan pada keadaan fisik. Sedang pembangunan regional meliputi suatu wilayah dan mempunyai tekanan utama pada perekonomian dan tekanan kedua pada keadaan fisik, sehingga merupakan dari kedua hal diatas (Jayadinata, 1992). Hal tersebut sesuai dengan pendapat para ahli lainnya yaitu bahwa dalam konteks pembangunan nasional maupun daerah, pembangunan yang dilakukan sebagai suatu pembangunan ekonomi. Hal tersebut dapat dibenarkan karena pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan peningkatan dalam pertumbuhan perkapita sebagai indeks dari pembangunan. Akan tetapi pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktifitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat (Todaro, 1983).

Dari uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang luas yang menyangkut dimensi sosial, ekonomi, fisik, politik, budaya dan sebagainya. Namun dari dimensi-dimensi tersebut yang paling berpengaruh adalah dimensi ekonomi. Kemajuan ekonomi adalah suatu komponen yang esensial dari pembangunan, walaupun bukan satu-satunya. Oleh karena itu pembangunan biasanya diartikan sebagai pembangunan ekonomi, yang didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Demikian pula pembangunan di Indonesia baik nasional maupun pembangunan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, diartikan pula sebagai pembangunan perekonomiannya, sedangkan pembangunan sektor selain ekonomi dianggap sebagai dampak pembangunan ekonomi baik langsung maupun secara tidak langsung. Dilihat dari definisi pembangunan

ekonomi tersebut tidak berarti bahwa dalam menentukan perkembangan hanya menekankan tujuan pada peningkatan pendapatan perkapita semata. Banyak tujuan lain yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi antara lain: menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya secara merata dirasakan oleh masyarakat, menciptakan pembangunan yang seimbang di berbagai daerah (Sukirno, 1985).

Pembangunan wilayah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan dari daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah berupa penetapan sasaran-sasaran makro dan sektoral serta kebijaksanaan pembangunan secara nasional. Dari bawah ke atas berupa aspirasi daerah yang merencanakan pengembangan potensi daerah serta menampilkan keadaan nyata di lapangan.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan sesuatu yang tidak mudah, banyak kendala yang dihadapi sebagai kenyataan yang ada, antara lain:

- Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana yang lebih besar untuk membangun prasarana dan sarana, yang akan lebih membuka dan menyeimbangkan kesempatan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah-wilayah terbelakang secara lebih cepat.
- Keterbatasan sumber daya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab sekaligus akibat keterbelakangan itu sendiri.
- Dalam ekonomi yang terbuka dan menganut prinsip-prinsip pasar, apalagi dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi serta menghadapi tantangan globalisasi,

persaingan menjadi sangat penting dan dengan sendirinya yang paling mampu bersaing, apakah itu pengusaha, sector, atau wilayah akan lebih memanfaatkan kesempatan.

- Sulitnya menarik investor swasta sebagai sumber dan pemacu pertumbuhan ke wilayah terbelakang, terutama investasi yang berkualitas, yaitu membuka lapangan kerja luas dan meningkatkan pertumbuhan daerah secara berkelanjutan, dengan efek samping positif (*multiplier effect*) yang sebesar-besarnya.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari segi sektoral dan wilayah. Dari segi pembangunan sektoral, pencapaian pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Sedang dari segi pembangunan wilayah, meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah tersebut. Kota dan desa saling terkait dan membentuk suatu system, oleh karena itu pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi.

Jadi pendekatan kewilayahan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan. Dengan pendekatan kewilayahan tersebut diupayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan investasi dengan memanfaatkan keunggulan setiap wilayah serta mengembangkan produk-produk yang tepat untuk wilayah tersebut.

2.2.1 Konsep Perwilayahan

Dalam melakukan studi mengenai pengembangan wilayah, hal yang perlu dijelaskan adalah beberapa konsep tentang wilayah (*region*). John Glasson (1977) mengemukakan konsep tentang wilayah sebagai metode klasifikasi muncul melalui dua fase yang berbeda, yaitu yang mencerminkan kemajuan ekonomi dari perekonomian sederhana ke sistim industri yang kompleks. Pada fase pertama memperlihatkan "wilayah

formal” yaitu berkenaan dengan keseragaman dan didefinisikan menurut homogenitas. Fase kedua memperlihatkan perkembangan “wilayah fungsional” yaitu berkenaan dengan interdependensi, saling hubungan antara bagian-bagian dan didefinisikan menurut koherensi fungsional.

Wilayah formal adalah wilayah geografik yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu. Pada awalnya kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan daerah formal, terutama adalah bersifat fisik seperti topografi, iklim dan vegetasi dikaitkan dengan konsep determinasi geografik. Tetapi berikutnya terjadi peralihan kepada penggunaan kriteria ekonomi, seperti tipe industri atau tipe pertanian. Wilayah alamiah adalah wilayah formal fisik. Perhatian kepada bentuk klasifikasi wilayah ini sebagian timbul karena dari kenyataan bahwa faktor-faktor fisik adalah lebih stabil dari pada faktor ekonomi dinamik dan dengan demikian lebih mudah untuk dipelajari. Sedang wilayah formal ekonomi pada umumnya didasarkan pada tipe-tipe industri atau pertanian, walaupun latar belakang sifat fisik sudah barang tentu tidak dapat diabaikan. Usaha-usaha yang dilakukan pada waktu-waktu berikutnya untuk menentukan batas daerah-daerah formal ekonomi telah didasarkan pada kriteria seperti tingkat pendapatan, tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan ekonomi.

Wilayah fungsional adalah wilayah geografik yang memperlihatkan suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-bagian, bila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah fungsional ini kadang-kadang disebut sebagai Wilayah Nodal atau *polarized region* dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.

Wilayah formal atau wilayah fungsional ataupun gabungan keduanya memberikan suatu kerangka bagi klasifikasi tipe wilayah yang ketiga yaitu wilayah perencanaan.

Wilayah perencanaan merupakan wilayah geografik yang cocok untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan untuk memecahkan persoalan-persoalan wilayah.

Klasifikasi tentang wilayah diatas tidak jauh berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh Richardson (1979) yang membagi wilayah atas tiga tipe yaitu :

- Wilayah Homogen

Wilayah dilihat dari segi kesamaan karakteristik serta dimana perbedaan internal dan interaksi intraregional dianggap bukan sesuatu yang penting. Wilayah homogen menunjukkan bahwa beberapa daerah berkumpul membentuk sebuah wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kesamaan secara ekonomi, keadaan geografi, atau sosial politik. Dalam konsep wilayah homogen, hubungan regional yang didasari oleh ekonomi lebih penting dari pada perbedaan intraregional.

- Wilayah Nodal (*Polarized*)

Pada wilayah ini keseragaman hanya sedikit diperhatikan. Keterpaduan merupakan hasil dari aliran-aliran internal, hubungan dan saling ketergantungan biasanya terpolarisasi menuju ke sebuah pusat (*node*) yang dominan. Dalam konsep ini dipahami bahwa ruang ekonomi sangatlah heterogen. Penduduk dan industri tidak tersebar di seluruh lokasi tetapi berkumpul pada lokasi-lokasi yang spesifik. Pada tingkat regional, wilayah disusun oleh titik-titik yang heterogen dengan ukuran berbeda-beda (kota besar, kota kecil, desa) yang berkaitan secara fungsional.

- Wilayah Perencanaan

Dalam konsep ini kesatuan diperoleh dari kontrol politik atau administratif. Wilayah perencanaan lebih mudah dipahami sebagai sebuah daerah dimana kebijaksanaan ekonomi diterapkan, dan hal ini merupakan satu-satunya kekuatan yang menyatukan.

Ukuran wilayah perencanaan yang optimal dibedakan dengan panjang waktu perencanaan. Daerah yang lebih besar dibutuhkan untuk perencanaan jangka panjang, sebaliknya wilayah perencanaan yang lebih kecil menawarkan berbagai keuntungan sistem desentralisasi, antara lain : kesempatan partisipasi masyarakat, biaya informasi rendah, penghematan waktu manajerial, dan kualitas keputusan yang lebih tinggi. Selain itu keuntungan utama dari pendekatan wilayah perencanaan adalah bahwa data dikumpulkan pada unit administrasi yang menjadikan dampak kebijakan lebih mudah untuk dievaluasi, dan struktur administrasi wilayah memudahkan implementasi kebijakan. Kerugiannya adalah kemungkinan tidak konsistennya antara batas administrasi wilayah dengan batas wilayah ekonomi.

Jika pengertian wilayah formal (homogen) dan wilayah fungsional (*polarized*) dihubungkan dengan perencanaan, dapat dikenal dua macam pendekatan dalam perencanaan wilayah (Jayadinata, 1992), yaitu :

1. Pendekatan Teritorial, untuk perencanaan suatu wilayah formal. Menurut Friedman dan Weaver, perencanaan suatu wilayah formal dengan pendekatan teritorial tersebut memperhitungkan mobilisasi terpadu dari semua sumber daya manusia dan sumber daya alam dari suatu wilayah tertentu yang terciptakan oleh perkembangan sejarahnya (karena sejarah adalah salah satu yang dapat mengikat anggota masyarakat suatu wilayah teritorial sehingga dapat terbentuk beberapa kelompok sosial seperti suku dan bangsa). Perencanaan semacam tersebut dapat disebut perencanaan wilayah teritorial atau perencanaan wilayah formal. Menurut Stohr strategi pengembangan dari bawah ke atas (*bottom up*) berlandaskan pada perencanaan wilayah formal tersebut.
2. Pendekatan Fungsional, yaitu suatu perencanaan wilayah yang menurut Friedman dan Weaver, memperhitungkan lokasi berbagai kegiatan ekonomi dan pengaturan secara

ruang dari sistem perkotaan mengenai berbagai pusat dan jaringan. Perencanaan ini dapat disebut sebagai perencanaan wilayah fungsional (kelompok social yang membentuknya khas fungsional-terikat oleh kepentingan, seperti misalnya kelas sosial, perserikatan dagang, dan sebagainya). Strategi pengembangan dari atas ke bawah (*top down*) menurut Stohr berlandaskan pada perencanaan wilayah fungsional tersebut.

Konsep mengenai wilayah yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa perencanaan wilayah adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan, bukan suatu tujuan itu sendiri. Wilayah dapat berbentuk formal atau fungsional berdasarkan kriteria tunggal atau kriteria jamak. Perkembangan dari perekonomian produksi primer yang terhubung secara vertikal ke perekonomian modern yang sifatnya dipengaruhi oleh tingkat-tingkat spesialisasi yang tinggi dan hubungan-hubungan horizontal cenderung untuk melanjutkan perkembangan ke arah suatu klasifikasi berdasarkan wilayah fungsional, terutama menggunakan kriteria ekonomi. Akan tetapi wilayah formal yang didefinisikan berdasarkan kriteria sosio-ekonomi juga sangat bermanfaat, walaupun wilayah formal fisik, apalagi wilayah alamiah semakin kurang begitu penting.

2.2.2 Pendekatan Perwilayahan Pembangunan

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan: Agar pembangunan Indonesia dapat berjalan serasi, perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional (Daldjoeni, 1997: 142). Indikasi ke arah penerapan strategi tersebut dapat dilihat dari adanya kebijaksanaan pengembangan wilayah yang dikenal dengan sebutan perwilayahan pembangunan. Menurut John Glasson (1977) perwilayahan pembangunan itu sendiri merupakan suatu bentuk regionalisasi dalam suatu proses penentuan batas-batas wilayah yang tergantung pada maksud, kriteria yang akan

digunakan, dan ketersediaan data. Oleh karena itu penetapan perwilayahan pembangunan sangat ditentukan maksud yang ingin dicapai serta metode-metode analisis yang akan digunakan dapat disesuaikan dengan kemampuan memperoleh data.

Perwilayahan pembangunan, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan Wawasan yang berlandaskan pada tingkat keterhubungan dalam kegiatan tertentu antarwilayah tersebut (Soegijoko dalam Warsilan, 1995). Dalam perwilayahan pembangunan tersebut ada pembagian wilayah ke dalam beberapa wilayah yang lebih kecil, yang masing-masing dengan pusat pertumbuhannya. Pada skala nasional dikenal dengan sebutan Wilayah Pembangunan Utama (WPU) yang menunjukkan intensitas tingkat perkembangan antar propinsi dengan kota dan kabupatennya. Setiap WPU mempunyai wilayah pengaruh, yaitu Wilayah Pembangunan (WP), dan setiap WP mempunyai Sub Wilayah Pembangunan (SWP), yang masing-masing memiliki pusat pertumbuhan sendiri.

Kebijakan perwilayahan pembangunan di Indonesia merupakan penerapan konsep wilayah perencanaan dengan pendekatan perencanaan fungsional. Perwilayahan pembangunan memanfaatkan hubungan fungsional antar pusat-pusat tersebut dengan daerah pengaruhnya dalam penentuan batas-batas wilayah pembangunan. Sedangkan penerapan kebijaksanaan ekonomi dilakukan di dalamnya dengan memanfaatkan potensi masing-masing wilayah, yang secara tidak langsung menggunakan konsep pembangunan tidak seimbang. Sektor-sektor unggulan tertentu lebih diarahkan untuk dikembangkan dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan peningkatan perekonomian wilayah. Dari keeratan hubungan fungsional yang terjadi di suatu wilayah pembangunan, diharapkan pemerataan hasil-hasil pembangunan akan lebih terjadi di seluruh bagian wilayah tersebut. Selain itu arahan kebijaksanaan pengembangan terhadap sektor-sektor tertentu di suatu

wilayah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian wilayah tersebut dengan keterbatasan kemampuan wilayah yang ada dalam rangka menuju terwujudnya hasil pembangunan yang optimal.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa konsep perwilayahan pembangunan dianggap mampu membantu mengatasi beberapa masalah pembangunan wilayah yang kurang berkembang, ketidakmerataan, dan keterbatasan sumber dana dalam usaha memacu laju pembangunan. Meskipun begitu penerapan konsep ini bukanlah satu-satunya cara melainkan hanya merupakan bagian dari usaha-usaha pembangunan yang harus dilakukan, karena pembangunan adalah suatu proses yang multidimensional yang meliputi berbagai aspek yang harus dikerjakan secara bersama-sama.

2.3 Studi Kasus Penerapan Strategi Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah

2.3.1 Penerapan Strategi Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah

Strategi pusat-pusat pertumbuhan telah diterima secara luas dan banyak diterapkan sebagai salah satu perangkat kebijakan dalam pengembangan wilayah, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang (Glasson, 1977, dalam Djalante, 1996: 40).

Inggris pertama kali menerapkan strategi ini digunakan pada tahun 1963 dalam perencanaan-perencanaan untuk North East England dan Central Scotland. Strategi ini kemudian digunakan pula di Northern Ireland dan Mid-Wales. Relevansinya tidak hanya terbatas pada daerah-daerah yang sedang mengalami kemunduran saja, pada tahun 1964 telah disarankan suatu kebijakan yang mengkonsentrasikan semua pertumbuhan industri dalam sejumlah pusat-pusat bagi daerah makmur South East. Selanjutnya telah diusulkan

penggunaannya untuk wilayah-wilayah North West, South Wales, Scottish Highland dan Eire.

Kebijakan pusat pertumbuhan juga telah diterapkan kompleks industri Bari-Taranto-Brandisi untuk daerah Mezzogiorno di Italia Selatan. Berikutnya pada kebijakan pusat pertumbuhan nasional (Metropoles d'equilibrium) di Perancis dan pengembangan pusat-pusat baru di Brazil dan Cuidad Guyana sebagai usaha untuk menciptakan pertumbuhan pada daerah-daerah yang terbelakang di Brazil dan Venezuela. Strategi ini juga telah diterima di Amerika Serikat, Rusia dan India untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kemunduran.

Jepang juga telah menerapkan strategi pusat-pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Tokyo, Tokohu, Hokaido, Chubu, Chu-Shi, Kinki dan Kyshu. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut ditunjang dengan mengkonsentrasikan penyediaan fasilitas umum seperti pelabuhan laut, lapangan terbang, pembangkit energi, telekomunikasi, lokasi industri dan lain-lain (Honjo, 1978, dalam Djalante, 1996: 41).

Dari beberapa studi kasus penerapan strategi tersebut diatas, ternyata dalam pelaksanaannya tidak semua negara menerapkan kebijakannya dengan membangun industri-industri propulsif untuk menciptakan suatu pusat pertumbuhan. Jepang cenderung memilih strategi berupa peningkatan penyediaan berbagai fasilitas pada beberapa lokasi atau kota-kota yang telah ada dan yang dipandang paling memberikan harapan untuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan.

Penerapan strategi pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia, diindikasikan dengan adanya kebijakan pembangunan melalui pendekatan wilayah yang telah dilakukan sejak Pelita II, yang dikenal dengan Perwilayahan Pembangunan. Pada prinsipnya perwilayahan

pembangunan merupakan upaya untuk merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien bagi kegiatan penduduk di wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Keberadaan satuan perwilayahan pembangunan di Indonesia merupakan prakondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan wilayah, yang mungkin saja semakin tidak seimbang jika tidak dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Arah penyempurnaan struktur perwilayahan pembangunan yang perlu dilakukan adalah menjadikan sejumlah satuan wilayah pembangunan kepada kondisi yang seimbang. Upaya penyempurnaan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara (SPPN, 1984, dalam Djalante, 1996: 43) yaitu:

- Restrukturisasi, yaitu menjadikan satuan wilayah pembangunan yang kuat menjadi satuan wilayah pembangunan yang lebih kecil.
- Penggabungan, yaitu menggabungkan satuan wilayah pembangunan yang relatif lemah kepada satuan wilayah pembangunan yang relatif kuat.
- Integrasi, yaitu pembentukan satuan wilayah pembangunan dari daerah-daerah yang terisolasi.
- Pembentukan baru, yaitu membentuk satuan-satuan wilayah pembangunan yang sama sekali baru.

Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dari penerapan strategi pusat-pusat pertumbuhan, pada kenyataannya bagi beberapa negara strategi ini tetap menarik untuk terus dikembangkan.

2.3.2 Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Penerapan Strategi Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah

Keberhasilan penerapan strategi pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan dan sasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

berkenaan dengan perumusan dan implementasinya (Mayer dan G. Freenwood, 1984). Hal yang paling mendasar dalam kaitan penerapan kebijakan pusat-pusat pertumbuhan sebagai pendekatan dari kebijakan perwilayahan pembangunan, adalah rumusan kebijakan dan penjabaran pelaksanaannya.

Pada dasarnya kebijakan perwilayahan pembangunan dimaksudkan untuk dapat berfungsi sebagai kebijakan pembangunan yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan sekaligus juga sebagai kebijakan pemulihan yang mampu mengatasi masalah ketimpangan dan kesenjangan. Sesuai dengan landasan teoritisnya maka dalam merumuskan strategi ini menggunakan strategi yang berupaya mengintegrasikan hirarki sistem kota-kota yaitu menerima rasionalitas struktur pusat-pusat yang ada dan berusaha mengembangkan pusat-pusat yang paling memberikan harapan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dari keseluruhan kebijakan perwilayahan pembangunan yang ada.

Dalam kaitan antara rumusan kebijakan dan penjabaran pelaksanaannya terdapat dua macam perencanaan yaitu perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Perencanaan indikatif, rumusannya mengemukakan petunjuk-petunjuk atau pedoman umum dan sifatnya hanya sebagai sumber memperoleh masukan. Sedang dalam perencanaan imperatif, rumusannya mengandung pengarahan-pengarahan yang bersifat konkrit (Glasson, 1977).

Menurut Mayer dan G. Freenwood (1984), perencanaan indikatif adalah perencanaan yang disusun untuk menghasilkan suatu kebijakan dalam bentuk petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman. Adapun perencanaan imperatif berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang berupa program dimana program ini merupakan urutan tindakan kegiatan yang berpedoman pada rumusan kebijakannya. Dengan demikian apabila

terdapat ketidak-selarasan antara rumusan kebijakan dengan penjabaran pelaksanaannya, maka tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Pusat-pusat pertumbuhan dalam bentuk nyatanya adalah berupa kota-kota, oleh karena perkotaan merupakan bentuk yang paling efisien dari organisasi tata ruang dalam mendistribusikan barang dan jasa serta berbagai inovasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem kota-kota merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi penerapan strategi perwilayahan pembangunan. Dalam kaitan tersebut perlu dilakukan pengkajian terhadap sistem kota-kota dalam suatu ruang wilayah.

Pengkajian sistem kota-kota dimaksudkan untuk melihat peranan dan keterkaitan kota-kota dalam mekanisme penjalaran perkembangan melalui sistem kota-kota yang tersusun hirarkis. Mekanisme penjalaran perkembangan tersebut dapat berlangsung sebagaimana diharapkan jika memenuhi berbagai persyaratan, antara lain yaitu adanya mekanisme yang baik antara kota-kota yang tergabung dalam sistemnya, adanya keterkaitan ketergantungan yang besar diantara aspek-aspek dari suatu kota dengan kota yang lain, setiap kota memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan sumber-sumber potensialnya, serta fungsi kota-kota yang tersusun secara hirarkis sepanjang proses pertumbuhannya, karena proses perkembangan wilayah akan berlangsung di dalam kerangka kesatuan sistem tata ruang yang terpadu (Miller, 1979).

Dalam penerapan strategi pusat-pusat pertumbuhan, prasarana transportasi selain akan berfungsi sebagai media berlangsungnya penjalaran (*spread effects*) juga berperan untuk melayani sekaligus membangkitkan kegiatan sosial ekonomi pada pusat-pusat permukiman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan prasarana transportasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah,

sehingga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi upaya pengembangan suatu wilayah.

2.4 Sintesa Kajian Sistem Perwilayahan Pembangunan

Terjadinya pemusatan kegiatan dengan intensitas yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu merupakan fenomena umum yang selalu dijumpai di dalam ruang wilayah. Oleh karena itu maka diperlukan penerapan strategi perwilayahan pembangunan dalam kebijakan pengembangan wilayah yang didukung dengan aspek legal yang sesuai. Agar penerapan strategi perwilayahan pembangunan ini dapat efektif, maka dalam perumusan kebijakan yang menentukan perwilayahan pembangunan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan harus didasarkan pada pemahaman dan pertimbangan yang mendalam tentang proses terjadinya perwilayahan tersebut.

Dalam teori kutub pertumbuhan, keterkaitan dan saling pengaruh antardaerah maju dan terbelakang dalam kegiatan ekonomi kedua wilayah yang bersifat komplemen dapat terjadi suatu efek menetes ke bawah (*trickling down effect*), yang justru akan merangsang daerah-daerah yang belum berkembang. Walaupun pada awalnya wilayah yang lebih maju akan berkembang lebih dahulu, selanjutnya dengan keuntungan dari kegiatan ekonomi di daerah maju, maka suatu saat daerah maju akan melakukan investasi di wilayah tidak berkembang, yang akan mendorong meningkatnya tingkat pendapatan. Hal tersebut pada akhirnya untuk jangka waktu tertentu daerah tidak berkembang tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan baru.

Penggunaan teori tempat pusat dalam perencanaan wilayah adalah suatu sistem pusat yang hirarkis dapat menghindari duplikasi dan pemborosan. Sistem hirarki adalah suatu cara yang relatif efisien untuk peng-administrasian dan peng-alokasian sumber daya di dalam suatu wilayah, serta memudahkan terwujudnya manfaat-manfaat sosial yang ditimbulkan oleh keuntungan-keuntungan skala.

Pembangunan wilayah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan dari daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah. Proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan dua arah, yaitu dari atas ke bawah berupa sasaran-sasaran makro dan sektoral serta kebijaksanaan pembangunan secara nasional. Dari bawah ke atas berupa aspirasi daerah yang merencanakan pengembangan potensi daerah serta menampilkan keadaan nyata di lapangan. Dengan demikian pendekatan kewilayahan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan, selanjutnya dengan pendekatan kewilayahan tersebut dapat diupayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan investasi dengan memanfaatkan keunggulan setiap wilayah serta mengembangkan produk-produk yang tepat untuk setiap wilayah tersebut.

Bahwa terjadinya ketimpangan antarwilayah merupakan salah satu masalah ekonomi wilayah, yang disebabkan oleh tidak homogenya suatu daerah dengan daerah lainnya yang mengakibatkan perbedaan kesempatan ekonomi daerah, sehingga pertumbuhan daerah satu dengan lainnya tidak sama. Tujuan mengejar pertumbuhan dan efisiensi cenderung menimbulkan persoalan ketidak merataan distribusi ruang, dengan demikian harus dicapai suatu keseimbangan, walaupun tujuan-tujuan efisiensi cenderung untuk menduduki posisi paling penting dalam pemikiran perencanaan secara nasional, sedang tujuan-tujuan pemerataan wilayah adalah prioritas bagi perencanaan wilayah.

Dari konsep-konsep mengenai wilayah menunjukkan bahwa: wilayah adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Bahwa penerapan strategi perwilayahan pembangunan merupakan salah satu upaya supaya pembangunan dapat berjalan secara serasi antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Konsep perwilayahan pembangunan dianggap mampu membantu mengatasi beberapa masalah

pembangunan wilayah yang kurang berkembang, ketidak merataan dan keterbatasan sumber dana dalam memacu laju pertumbuhan.

Strategi perwilayahan pembangunan memiliki arti penting dalam kebijakan pengembangan wilayah, baik di negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Di Indonesia strategi perwilayahan pembangunan telah diterapkan secara nasional sejak Pelita II dengan tujuan utama mewujudkan keseimbangan antardaerah, serta untuk memelihara efisiensi dalam rangka memperkokoh kesatuan ekonomi nasional.

Keberhasilan penerapan strategi perwilayahan pembangunan di dalam kebijakan pengembangan wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang meliputi:

- Rumusan dan penjabaran pelaksanaan dari kebijakan pengembangan wilayah yang dilakukan melalui strategi perwilayahan pembangunan.
- Hirarki sistem kota-kota dalam kedudukannya sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan kegiatan sosial dan ekonomi.
- Ketersediaan prasarana transportasi yang akan berperan sebagai media interaksi dalam proses penjalaran pertumbuhan dan perkembangan antar pusat-pusat pertumbuhan dan antar pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perwilayahan pembangunan sebagai salah satu masukan strategi dalam pengembangan wilayah, dianggap mampu membantu dalam upaya pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo secara lebih optimal. Walaupun demikian perwilayahan pembangunan ini bukanlah satu-satunya cara melainkan sebagai salah satu bagian atau upaya dari pembangunan wilayah yang harus dilakukan, karena pembangunan adalah suatu proses yang multidimensional yang meliputi berbagai aspek yang harus dikerjakan secara bersama-sama.

Selanjutnya berdasarkan kajian literatur tersebut diatas akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan variabel penelitian, seperti dapat dilihat pada Tabel II.1.

TABEL II.1
VARIABEL PENELITIAN PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN

No	Variabel	Sumber	Parameter
1	Karakteristik Fasilitas pelayanan	Glasson, 1977 : 148-149	Semakin tinggi jumlah dan kelengkapan fasilitas suatu pusat pelayanan, maka semakin besar batas ambang penduduk dan lingkup pelayanannya.
		Rondinelli, 1985 : 107	Jumlah dan kelengkapan fungsi pelayanan sosial dan ekonomi yang ada pada pusat-pusat pelayanan, mencirikan tingkat kemampuan pelayanan pusat-pusat pelayanan yang bersangkutan.
2	Karakteristik Penduduk, Bobot Sentralitas, dan Transportasi	Warpani, 1984 : 111	Massa suatu wilayah (pengelompokan penduduk; bobot sentralitas atau kemampuan pelayanan) mempunyai daya tarik, sehingga akan menciptakan hubungan saling pengaruh mempengaruhi antardaerah sebagai perwujudan kekuatan interaksi antardaerah. Ketersediaan prasarana transportasi mendorong terjadinya interaksi antarwilayah dan antar aktivitas, serta memiliki peran penting dalam memanfaatkan potensi yang ada serta dapat membuka peluang potensi-potensi baru.
		Daldjoeni, 1997 : 212-213	Massa suatu wilayah (pengelompokan penduduk; bobot sentralitas atau kemampuan pelayanan) menciptakan interaksi. Batas wilayah pengaruh suatu pusat pelayanan atau kota terhadap wilayah sekitarnya, ditentukan oleh lokasi titik hentinya. Interaksi dapat terjadi jika dipenuhi oleh unsur-unsur komplementaritas, transferabilitas, dan intervening opportunities.
3	Potensi fisik dasar, dan Potensi sosial ekonomi	Paelinck dan Nijkamp, 1978 : 207 Afifi, 1990 : 395	Identifikasi faktor-faktor tersamar yang menjelaskan pengamatan sifat dasarnya, menginterpretasikan karakteristik potensi perkembangan sosial ekonomi. Selanjutnya dapat dikelompokkan secara homogen menurut satuan-satuan wilayah yang ditinjau dari kriteria tertentu yang mempunyai nilai sama atau masih dalam batas nilai kelompok yang sama.
4	Karakteristik sektor perekonomian	Rondinelli, 1984 : 84	Peranan sektor yang semakin besar akan menunjukkan semakin tingginya potensi sektor tersebut dalam mengembangkan perekonomian wilayah, yang selanjutnya akan memperkuat perkembangan wilayah.

Sumber : Hasil analisis studi, 2004

BAB III

MASALAH PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO

Terbentuknya Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, merupakan perjuangan masyarakat Gorontalo untuk mengaktualisasikan jatidiri dan keinginan melaksanakan rumahtangganya sendiri, untuk dapat mewujudkan percepatan pembangunan di Gorontalo. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan landasan hukum penyelenggaraan desentralisasi kewenangan secara luas bagi daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan sesuai prakarsa, aspirasi masyarakat dan karakteristik daerah itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, terdapat 20 (dua puluh) bidang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, kecuali bidang pertahanan, moneter, agama dan peradilan. Hal tersebut merupakan peluang untuk dapat mengembangkan wilayah melalui potensi yang dimiliki dengan lebih optimal.

Untuk melakukan percepatan pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, dengan memperhatikan kewenangan tersebut diatas, diwujudkan melalui paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diimplementasikan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi otonomi daerah, di Provinsi Gorontalo telah diupayakan optimalisasi sumberdaya yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip pengembangan program prioritas dan kepentingan masyarakat. Pengoptimalan pemanfaatan potensi yang ada bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Gorontalo secara keseluruhan dengan tetap mengembangkan ketahanan sosial

budaya sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pemanfaatan sumberdaya daerah secara berkelanjutan.

Pemaparan tentang masalah pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo dilakukan dengan mengelompokkan dalam aspek fisik dasar, aspek sosial dan kependudukan, aspek ekonomi, kebijakan struktur ruang dan masalah pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo. dan Aspek fisik dasar meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan. Aspek sosial dan kependudukan dipaparkan beberapa parameter sosial, sedang uraian tentang aspek ekonomi meliputi PDRB dan struktur ekonomi.

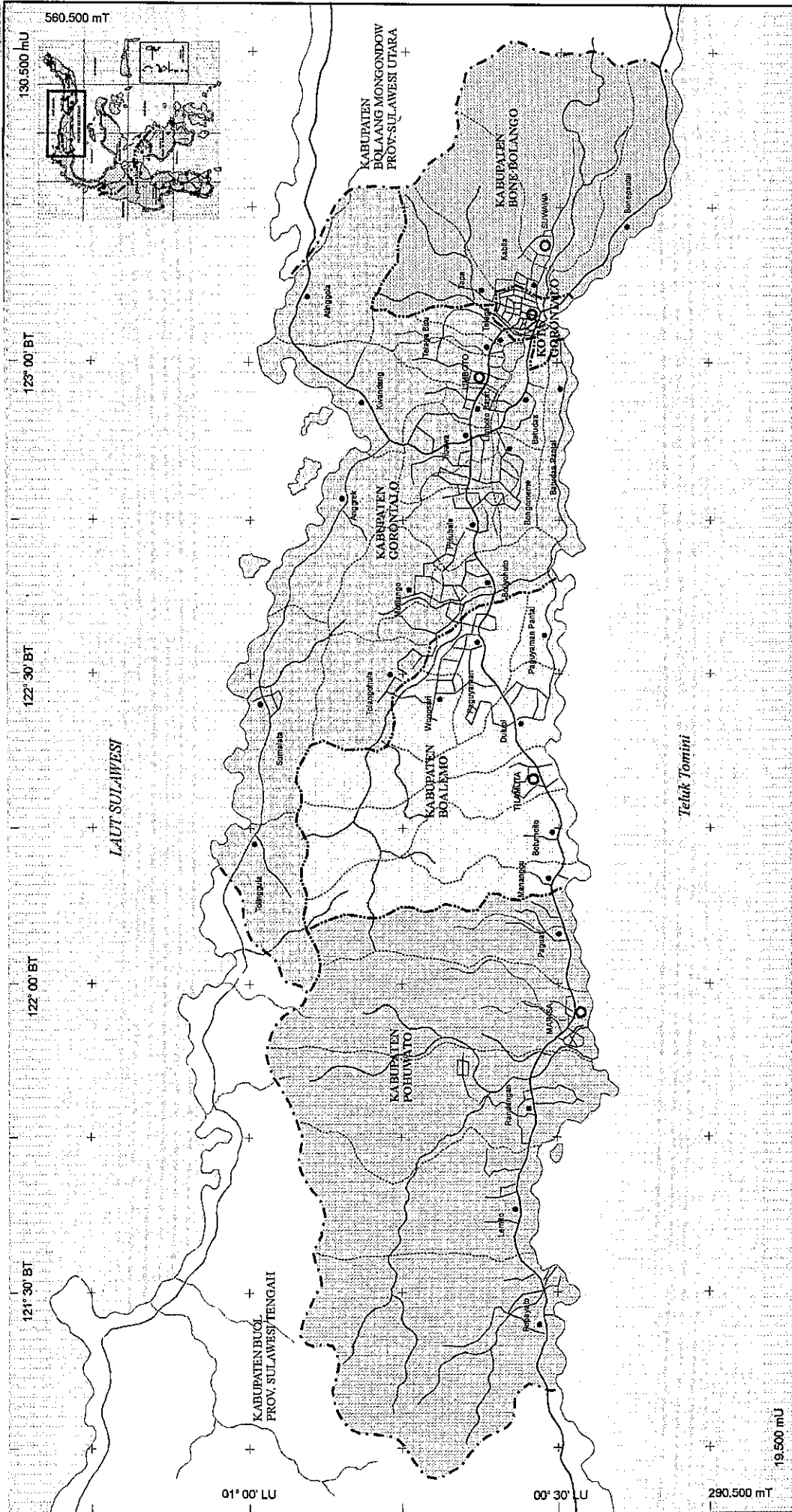
3.1 Fisik Dasar


Pembahasan tentang fisik dasar meliputi letak geografis, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Uraian tentang sumber daya alam meliputi : sumber daya lahan, sumber daya mineral, sumber daya air, sumber daya pantai dan lautan serta sumber daya pariwisata, sedang sumber daya buatan meliputi : transportasi dan aksesibilitas, utilitas, dan prasarana sosial budaya.

3.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Provinsi Gorontalo terletak pada posisi diantara 00°24'04'' – 01°01'30'' Lintang Utara (LU) dan 120°8'04'' – 123°32'09'' Bujur Timur (BT). Secara administratif, Provinsi Gorontalo berbatasan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dan Laut Sulawesi di sebelah utara; Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur; sebelah Selatan dengan Teluk Tomini; dan sebelah barat dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

Wilayah Provinsi Gorontalo terdiri 4 (empat) kabupaten (yaitu: Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango Boalemo, Pohuwato) dan 1 (satu) kota (Kota Gorontalo yang juga berperan sebagai ibukota provinsi), 32 kecamatan, 297 desa dan 79 kelurahan, dengan luas keseluruhan 12.215,45 km² (lihat Gambar 3.1 Peta Administrasi Provinsi Gorontalo).



	<p style="text-align: center;">MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN</p>	<p>50 km</p> <p>0 10 20 30</p>
<p>TESIS</p>	<p>PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO</p>	<p>UTARA</p> <p style="font-size: 2em;">3.1</p>
<p>PETA</p>	<p>BATAS ADMINISTRASI PROVINSI GORONTALO</p>	<p>HALAMAN</p> <p style="font-size: 2em;">65</p>
		<p>SUMBER</p> <p>BAPPEDA Provinsi Gorontalo</p>

LEGENDA

- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Jalan Negara
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Sungai / Anak Sungai
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
-
- Danau
 - Kota Gorontalo
 - Kabupaten Gorontalo
 - Kabupaten Boalemo
 - Kabupaten Pohuwato
 - Kabupaten Bone Bolango

3.1.2 Sumber Daya Alam

3.1.2.1 Sumberdaya Lahan

Dilihat dari klasifikasi tanah, di Provinsi Gorontalo ditemukan tanah yang diklasifikasikan sebagai *Alluvial*, *Grumusol*, *Andosol*, *Latosol*, *Pedsolik* dan *Litosol*. Berdasarkan sifat-sifatnya, tanah-tanah ini mempunyai kemampuan lahan (potensi pengembangan kawasan atau lahan budidaya dan factor penghambat) yang bervariasi dari rendah sampai tinggi. Tanah *Aluvial* yang terbentuk pada topografi datar memiliki potensi yang besar untuk dibudidayakan, walaupun disejumlah lokasi tertentu mempunyai hambatan yang serius dalam hal drainase permukaan. Tanah *Litosol* selain tidak layak untuk dibudidayakan karena dangkal dan berbatu juga sangat peka terhadap erosi dan proses degradasi. Tanah *Litosol* yang terdapat di Kabupaten Boalemo berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan petunjuk teknis dalam SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/1980, dikategorikan sangat peka erosi dan diperuntukkan hanya sebagai kawasan hutan lindung. Untuk tanah-tanah lainnya dinilai dapat dibudidayakan, tetapi dengan tetap memperhatikan pengendalian faktor-faktor pembatas masing-masing. Sedang di Kabupaten Gorontalo termasuk dalam ordo : *Alfisols* (dominan) *Inceptisols*, *Entisols*, *Vertisols* dan *Mollisols*. Kelas kemampuannya bervariasi dari kelas I sampai kelas VIII dengan faktor pembatas dominan berupa bahaya erosi dan di beberapa lokasi memiliki hambatan drainase. Dilihat berdasarkan pada kondisi tanah, sebagian besar tanah di wilayah Provinsi Gorontalo dapat dibudidayakan, kecuali yang diklasifikasikan sebagai *Litosol*, walaupun sebagian diantaranya memerlukan usaha pengelolaan yang spesifik.

Secara geologis, wilayah Provinsi Gorontalo terdiri dari : di wilayah Kota Gorontalo dibangun oleh endapan danau, batu gamping, *deorit bone*, dan batu gunung api. Berdasarkan peta geologi dari Direktorat Geologi, di Kota Gorontalo dijumpai batuan

gunung api berupa breksi gunung api, tufa dan lava yang mengandung batu apung berwarna kuning; batuan gamping koral berwarna putih, pejal pada perbukitan; batuan beku terobosan *Granodiorit*, dijumpai menerobos batuan gunung api maupun batu gamping terjal dan alluvium berupa Lumpur, pasir dan kerikil pada satuan morfologi daratan. Di wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango dibangun oleh batuan *granodiorite*, *phiolite*, *andesit*, *basaitalluvium*, *estuarine marine* dan *fandefosit*. Sementara di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato terdiri atas sedimen lepas, sedimen padu serta batuan beku malihan.

Dari keterangan dan ketinggian, Provinsi Gorontalo sebagian besar terdiri dari hamparan lahan dengan kemiringan lereng > 40% (yaitu seluas 67% dari seluruh areal provinsi); disusul dengan kemiringan lereng datar antara 0-2% (seluas 10,3%); dengan kemiringan lereng antara 15-40% (seluas 9,0%); dengan kemiringan lereng 2-8% (seluas 5,8%); dan dengan kemiringan lereng 8-15% (seluas 5,1%). Sebaran kelas kemiringan lereng di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel III.1.

TABEL III.1
SEBARAN KELAS KEMIRINGAN LERENG DI PROVINSI GORONTALO

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas							
		Kabupaten Boalemo + Pohuwato		Kabupaten Gorontalo + Bonebolango		Kota Gorontalo		Prov. Gorontalo	
		(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
A	0 – 2	66.924	10,5	53.232	9,6	3.440	54,7	123.596	10,3
B	2 – 8	38.432	6,1	30.724	5,5	0	0,0	69.156	5,8
C	8 – 15	32.982	5,2	28.590	5,2	0	0,0	61.572	5,1
D	15 – 40	57.378	9,0	50.356	9,1	203	3,3	107.937	9,0
E	> 40	439.415	69,2	391.341	70,6	2.643	42,0	833.399	69,7
JUMLAH		635131	100,0	554.243	100,0	6.286	100,0	1.195.660	100,0

Sumber : Buku Fakta dan Analisa RTRW Provinsi Gorontalo 2001-2015.

Wilayah Provinsi Gorontalo berada pada ketinggian bervariasi antara 0 sampai 2.000 meter dari permukaan laut. Wilayah Kota Gorontalo terletak pada elevasi yang paling rendah, yaitu dari 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango terdiri dari dataran dan pegunungan berada pada elevasi yang lebih bervariasi dari 0 sampai di atas 1.000 meter dari permukaan laut, dengan dominasi pada elevasi antara 0 – 500 meter. Kabupaten Boalemo dan Pohuwato merupakan wilayah dengan topografi datar sampai bergunung yang bervariasi antara 0 sampai di atas 2.000 meter di atas permukaan air laut, wilayah dengan elevasi di atas 2.000 meter hanya ditemukan di daerah perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dilihat dari klasifikasi iklim, di Provinsi Gorontalo secara rata-rata beriklim yang relatif kering. Wilayah terkering dengan rata-rata kurang dari 3 bulan per tahun dan curah hujan lebih dari 200 mm, meliputi seluruh kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bualemo dan sebagian Kota Gorontalo. Sementara wilayah yang relatif lebih basah dengan 5 sampai 6 bulan basah per tahun ditemukan disepanjang wilayah Utara Provinsi Gorontalo.

3.1.2.2 Sumberdaya Mineral

Potensi bahan galian mineral di Provinsi Gorontalo dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu bahan galian bernilai strategis dan potensi bahan galian bernilai industri. Dalam Provil Provinsi Gorontalo tahun 2001, potensi bahan galian mineral di Provinsi Gorontalo antara lain terdiri dari : Emas (dengan cadangan akhir 459.590,15 Kg), Tembaga (3.284,605 kg), Batu Gamping (800 juta ton), Toseki (6,5 juta ton), Batu Granit (5 juta ton), Batuan Granitis (22.242.975 ton), Sirtu (5 juta ton), Zeolit 5 juta ton), serta Lempung (750 juta M³).

3.1.2.3 Sumberdaya Air

Sumber daya air permukaan di Provinsi Gorontalo terdapat 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Randangan, DAS Paguyaman dan DAS Bone Bolango. Air dari ketiga DAS utama ini bermuara di Teluk Tomini. Diluar dari ketiga DAS utama tersebut, juga ditemukan banyak DAS-DAS kecil lainnya yang umumnya terdapat di hampir seluruh wilayah pegunungan di pinggir kawasan pantai. Air dari DAS-DAS kecil di bagian Selatan provinsi bermuara di Teluk Tomini dan di bagian Utara provinsi bermuara di Laut Sulawesi. Sungai-sungai kecil yang bermuara di selatan provinsi antara lain : S. Tamboo, S. Tombulilato, S. Sogisadaa, S. Taludaa, S. Sinabayuga, S. Potoila, S. Bobaa, S. Tumbihe, dan S. Tilamuta. Dua sungai kecil lainnya yaitu S. Taluhubungo dan S. Datula Dua, bermuara di Danau Limboto yang selanjutnya mengalirkan airnya ke Teluk Tomini. Sungai-sungai kecil tersebut berasal dari jajaran Pegunungan Tilong Kabila, Perantanan, Bone dan Loba serta jajaran gunung-gunung lain yang tingginya bervariasi dari 520 meter (G. Pobulu) sampai 2.065 meter (G. Boliohuto). Sedang usngai-sungai kecil yang bermuara di utara provinsi antara lain : S. Bulontio, S. Boliohuto, S. Sumalata, S. Dulakapa, S. Buluto, S. Buluoka, S. S. Monano, S. Tolongio, S. Ilangata, S. Kwandang dan S. Bubode.

3.1.2.4 Sumberdaya Pantai dan Lautan

Dilihat dari aspek sumber daya pantai dan lautan, Provinsi Gorontalo cukup besar yaitu letak Gorontalo berbatasan langsung dengan pantai/laut, di bagian Selatan (pajang pantai 320 km dengan luas perairan 7,400 km²) dan bagian Utara(panjang pantai 270 km dengan luas perairan 43,100 km²). Prasarana pendukung sektor perikanan pantai/laut yang tersedia antara lain adalah pangkalan pendaratan ikan (PPI) di Kwandang dan di Tenda, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tilamuta, Marisa, Popayato, Inengo, Bilato, Paguat,

Lemito, Atinggola, serta direncanakan dibangun Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di Tilamuta. Sedangkan potensi perikanan darat didukung oleh perairan Danau Limboto yang memiliki luas pemanfaatan lestari 3.000 Ha.

3.1.2.5 Sumberdaya Pariwisata

Sumber daya pariwisata yang ada di Provinsi Gorontalo berupa wisata alam yang meliputi pariwisata pulau dan pantai (antara lain: Pantai Karang Citra, Taman Laut Pulau Bitila, Pulau Asiangi, Pulau Lahe, Perkampungan suku Bajo, Teluk Paguyaman, Teluk Leago, Teluk Bubaa, Pulau Dulupi, Pulau Bitila, Pulau Napo Libuo, Pulau Limba, Pantai Pasir Putih, dan Taman Bahari Pulau Saronde). Pariwisata danau (antara lain meliputi: Danau Limboto dan Danau Perintis). Pariwisata gunung dan air terjun (Air Terjun Ayohulalo). Pariwisata hutan dan cagar alam (Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Cagar Alam Tangale dan Hutan suaka marga satwa Nantu). Selain wisata alam tersebut di Provinsi Gorontalo juga terdapat beberapa lokasi untuk wisata budaya (antara lain: Benteng Otanaha, Telapak Kaki Lahilote, Monumen Nani Wartabone, Rumah Adat Dulohupa, dan Benteng Orange).

3.1.3 Sumber Daya Buatan

3.1.3.1 Transportasi

Sarana transportasi di Provinsi Gorontalo terdiri atas transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Jalan trans Sulawesi merupakan jaringan jalan utama di Provinsi Gorontalo, yang menghubungkan pusat-pusat permukiman yang ada. Hampir tidak ada permukiman yang tidak terhubung ke jalan trans Sulawesi, kecuali yang merupakan kantong-kantong permukiman yang sangat kecil. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa jaringan transportasi jalan di Provinsi Gorontalo saat ini cukup memadai. Tingkat penggunaan jalan-jalan yang ada belum mencapai kapasitas

maksimum, seperti terlihat di Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi, lalu lintas harian rata-ratanya hanya 16 kendaraan/menit. Meskipun aksesibilitas keluar tidak menjadi masalah bagi sebagian besar penduduk, namun aksesibilitas ke daerah produksi masih belum memadai, terutama terjadi pada daerah-daerah pertanian (dalam arti luas).

Panjang jalan yang ada di Provinsi Gorontalo saat ini sepanjang 4.940,36 km. Dari jalan-jalan tersebut proporsi jalan nasional, provinsi dan kabupaten di Provinsi Gorontalo, masing-masing adalah : 10%, 37% dan 53%. Rasio panjang jalan dan luas wilayah masing adalah 0,4 di Kota Gorontalo, 0,5 di Kabupaten Gorontalo dan Bonebolango, serta 0,33 di Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Dengan tidak memperhatikan penyebaran permukiman yang ada, ketersediaan prasarana jalan di Provinsi Gorontalo masih cukup rendah, yaitu untuk setiap kilometer persegi hanya terdapat jalan sepanjang antara 0,3 s/d 0,4 km. Namun jika penyebaran permukiman ikut diperhatikan, maka fasilitas prasarana jalan yang ada cukup memadai. Panjang dan kondisi jalan di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel III.2.

Untuk transportasi laut, secara keseluruhan Provinsi Gorontalo memiliki beberapa pelabuhan laut, antara lain pelabuhan antar pulau dan pelabuhan-pelabuhan kecil yang dilayani oleh perahu-perahu motor tempel dan kapal-kapal motor yang hanya melayari pesisir pantai. Disamping itu terdapat satu pelabuhan penyeberangan yang dilayani kapal penyeberangan yang dioperasikan oleh Angkutan Sungai, Danau dan Pantai (ASDP), yang menghubungkan Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten Luwuk-Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah. Khusus untuk transportasi laut regional dan nasional, dilakukan melalui tiga pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Gorontalo, Kwandang dan Pelabuhan Angrek. Secara lebih rinci keadaan pelabuhan di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel III.3.

TABEL III.2
KLASIFIKASI, PANJANG DAN KONDISI JALAN
DI PROVINSI GORONTALO

Klasifikasi Jalan	Kondisi Jalan				Total
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
Kota Gorontalo					
• Jalan Nasional	3,25	11,15	-	-	14,40
• Jalan Provinsi	2,75	8,50	-	-	11,25
Jumlah	6,00	19,65	-	-	25,65
Kabupaten Gorontalo + Kabupaten Bonebolango					
• Jalan Nasional	242,25	-	63,00	-	305,25
• Jalan Provinsi	43,68	-	-	-	43,68
• Jalan Kabupaten	473,05	46,60	204,75	1.653,80	2.378,20
Jumlah	758,98	46,60	267,75	1.653,80	2.727,13
Kabupaten Boalemo + Kabupaten Pohuwato					
• Jalan Nasional	59,15	72,03	68,82	-	200,00
• Jalan Provinsi	225,48	659,90	780,03	100,17	1.765,58
• Jalan Kabupaten	113,00	47,57	35,20	26,23	222,00
Jumlah	397,65	779,50	884,05	126,40	2.187,58
PROVINSI GORONTALO					
• Jalan Nasional	304,65	83,18	131,82	-	519,65
• Jalan Provinsi	271,91	668,40	780,03	100,17	1.820,51
• Jalan Kabupaten	586,05	94,17	239,95	1.680,03	2.600,20
Jumlah	1.162,61	845,75	1.151,80	1.780,20	4.940,36

Sumber : BPS Kota Gorontalo dan BPS Kabupaten Gorontalo Tahun 2002

TABEL III.3
KEADAAN PELABUHAN LAUT DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002

Pelabuhan	Luas Dermaga (M2)	Kapasitas			
		Penumpang (Orang)		Barang (Kg)	
		Naik	Turun	Bongkar	Muat
GORONTALO	134	42.480	44.318	225.760.289	66.119.151
KWANDANG	37	11.518	13.509	2.321	12.415
ANGGREK	1.440	19.280	23.762	29.899	26.174

Sumber : BPS Kota Gorontalo dan BPS Kabupaten Gorontalo, Tahun 2002

Untuk prasarana transportasi udara telah lama ada di Provinsi Gorontalo yaitu Bandara Jalaluddin yang menghubungkan Gorontalo dengan wilayah-wilayah lain diluar Gorontalo, terutama melalui Bandara yang lebih besar seperti : Bandara Samratulangi di Manado, Bandara Mutiara di Palu serta Bandara Hasanuddin di Makassar. Saat ini penerbangan melalui Bandara Jalaluddin dilayani oleh beberapa maskapai penerbangan, antara lain Garuda, Merpati, Bouraq dan Pelita, selain itu Bandara Jalaluddin juga telah melayani penerbangan untuk Jemaah Haji.

3.1.3.2 Utilitas

Pelayanan listrik di Provinsi Gorontalo diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Kapasitas energi listrik yang tersedia di Provinsi Gorontalo, yang merupakan wilayah kerja PT.PLN (Persero) Wilayah VII Cabang Gorontalo, meliputi masing-masing : kapasitas terpasang 27.628 kW, kapasitas terpakai 16.280 kW, dengan jumlah pembangkit 13 PLTD yang lokasinya tersebar. Jika dihubungkan dengan lokasi permukiman yang ada, jaringan listrik untuk kebutuhan rumah tangga masih cukup memadai. Namun demikian jika melihat jumlah pelanggan dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Provinsi Gorontalo, terlihat masih banyak rumah tangga yang belum dapat menikmati pelayanan listrik dari PT. PLN.

Pelayanan telekomunikasi di Provinsi Gorontalo diselenggarakan oleh PT. Telekomunikasi (PT. Telkom) Cabang Gorontalo, yang hingga tahun 2002 telah memiliki 13.153 SST (satuan sambungan telepon). Penyebaran sambungan telepon di Provinsi Gorontalo tersebut masing-masing adalah : Di Kota Gorontalo sebanyak 9.561 SST, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango sebanyak 2.931 SST, serta Kabupaten Bualemo dan Pohuwato sebanyak 661 SST.

Untuk kebutuhan air minum di Provinsi Gorontalo, sebagian sudah disediakan oleh PDAM, selain itu penduduk juga memanfaatkan mata air, sumur, sungai dan penampungan air hujan sebagai sumber air minum, terutama untuk daerah-daerah yang belum dilayani oleh PDAM.

3.1.3.3 Prasarana Sosial Budaya

Sarana kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo mencakup Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu. Jumlah keseluruhan sarana kesehatan tersebut adalah 398 sarana, dengan rincian jumlah masing-masing adalah : 3 Rumah Sakit, 27 Puskesmas, 201 Puskesmas Pembantu, 40 Balai Pengobatan serta 127 PosYandu. Sedang penyebaran lokasi dan jumlah sarana kesehatan secara keseluruhan, adalah : di Kota Gorontalo sebanyak 167 sarana, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango sebanyak 161 sarana, Kabupaten Bualemo dan Pohuwato sebanyak 65 sarana.

Jumlah sarana pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo antara lain terdiri dari 4 (empat) perguruan tinggi (PT), 33 unit Sekolah Menengah Umum (SMU), 70 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 789 unit Sekolah Dasar (SD) serta 298 Taman Kanak-kanak (TK) yang tersebar di masing-masing kabupaten / kota.

Untuk fasilitas peribadatan yang ada di Provinsi Gorontalo didominasi oleh fasilitas peribadatan untuk agama Islam, mengingat 97,21% penduduk Provinsi Gorontalo adalah pemeluk agama Islam. Jumlah dan jenis sarana peribadatan yang ada di Provinsi Gorontalo tersebut, masing-masing adalah Masjid 1.406 buah, Gereja 113 buah, Pura 3 buah, Vihara 5 buah dan 1 buah. Pagoda. Lokasi dari masing-masing fasilitas peribadatan tersebut tersebar relatif merata di seluruh lokasi permukiman yang ada.

3.2 Sosial dan Kependudukan

3.2.1 Sosial

Angka harapan hidup mencerminkan lama hidup sekaligus sehat. Angka harapan hidup di Provinsi Gorontalo telah meningkat dari 50,1 tahun pada tahun 1991 menjadi 54,4 tahun pada tahun 2002. Hal yang sama juga terjadi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, yang rata-rata memiliki harapan hidup yang relatif sama dengan angka harapan hidup provinsi. Pada tahun 2002, Kota Gorontalo memiliki angka harapan hidup 57,5 tahun, Kabupaten Gorontalo dan Bonebolango 55,4 tahun serta Kabupaten Boalemo dan Pohuwato 50,20 tahun.

Angka melek huruf menunjukkan tingkat kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis. Angka ini dapat menjadi indicator kemampuan penduduk dalam menyerap informasi melalui berbagai media, khususnya media tulis. Pada tahun 1991 di Provinsi Gorontalo terdapat angka melek huruf pada usia 10 tahun keatas, sebesar 69,64 dan meningkat menjadi 84,8 pada tahun 2002.

Kota Gorontalo memiliki angka melek huruf tertinggi, yaitu sebesar 93,30 disusul berikutnya Kabupaten Gorontalo dan Bonebolango sebesar 90,70 dan Kabupaten Boalemo dan Pohuwato sebesar 70,40. Untuk angka pertumbuhan melek huruf tertinggi di Kabupaten Gorontalo dan Bonebolango, yaitu sebesar 18,10 % dan Kabupaten Boalemo dan Pohuwato sebesar 14,10 %, terakhir Kota Gorontalo sebesar 13,28 %.

3.2.2 Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan, karena penduduk selain sebagai subyek sekaligus juga menjadi obyek pembangunan. Aspek kependudukan di Provinsi Gorontalo akan dilihat berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk, serta komposisi penduduk

3.2.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo sebesar 838.745 jiwa, yang tersebar di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango sebesar 514.107 jiwa, Kabupaten Bualemo dan Pohuwato 189.793 jiwa dan di Kota Gorontalo sebesar 134.845 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Gorontalo selama periode 1991-2002 tercatat rata-rata 1,71 persen, angka ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional yaitu sekitar 1,87 persen dalam periode yang sama.

3.2.2.2 Kepadatan Penduduk

Dengan luas wilayah sebesar 12.215,10 km² kepadatan penduduk di Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah sebesar 69 jiwa / km². Sedang kepadatan penduduk di kabupaten dan kota masing-masing adalah : Kota Gorontalo 2.082 jiwa/km² ; Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango sebesar 95 jiwa / km² dan Kabupaten Boalemo dan Pohuwato hanya sebesar 29 jiwa / km². Secara rinci jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel III.4 dan Gambar 3.2.

3.3 Ekonomi

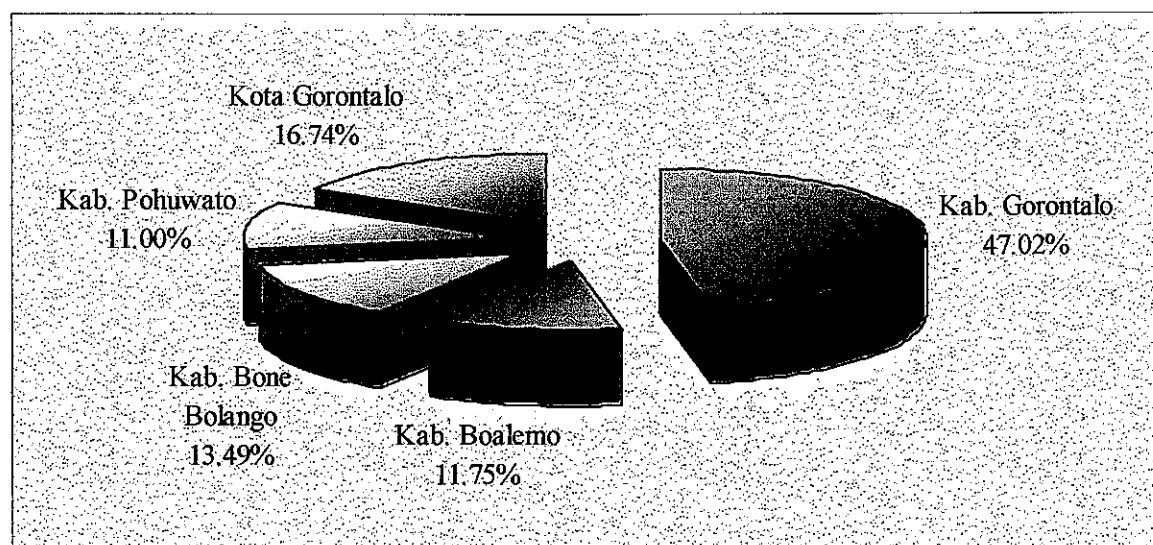
Beberapa parameter ekonomi yang biasa dipakai untuk menunjukkan gambaran awal wilayah dalam aspek ekonomi adalah angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta identifikasi sektor unggulan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu, tanpa memperhatikan kepemilikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan dalam dua bentuk, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Struktur perekonomian Provinsi Gorontalo bertumpu pada sektor pertanian, sektor jasa-jasa, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Struktur perekonomian seperti ini merupakan struktur yang umum ditemukan pada wilayah lain di Indonesia yang berbasis pertanian. Dalam periode tahun 1993 sampai dengan tahun 2002 PDRB Provinsi Gorontalo tumbuh rata-rata 10,97% per tahun. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor bangunan. Sedang yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata adalah sektor pertanian, jasa-jasa, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, (lihat Tabel III.5 dan Gambar 3.3).

TABEL III.4
NAMA WILAYAH, LUAS DAN JUMLAH PENDUDUK
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002

Nama Wilayah (Ibukota)	Luas (Km ²)	% x Luas Provinsi	Jumlah Kec.	Jumlah Desa	Jumlah Kel.	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kabupaten Gorontalo (Limboto)	3.408,98	27,91	17	158	29	379.472	87
Kabupaten Boalemo (Tilamuta)	2.517,36	20,61	7	46	-	94.824	38
Kabupaten Bone Bolango (Suwawa)	1.984,40	16,25	4	59	4	108.914	55
Kabupaten Pohuwato (Marisa)	4.244,31	34,75	5	49	-	88.796	21
Kota Gorontalo (Gorontalo)	64,79	0,53	5	-	46	135.074	2.084
PROVINSI GORONTALO	12.215,44	100,00	38	297	79	837.386	69

Sumber : Kota Gorontalo Dalam Angka, Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, Provinsi Gorontalo Dalam Angka, BPS Provinsi Gorontalo



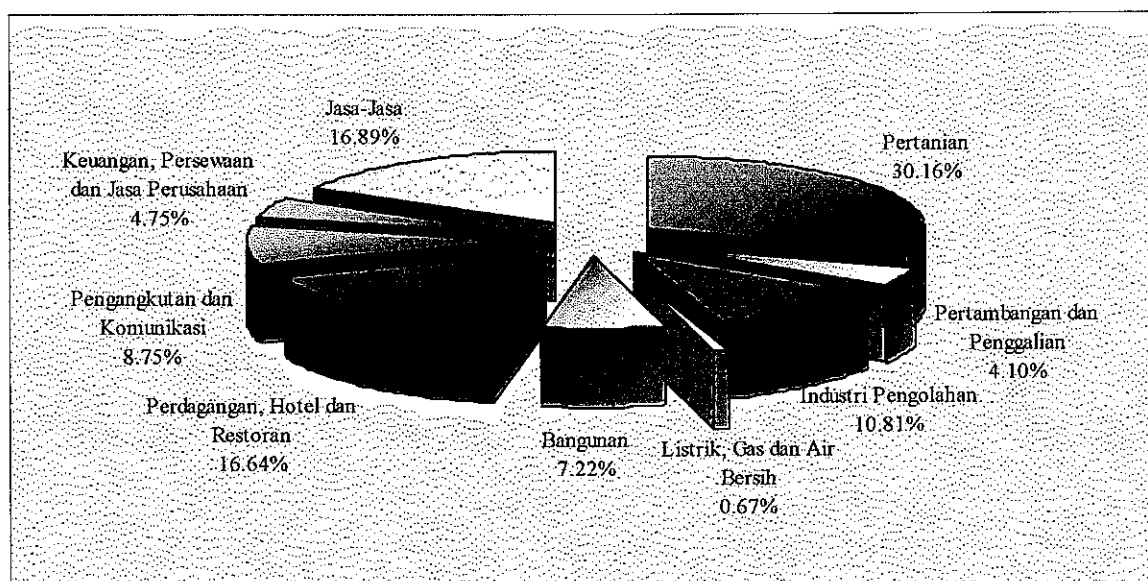
GAMBAR 3.3
PROPORSI JUMLAH PENDUDUK PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002

Sumber : Tabel III.4

TABEL III.5
PERTUMBUHAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 1993-2002

Sektor	PDRB (Juta Rp)		Proporsi (%)			Per Tumbuhan (%)
	1993	2002	Tahun 1993	Tahun 2002	Per- ubahan	
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian	143.945	277.062	32,46	30,16	-2,30	9,81
Pertambangan dan Penggalian	13.115	37.633	2,96	4,10	1,14	16,25
Industri Pengolahan	48.192	99.358	10,87	10,81	-0,05	10,89
Listrik, Gas dan Air Bersih	2.956	6.155	0,67	0,67	0,00	11,05
Bangunan	27.205	66.380	6,13	7,22	1,09	13,59
Perdagangan, Hotel dan Restoran	55.869	152.916	12,60	16,64	4,05	15,47
Pengangkutan dan Komunikasi	41.113	80.396	9,27	8,75	-0,52	10,05
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perush	26.946	43.681	6,08	4,75	-1,32	7,14
Jasa-Jasa	84.180	155.207	18,98	16,89	-2,09	9,13
	443.520	918.788	100,00	100,00		10,97

Sumber : Provinsi Gorontalo Dalam Angka, BPS Provinsi Gorontalo



GAMBAR 3.4
PROPORSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002

Sumber : Tabel III.5

3.4 Kebijakan Struktur Ruang Provinsi Gorontalo

Kebijakan struktur ruang Provinsi Gorontalo, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, dibedakan atas Wilayah Pembangunan Utama dan Satuan Wilayah Pembangunan. Wilayah Pembangunan Utama Provinsi Gorontalo merupakan wilayah pengembangan utama Gorontalo, yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dengan pusat pengembangan di Kota Gorontalo yang juga berperan sebagai ibukota provinsi, sedang Satuan Wilayah Pembangunan dibagi dalam 3 (SWP), yaitu :

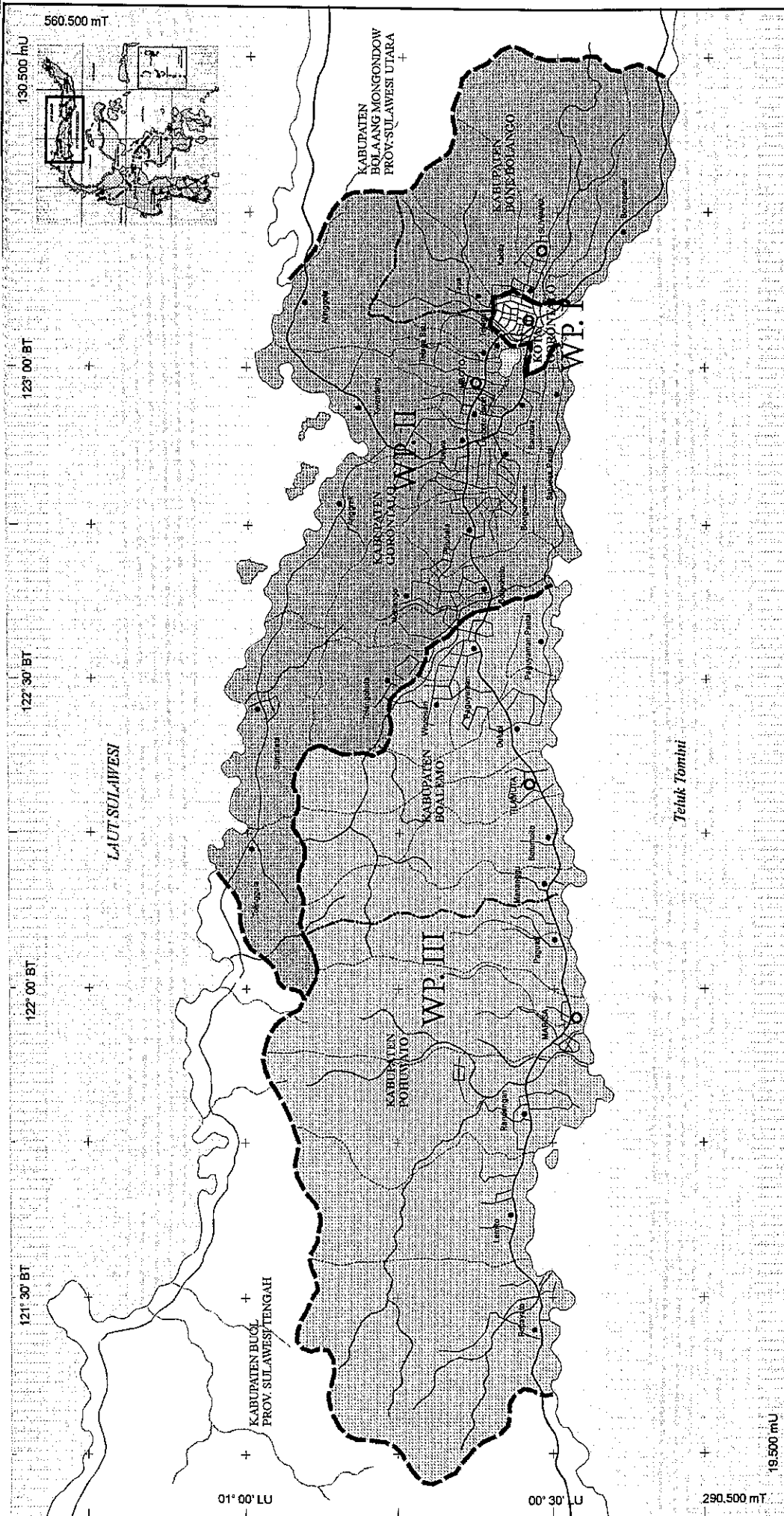
- SWP I, meliputi Kota Gorontalo dan sekitarnya, sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan utama terhadap Provinsi Gorontalo;
- SWP II, meliputi Kabupaten Gorontalo dan sekitarnya, dengan pusat di Limboto;
- SWP III, meliputi Kabupaten Boalemo dan sekitarnya dengan pusat di Tilamuta.

Untuk lebih jelasnya deliniasi kawasan masing-masing satuan wilayah pembangunan, dapat dilihat pada Tabel III.6. dan Gambar 3.5. Peta Wilayah Pembangunan Gorontalo.

TABEL III.6
DELINIASI SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN
PROVINSI GORONTALO

No	SWP	Wilayah Pengembangan	Pusat Pelayanan
1	2	3	4
I	SWP I Kota Gorontalo	1. Kec. Kota Utara 2. Kec. Kota Barat 3. Kec. Kota Selatan 4. Kec. Kota Timur 5. Kec. Duingingi	Kota Gorontalo
II	SWP II Kabupaten Gorontalo	6. Kec. Limboto 7. Kec. Limboto Barat 8. Kec. Tibawa 9. Kec. Pulubala 10. Kec. Boliyohuto 11. Kec. Mootilango 12. Kec. Tolangohula 13. Kec. Kwandang 14. Kec. Batudaa Pantai 15. Kec. Batudaa 16. Kec. Bongomeme 17. Kec. Boliyohuto 18. Kec. Sumalata 19. Kec. Tolinggula 20. Kec. Telaga 21. Kec. Telaga Biru 22. Kec. Atinggola 23. Kec. Tapa 24. Kec. Kabila 25. Kec. Suwawa 26. Kec. Bonepantai	Kota Limboto
III	SWP III Kabupaten Boalemo	27. Kec. Popayato 28. Kec. Lemito 29. Kec. Randangan 30. Kec. Marisa 31. Kec. Paguat 32. Kec. Mananggu 33. Kec. Botumoito 34. Kec. Tilamuta 35. Kec. Dulupi 36. Kec. Paguyaman 37. Kec. Paguyamanan Pantai 38. Kec. Wonosari	Kota Tilamuta

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo, tahun 1002-2015.



UTARA	NO. PETA	HALAMAN
	3.5	82
SUMBER		
RTRW Provinsi Gorontalo 2001-2015, BAPPEDA Provinsi Gorontalo		

	Batas Provinsi
	Batas Kabupaten
	Batas Kecamatan
	Jalan Negara
	Jalan Provinsi
	Jalan Kabupaten
	Sungai / Anak Sungai
	Ibukota Kabupaten
	Ibukota Kecamatan
	Danau
	Wilayah Pembangunan (WP) I
	Wilayah Pembangunan (WP) II
	Wilayah Pembangunan (WP) III
	Batas Wilayah Pembangunan (WP)

 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	TESIS
	PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO
	PETA SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN PROVINSI GORONTALO (EKSTING)

3.5 Masalah Pengembangan Wilayah Provinsi Gorontalo

Arah kebijakan pengembangan wilayah ditentukan menurut prinsip umum dari proses pengembangan wilayah, yaitu suatu sistem ruang wilayah yang mampu mewujudkan interdependensi antar pusat pelayanan dan antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya. Suatu sistem wilayah senantiasa dihadapkan pada faktor-faktor fisik, sosial dan ekonomi sebagai faktor-faktor variabel dinamis yang mempunyai hubungan timbal balik. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dan merupakan faktor-faktor pokok dalam proses pengembangan wilayah yang akan menunjukkan adanya interaksi dari berbagai kegiatan yang terjadi.

Dengan faktor-faktor tersebut diatas maka dapat ditentukan hubungan fungsional antara kota sebagai suatu tempat pemusatan dengan daerah belakangnya ataupun diantara kota-kota itu sendiri dan kemudian disusun dalam struktur ruang wilayah yang dapat mendukung proses perkembangan lebih lanjut. Strukturisasi menurut strategi pusat-pusat pertumbuhan menghendaki adanya pusat-pusat pertumbuhan dalam kerangka sistem wilayah dengan penekanan pada usaha penjalaran perkembangan dari pusat-pusat pertumbuhan secara hirarkis.

Dari identifikasi karakteristik wilayah Provinsi Gorontalo, secara fisik-geografis Provinsi Gorontalo berada pada posisi yang strategis, karena kawasan pantainya yang terletak disebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi yang merupakan jalur perhubungan laut yang cukup vital dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini yang merupakan potensi perikanan laut.

Pola-pola permukiman di wilayah Provinsi Gorontalo cenderung membentuk pola linier mengikuti arah jaringan transportasi utama yang menghubungkan pusat-pusat permukiman. Kota Gorontalo yang berkedudukan sebagai ibukota Provinsi Gorontalo,

bersama empat kota yang berkedudukan sebagai ibukota kabupaten yaitu Limboto, Tilamuta, Marisa dan Suwawa. Kota-kota tersebut, selain Suwawa terletak di sepanjang jalur transportasi utama di wilayah Provinsi Gorontalo. Jalur transportasi tersebut merupakan jalur transportasi yang menghubungkan kota Manado ibukota Sulawesi Utara dan Kota Palu ibukota Sulawesi Tengah, sehingga menjadi jalur perekonomian yang vital dalam skala kabupaten maupun provinsi. Adapun Suwawa terletak pada jalur transportasi internal provinsi, sehingga relatif agak terisolasi.

Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumberdaya alam, dimana sebagian besar kekayaan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo relatif masih sedikit dibandingkan wilayah lain, namun dari sisi kepadatannya masih terkonsentrasi di Kota Gorontalo yang berperan sebagai pusat wilayah dan tempat kedudukan ibukota provinsi. Penyebaran penduduk yang tidak merata tersebut, menyebabkan tidak meratanya distribusi hasil pembangunan bagi penduduk di daerah yang relatif terisolir. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah di Provinsi Gorontalo.

Terbatasnya ketersediaan prasarana transportasi di Provinsi Gorontalo merupakan salah satu kendala utama bagi usaha membuka isolasi daerah-daerah memiliki potensi sumberdaya alam. Demikian pula dengan keadaan fisik alam yang sebagian besar berupa daerah pegunungan dan merupakan wilayah konservasi, merupakan salah satu kendala dalam pengembangan wilayah.

BAB IV

ANALISIS PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DI PROVINSI GORONTALO

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji perwilayahan pembangunan pada studi ini adalah pendekatan perwilayahan secara fungsional dan perwilayahan secara homogen. Dalam hal ini merupakan analisis terhadap karakteristik-karakteristik yang meliputi kriteria fisik dan sosial ekonomi di wilayah studi. Karakteristik tersebut meliputi kaitan-kaitan fungsional antar pusat yang terjadi dan potensi-potensi perkembangannya.

4.1 Analisis Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan dan Wilayah Pengaruh

Analisis hirarki pusat pelayanan dan wilayah pengaruh dalam studi ini menggunakan pendekatan perwilayahan fungsional. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pusat utama dan batasan wilayah pengaruhnya, dilakukan melalui metode regionalisasi yang menggunakan pendekatan berdasarkan keeratan hubungan fungsional antar pusat-pusat pelayanan maupun antar bagian wilayah di Propinsi Gorontalo.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam setiap tahapan analisisnya adalah sebagai berikut :

- Pendekatan yang digunakan dalam penilaian hirarki pusat pelayanan adalah berdasarkan kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pusat pelayanan. Semakin lengkap jenis fasilitas yang dimiliki oleh suatu pusat pelayanan maka akan menunjukkan hirarki yang semakin tinggi.
- Pendekatan yang digunakan dalam penentuan pusat-pusat utama yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai pusat wilayah pembangunan adalah berdasarkan hasil penilaian

hirarki pusat pelayanan disertai dengan pertimbangan terhadap hirarki wilayah secara fungsional dari wilayah pembangunan terhadap wilayah provinsi, yaitu bahwa wilayah pembangunan secara fungsional berada satu tingkat dibawah propinsi. Oleh karena itu pusat-pusat pelayanan yang layak dijadikan sebagai pusat wilayah pembangunan adalah yang memiliki orde minimal setingkat dibawah pusat propinsi, yaitu yang mempunyai orde I dan II.

Batas-batas atau cakupan wilayah pembangunan akan ditentukan dengan menggunakan pendekatan terhadap nilai interaksi antar suatu pusat pelayanan dengan pusat utama yang dijadikan sebagai pusat wilayah pembangunan. Nilai interaksi terbesar dari suatu pusat pelayanan terhadap salah satu pusat wilayah pembangunan menunjukkan suatu pusat pelayanan memiliki hubungan fungsional yang lebih erat atau lebih dipengaruhi oleh pusat wilayah pembangunan tersebut dari pada terhadap pusat wilayah pembangunan lainnya, sehingga wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah pengaruhnya.

Metoda yang digunakan untuk melakukan perwilayahan dengan pendekatan secara fungsional dalam studi ini terdiri dari dua bagian. Metoda analisis skalogram Guttman dan indeks sentralitas Marshall untuk melihat hirarki dan kemampuan pelayanan. Sedang untuk mengidentifikasi wilayah pelayanan menggunakan metoda analisis Titik Henti dan analisis Gravitasi.

4.1.1 Penilaian Kemampuan Pelayanan dan Hirarki Pusat Pelayanan

Dalam studi ini, kemampuan pelayanan akan dinilai berdasarkan fasilitas pelayanannya. Ukuran fasilitas ini dipilih karena bersifat hirarkis dan terbentuk berdasarkan batas ambang dan lingkup pelayanan. Suatu fasilitas dapat terselenggara jika penduduk pendukungnya telah mencapai batas ambang dengan lingkup pelayanan tertentu (Glasson, 1977:148-149). Semakin tinggi jumlah dan kelengkapan fasilitas suatu pusat

pelayanan maka semakin besar batas ambang penduduk dan lingkup pelayanannya. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah dan kelengkapan fasilitas suatu pusat pelayanan maka akan semakin tinggi kemampuan pelayanannya.

Penilaian kemampuan pelayanan dan hirarki pusat-pusat pelayanan akan dilakukan dengan dua metoda yaitu metoda skalogram Guttman yang lebih menitik beratkan pada keberadaan fasilitas dan metoda indeks sentralitas Marshall yang menitik beratkan pada jumlah fasilitas. Adapun penggunaan kedua metoda tersebut dengan pertimbangan :

- Baik metoda skalogram Guttman maupun indeks sentralitas Marshall dapat menjelaskan urutan kemampuan pusat pelayanan berdasarkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh pusat-pusat pelayanan yang bersangkutan.
- Bahwa ukuran fasilitas yang dinilai adalah jumlah dan kelengkapannya. Dalam hal ini metoda skalogram Guttman lebih menitik beratkan pada tinjauan kelengkapan atau jenis fasilitas yang dimiliki, sedang metoda indeks sentralitas Marshall lebih menekankan pada jumlah unit fasilitas. Dengan demikian kedua metoda tersebut dapat menjelaskan secara lengkap ukuran-ukuran fasilitasnya.
- Guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka kedua metoda tersebut digabungkan, sehingga diharapkan akan diperoleh hasil yang saling memperkuat dan melengkapi.

Berikut ini akan dibahas proses analisis berdasarkan kedua metoda tersebut, dan pada bagian akhir akan dirangkum kembali yang disesuaikan dengan maksud-maksud pembahasan selanjutnya dalam studi ini.

4.1.1.1 Penilaian Kemampuan Pelayanan

A. Penilaian Kemampuan Pelayanan berdasarkan Skalogram Guttman

Seperti telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, bahwa tujuan dari metoda analisis skalogram Guttman ini pada dasarnya untuk memberi gambaran adanya pengelompokan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan berdasarkan kelengkapan fungsi pelayannya. Ukuran fasilitas yang dinilai adalah jumlah dan kelengkapannya. Jumlah menyatakan banyaknya satuan fasilitas dan kelengkapan menyatakan jenis-jenis fasilitas yang ada. Fasilitas yang digunakan dalam penilaian ini adalah fasilitas yang mencirikan fungsi pelayanan sosial dan ekonomi, objeknya tunggal dan terukur, serta diusahakan memiliki karakteristik hirarkis atau berjenjang (Rondinelli, 1985 : 107). Dengan pertimbangan karakteristik wilayah dan keterbatasan data di wilayah studi maka jenis fasilitas yang digunakan berjumlah 24 jenis (lihat Lampiran A)

Dengan demikian analisis ini akan mengidentifikasi hirarki pusat-pusat pelayanan / kota-kota yang terdapat di Provinsi Gorontalo, dengan cara mengamati kelengkapan fungsi dan aktifitas yang diwakili oleh keragaman jenis fasilitas yang terdapat pada masing-masing pusat pelayanan. Melalui hasil dari identifikasi tersebut akan diketahui kota-kota yang layak dijadikan sebagai pusat wilayah pembangunan.

Hasil perhitungan analisis dengan metoda skalogram Guttman, di Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya 14 kelompok. Kelompok I merupakan kelompok dengan kemampuan pelayanan paling tinggi, dan memiliki keseluruhan jenis fasilitas. Kelompok I ini hanya terdiri dari satu pusat saja yaitu Kota Gorontalo. Hal tersebut dapat dipahami karena Kota Gorontalo merupakan kota yang berfungsi sebagai ibukota provinsi. Kelompok II merupakan pusat pelayanan dengan urutan kemampuan pelayanan berada pada urutan kedua setelah pusat kelompok I. Dengan demikian kelompok ini yang paling berpotensi untuk berperan sebagai pusat pelayanan kedua dalam studi ini. Kelompok II memiliki fungsi pelayanan sampai tingkat rumah sakit dan perguruan tinggi, dengan

persentase kelengkapan sebesar 83,33 %. Sedang Kelompok III memiliki fungsi pelayanan sampai tingkat terminal, dengan persentase kelengkapan sebesar 75,00 %. Kelompok yang paling kecil persentasenya adalah kelompok XIV, yaitu hanya memiliki fungsi pelayanan sampai tingkat toko, sekolah dasar (SD), Puskesmas Pembantu, Perawat, Fasilitas Listrik, dan Taman Kanak-kanak (TK), dengan persentase kelengkapan sebesar 25%.

Tabel skalogram pusat-pusat pelayanan berdasarkan metoda Guttman dapat dilihat pada Tabel IV.1 dan kelompok pusat pelayanan berdasarkan kemampuan pelayanan pada Tabel IV.2. Adapun pengerjaan dengan Skalogram Guttman dapat dilihat pada lampiran A.

B. Penilaian Kemampuan Pelayanan berdasarkan Indeks Sentralitas Marshall

Metoda indeks Sentralitas Marshall pada dasarnya juga bertujuan untuk menilai jumlah unit setiap jenis fasilitas pada suatu pusat pelayanan dibandingkan terhadap pusat pelayanan lainnya. Nilai yang dihasilkan adalah nilai keterpusatan fasilitas. Nilai keterpusatan tersebut merupakan indikator yang dapat menunjukkan kemampuan pelayanan suatu pusat pelayanan, sehingga semakin tinggi nilai keterpusatan suatu fasilitas maka semakin tinggi kemampuan pelayanannya.

Perhitungan untuk menghasilkan keterpusatan suatu pusat pelayanan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyusun tabel urutan pusat-pusat pelayanan berdasarkan kelengkapan fasilitas yang dimiliki seperti pada tabel skalogram.
- Mengalikan nilai sentralitas fasilitas dengan jumlah unit yang dimiliki pusat pelayanan tersebut.
- Menjumlahkan hasil perkalian tersebut, yang merupakan harga nilai keterpusatan atau sentralitas pusat pelayanan.

TABEL IV.2
PENGELOMPOKAN PUSAT-PUSAT PELAYANAN
BERDASARKAN METODA SKALOGRAM GUTTMAN

No	Pusat Pelayanan	Kelompok	Kelengkapan Fasilitas		
			Jumlah	(%)	Jenis
1	2	3	4	5	6
1	GORONTALO	I	24	100,00	Pasar Regional, Akademi, Hotel, Stadion
2	LIMBOTO	II	20	83,33	Rumah Sakit, Perguruan Tinggi
3	MARISA	III	18	75,00	Terminal
4	TILAMUTA				
5	TELAGA	IV	17	70,83	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
6	TIBAWA				
7	KWANDANG	V	16	66,67	Apotik
8	BOLIOHUTO				
9	TAPA	VI	15	62,50	Bank Umum
10	PAGUAT				
11	BATUDAA				
12	ATINGGOLA	VII	14	58,33	Kantor Pos
13	KABILA				
14	SUWAWA				
15	WONOSARI				
16	SUMALATA				
17	PAGUYAMAN				
18	LEMITO				
19	RANDANGAN	VIII	13	54,17	Sekolah Menengah Umum (SMU)
20	BONGOMEME				
21	POPAYATO				
22	BATUDAA PANTAI	IX	12	50,00	Fasilitas Telepon
23	BONE PANTAI				
24	LIMBOTO BARAT				
25	TELAGA BIRU				
26	MANANGGU				
27	ANGGREK	X	11	45,83	Pasar Desa
28	BOTUMOITO				
29	TOLANGOHULA				
30	PULUBALA	XI	10	41,67	Dokter
31	DULUPI				
32	TOLINGGULA	XII	9	37,50	KUD, Puskesmas
33	MOOTILANGO	XIII	7	29,17	Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)
34	PAGUYAMAN PANTAI	XIV	6	25,00	Toko, Sekolah Dasar (SD), Puskesmas Pembantu, Perawat, Fasilitas Listrik, Taman Kanak-kanak.

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (Lampiran A)

Kriteria fasilitas yang akan ditinjau dalam metoda Indeks Sentralitas Marshal, sama dengan kriteria yang digunakan dalam Skalogram, demikian pula variabel yang dianalisis, menggunakan matriks dasar yang telah disusun dalam Skalogram Guttman.

Interpretasi dilakukan dengan anggapan bahwa semakin tinggi nilai sentralitas suatu pusat pelayanan maka akan semakin tinggi urutan kemampuannya (ESCAP, 1979 : 112 dalam Simamora, 1987 : 68). Hasil perhitungan analisis indeks sentralitas Marshall menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki nilai sentralitas tertinggi yaitu sebesar 3.031,37. Nilai sentralitas tersebut sangat jauh berbeda dengan nilai sentralitas pada urutan kedua, yaitu hanya 233,83. Keadaan ini dapat menjelaskan bahwa distribusi fasilitas lebih terkonsentrasi di Kota Gorontalo yang juga berfungsi sebagai ibukota provinsi. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pusat-pusat pelayanan di Provinsi Gorontalo belum terbentuk secara hirarkis dan kedudukan Kota Gorontalo terlihat sangat dominan. Dalam kaitan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pelayanan yang layak sebagai pusat perwilayahan pembangunan, maka pusat-pusat pelayanan yang paling berpotensi adalah yang memiliki nilai sentralitas yang tinggi.

Jika kedua hasil metoda skalogram Guttman dan metoda indeks sentralitas Marshall diperbandingkan, seperti terlihat pada Tabel IV.1 dan Tabel IV.3 maka terlihat bahwa urutan kemampuan pusat-pusat pelayanan berdasarkan kedua metoda tersebut relatif sama. Perbedaan yang terjadi hanya pada pusat-pusat pelayanan kelompok bawah. Dengan pertimbangan bahwa tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi pusat-pusat pelayanan yang berpotensi menjadi pusat-pusat perwilayahan pembangunan, maka hasil kedua metoda tersebut dapat digunakan bersama untuk menyusun tingkatan pusat-pusat pelayanan. Metoda skalogram melihat fakta ketersediaan fasilitas yang digunakan untuk menghitung bobot masing-masing jenis fasilitas, dan metoda indeks sentralitas untuk melihat kemampuan pelayanan yang lebih riil, ditunjukkan dengan bobot sentralitasnya.

TABEL IV.3
PENILAIAN KEMAMPUAN PELAYANAN DENGAN INDEKS SENTRALITAS MARSHALL

No	NAMA WILAYAH	Jumlah Penduduk	NILAI SENTRALITAS FASILITAS																																		JMLH
			TOKO	SD	PUSKES PERA	FAS. PEMB. WAT	LISTRIK	FAS. TK	SLTP	KUD	PUS KES TER	DOK PASAR	FAS. TER	DESA	TELP	POS	KTR UNUM	BANK	APOTIK	BPR	TER	MINSAL	RS	PT PASAR	AKA-	HOTEL	GOR/	SENTRA	RRKO	KEL							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
1	0100 GORONTALO	134581	32.94	4.32	1.15	3.03	2311.06	1.79	0.72	1.31	0.20	1.30	0.17	652.5	0.67	0.07	0.69	0.50	0.14	0.33	1.50	1.50	1.50	0.50	2.00	12.00	1.00	3031.37	0	I							
2	1800 LIMBOTO	36054	8.82	0.94	0.35	0.50	156.56	0.73	0.19	0.69	0.00	0.33	0.10	61.35	0.33	0.07	0.31	0.25	0.14	0.17	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	233.83	2	II							
3	3700 MARISA	35071	7.41	0.79	0.18	0.32	96.24	0.24	0.13	0.03	0.03	0.10	0.13	8.91	0.14	0.07	0.23	0.08	0.14	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.35	0	II							
4	2700 TILAMUTA	20626	5.85	0.50	0.09	0.38	91.85	0.18	0.09	0.28	0.03	0.10	0.10	6.96	0.14	0.07	0.08	0.08	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.91	0	II							
5	2000 TELAGA	36686	11.24	0.88	0.32	0.53	83.18	0.70	0.06	0.41	0.10	0.27	0.13	10.10	0.70	0.05	0.00	0.08	0.29	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97	2	III							
6	0900 TIBAWA	32008	6.00	0.94	0.09	0.26	43.68	0.27	0.13	0.19	0.07	0.07	0.03	4.26	0.10	0.07	0.15	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.47	2	III							
7	1600 KWANDANG	32283	7.53	0.91	0.21	0.15	68.79	0.30	0.13	0.03	0.03	0.33	0.17	16.13	0.05	0.07	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.15	0	II							
8	1100 BOLJOHUTO	22180	3.88	0.65	0.15	0.09	50.59	0.15	0.13	0.22	0.03	0.03	0.03	0.07	0.04	0.10	0.00	0.08	0.08	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.44	2	III							
9	2300 TAPA	25484	4.56	0.91	0.24	0.24	42.68	0.52	0.06	0.16	0.16	0.13	0.03	0.07	1.78	0.14	0.07	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.44	2	III							
10	3800 BATUDAA	26246	4.74	0.76	0.03	0.62	45.68	0.55	0.09	0.19	0.03	0.07	0.07	1.78	0.14	0.07	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.95	2	III							
11	0700 BATUDAA	16087	3.44	0.71	0.18	0.29	31.38	0.21	0.13	0.28	0.03	0.03	0.03	0.07	0.10	0.10	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.02	2	IV							
12	2200 ATINGGOLA	35077	7.62	1.00	0.26	0.74	65.94	0.48	0.22	0.16	0.03	0.07	0.10	19.13	0.10	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.92	2	III							
13	2400 KAHILA	21547	5.65	0.71	0.15	0.35	37.56	0.55	0.13	0.22	0.03	0.07	0.10	6.96	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.57	2	III							
14	2500 SUWAWA	16887	6.47	0.47	0.12	0.29	29.94	0.09	0.06	0.06	0.03	0.07	0.07	0.04	0.00	0.07	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	2	IV							
15	3300 WONOSARI	12253	4.62	0.44	0.09	0.21	23.50	0.15	0.03	0.09	0.03	0.03	0.03	0.17	0.04	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52	0	IV							
16	1400 SUMALATA	21793	4.09	0.50	0.15	0.18	56.65	0.06	0.09	0.19	0.00	0.10	0.03	0.04	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.27	2	III							
17	3100 PAGUYAMAN	12635	3.59	0.38	0.09	0.03	9.47	0.09	0.09	0.19	0.10	0.10	0.10	0.07	0.04	0.05	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37	2	IV							
18	3500 LEMITO	17657	3.41	0.41	0.29	0.18	9.24	0.09	0.13	0.09	0.07	0.07	0.03	0.03	0.13	1.52	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.11	0	IV							
19	3600 RANDANGAN	29548	4.79	0.85	0.15	0.21	30.00	0.24	0.06	0.03	0.03	0.03	0.13	0.07	0.22	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14	2	IV							
20	0800 BONGMEME	18905	3.41	0.74	0.21	0.03	9.24	0.09	0.13	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.22	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	2	IV							
21	3400 POPAYATO	18039	5.79	0.59	0.21	0.15	29.97	0.12	0.13	0.06	0.03	0.03	0.03	0.23	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70	2	IV							
22	0600 BATUDAA PANTA	27775	1.62	1.06	0.29	0.35	31.47	0.18	0.22	0.16	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.45	2	IV							
23	2600 BONEPANTAI	20267	4.47	0.50	0.18	0.18	56.41	0.36	0.13	0.03	0.03	0.10	0.00	5.48	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96	2	III							
24	1900 LIMBOTO BARAT	21173	5.09	0.79	0.24	0.41	53.21	0.45	0.09	0.25	0.03	0.07	0.03	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.41	0	III							
25	2100 TELAGA BIRU	10579	1.85	0.29	0.03	0.03	51.53	0.12	0.06	0.09	0.03	0.03	0.03	0.07	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.58	0	III							
26	2900 MANANGGU	16823	2.74	0.38	0.09	0.21	15.85	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59	0	IV							
27	1700 ANGREK	11386	3.50	0.29	0.09	0.35	32.53	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.08	0	IV							
28	2800 BOTUMOITO	20941	4.06	0.71	0.18	0.15	6.76	0.12	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.42	2	IV							
29	1300 TOLANGOHULA	24484	2.74	0.50	0.12	0.32	33.21	0.21	0.13	0.09	0.03	0.03	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	2	IV							
30	1000 PULUBALA	12445	1.47	0.35	0.12	0.06	12.44	0.12	0.06	0.03	0.03	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.84	2	IV							
31	3000 DULUPI	11548	1.97	0.41	0.21	0.32	17.32	0.00	0.06	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	2	IV							
32	1500 TOLANGGULA	16591	0.50	0.44	0.12	0.15	15.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	2	IV								
33	1200 MOOTILANGO	6328	1.12	0.18	0.09	0.09	2.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0	IV								
34	3200 PAGUYAMAN PAN	182.12	24.94	6.53	11.79	3717.9	9.58	3.94	5.81	1.33	3.57	3.23	81.3	2.48	1.00	2.15	1.58	1.14	1.00	2.00	2.50	2.50	1.00	2.00	12.00	1.00	4.812	1	4.812								
Jumlah Wilayah / Fasilitas			34	34	34	34	34	34	34	32	32	30	30	30	30	23	21	15	13	12	7	6	2	2	2	1	1	1	463	42							
Keseharian			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	5	4	5	6	4	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	42						
Bobot			0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.030	0.031	0.031	0.031	0.033	0.033	0.033	0.043	0.048	0.067	0.077	0.083	0.143	0.167	0.500	0.500	0.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
Coefficient of Reproducibility (COR) :			0.91																																		

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (lampiran A)

4.1.1.2 Pembagian Hirarki Pusat Pelayanan

Menurut pendekatan teori pusat pelayanan, sistem permukiman di negara sedang berkembang dapat dibagi menjadi empat tingkatan. Tingkatan tersebut disusun berdasarkan peran dan fungsinya sebagai pusat pelayanan (Rondinelli, 1978 : 64-75; ECAP, 1979 dalam Simamora, 1987 : 49), yaitu kota utama, kota regional, kota pasar/kota kecil dan Pusat Desa. Kemungkinan pusat pelayanan Gorontalo yang dalam hal ini sebagai hirarki tertinggi di Provinsi Gorontalo, namun bukan menjadi kota utama karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai kota utama. Salah satu syarat kota utama adalah mempunyai jumlah penduduk minimal 200.000 jiwa, sementara Kota Gorontalo hanya memiliki jumlah penduduk sebesar 134.581 jiwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hanya ada tiga tingkatan pelayanan yang akan diidentifikasi. Namun perlu ditambahkan satu kriteria tingkatan lagi yaitu desa-desa non pusat pelayanan, dengan pertimbangan bahwa wilayah yang berpotensi sebagai pusat pelayanan belum tentu mampu menjadi pusat pelayanan. Dengan demikian pembagian kelompok pusat pelayanan di Provinsi Gorontalo terdiri dari empat kelompok, yaitu pusat wilayah, kota pasar / kota kecil, pusat desa dan desa non pusat pelayanan.

Sebagaimana halnya dengan penilaian kemampuan pusat pelayanan, dalam pembagian hirarki pusat pelayanan juga menggunakan dua metoda yaitu Skalogram Guttman dan metoda Indeks Sentralitas Marshall.

A. Pembagian Hirarki Pusat Pelayanan berdasarkan Skalogram Guttman

Pembagian hirarki pusat pelayanan berdasarkan metoda skalogram Guttman, pusat-pusat pelayanan di Provinsi Gorontalo terdiri dari 14 kelompok. Dari 14 kelompok tersebut selanjutnya dibagi menjadi empat tingkatan pelayanan yang dilakukan dengan

melihat kelengkapan fasilitasnya serta berdasarkan prinsip bahwa pada umumnya pusat pelayanan tingkatan tinggi lebih sedikit dari pada tingkatan dibawahnya.

Hasil dari pembagian tingkatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkatan I terdiri dari : Gorontalo.
2. Tingkatan II terdiri dari : Limboto, Marisa, Tilamuta, Telaga, Tibawa, Kwandang, dan Boliyohuto.
3. Tingkatan III terdiri dari : Tapa, Paguat, Batudaa, Atinggola, Kabila, Suwawa, Wonosari, Sumalata, Paguyaman dan Lemito.
4. Tingkatan IV terdiri dari : Randangan, Bongomeme, Popayato, Batudaa Pantai, Bone Pantai, Limboto Barat, Telaga Biru, Mananggu, Anggrek, Botumoito, Tolangohula, Pulubala, Dulupi, Tolinggula, Mootilango dan Paguyaman Pantai.

Pengelompokkan pusat pelayanan berdasarkan metoda Skalogram Guttman dapat dilihat pada Tabel IV.4 .

B. Pembagian Hirarki Pusat Pelayanan berdasarkan Indeks Sentralitas Marshall

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu strategi dalam perwilayahan pembangunan dilakukan dengan menyusun pusat-pusat pelayanan atas beberapa tingkatan pusat pelayanan. Dalam hal ini pusat-pusat pelayanan ditempatkan secara hirarkis berdasarkan kemampuannya untuk berperan sebagai pusat-pusat pelayanan. Untuk dapat mengidentifikasi tingkatan pusat pelayanan secara hirarkis berdasarkan kemampuannya maka nilai sentralitas yang telah dihasilkan selanjutnya akan dibagi atas empat tingkatan pusat pelayanan. Pembagian dilakukan dengan cara statistik yaitu dengan metoda Pendugaan Interval. Metoda ini digunakan karena dapat memberikan interval nilai berdasarkan tingkat kepercayaan (Dajan, 1984 : 208).

TABEL IV.4
TINGKATAN PUSAT PELAYANAN
BERDASARKAN METODA SKALOGRAM GUTTMAN

No	Pusat Pelayanan	Kelompok	Kelengkapan Fasilitas		
			Jumlah	(%)	Jenis
1	2	3	4	5	6
1	GORONTALO	I	24	100,00	Pasar Regional, Akademi, Hotel, GOR / Stadion
2	LIMBOTO	II	20	83,33	Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Terminal, BPR, Apotik
3	MARISA				
4	TILAMUTA				
5	TELAGA				
6	TIBAWA				
7	KWANDANG				
8	BOLIOHUTO				
9	TAPA				
10	PAGUAT				
11	BATUDAA				
12	ATINGGOLA				
13	KABILA				
14	SUWAWA				
15	WONOSARI				
16	SUMALATA				
17	PAGUYAMAN				
18	LEMITO				
19	RANDANGAN	IV	13	54,17	Sekolah Menengah Umum (SMU), Fas. Telepon, Pasar Desa, Dokter, KUD, Puskesmas, SLTP, Toko, Sekolah Dasar (SD), Puskesmas Pembantu, Perawat, Fasilitas Listrik, Taman Kanak-kanak
20	BONGOMEME				
21	POPAYATO				
22	BATUDAA PANTAI				
23	BONE PANTAI				
24	LIMBOTO BARAT				
25	TELAGA BIRU				
26	MANANGGU				
27	ANGGREK				
28	BOTUMOITO				
29	TOLANGOHULA				
30	PULUBALA				
31	DULUPI				
32	TOLINGGULA				
33	MOOTILANGO				
34	PAGUYAMAN PANTAI				

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (Lampiran A)

Dalam pembagian hirarki pusat pelayanan berdasarkan indeks sentralitas Marshal ini, pusat Pelayanan Gorontalo tidak diikutsertakan dalam perhitungan pembagian interval, dengan pertimbangan :

- Perbedaan total nilai / bobot sentralitas yang dimiliki terlalu tinggi, sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam penilaiannya.

- Dengan nilai dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki Gorontalo, sudah pasti menempati hirarki I.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta panjang interval hasil perhitungan dengan metoda pendugaan interval, dapat disusun tingkatan pusat pelayanan berdasarkan nilai sentralitasnya sebagai berikut :

1. Tingkatan I terdiri dari : Gorontalo.
2. Tingkatan II terdiri dari : Limboto, Marisa, Tilamuta, Telaga, Kabila, dan Kwandang.
3. Tingkatan III terdiri dari : Telaga biru, Limboto Barat, Paguat, Tapa, Paguyaman, Tibawa, Boliyohuto, Batudaa, Manangu, dan Suwawa.
4. Tingkatan IV terdiri dari : Bongomeme, Wonosari, Batudaa Pantai, Tolangohula, Botumoito, Atinggola, Bone Pantai, Sumalata, Dulupi, Tolinggula, Anggrek, Mootilango, Lemito, Popayato, Randangan, Pulubala, dan Paguyaman Pantai.

Pengelompokkan pusat pelayanan berdasarkan metoda indeks sentralitas Marshall dapat dilihat pada Tabel IV.5

Dengan pembagian tingkatan tersebut diharapkan sudah dapat menunjukkan tingkatan dari masing-masing pusat pelayanan. Dengan demikian dapat diidentifikasi pusat-pusat pelayanan yang berpotensi sebagai pusat-pusat perwilayahan pembangunan berdasarkan kemampuan pelayanannya.

Hasil pembagian hirarki dengan metoda indeks sentralitas, berdasarkan kemampuan pelayanannya terdapat 6 pusat pelayanan yang masuk dalam kelompok kedua yaitu kelompok kota pasar / kota kecil. Kelompok ini paling berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan kedua. Keenam pusat pelayanan tersebut adalah Limboto dengan bobot sentralitas sebesar (233,83), Marisa (115,35), Tilamuta (106,91), Kabila (95,92), dan Kwandang (95,15).

Pembagian tingkatan pusat-pusat pelayanan di Provinsi Gorontalo berdasarkan metoda Indeks Sentralitas Marshall dapat dilihat pada Tabel IV.5. Adapun pengerjaan dengan metoda Indeks Sentralitas Marshall dilihat pada lampiran A.

TABEL IV.5
KEMAMPUAN PELAYANAN
DENGAN INDEKS SENTRALITAS MARSHALL

No	Nama Pusat	Nilai Sentralitas	Tingkatan	Keterangan
1	2	3		4
1	GORONTALO	3031.37	I	Pusat Wilayah
2	LIMBOTO	233.83	II	Kota Pasar/Kota Kecil
3	MARISA	115.35	II	Kota Pasar/Kota Kecil
4	TILAMUTA	106.91	II	Kota Pasar/Kota Kecil
5	TELAGA	100.97	II	Kota Pasar/Kota Kecil
6	KABILA	95.92	II	Kota Pasar/Kota Kecil
7	KWANDANG	95.15	II	Kota Pasar/Kota Kecil
8	TELAGA BIRU	68.41	III	Pusat Desa
9	LIMBOTO BARAT	67.96	III	Pusat Desa
10	PAGUAT	66.37	III	Pusat Desa
11	TAPA	63.44	III	Pusat Desa
12	PAGUYAMAN	62.27	III	Pusat Desa
13	TIBAWA	56.47	III	Pusat Desa
14	BOLIYOHUTO	56.42	III	Pusat Desa
15	BATUDAA	54.95	III	Pusat Desa
16	MANANGGU	54.58	III	Pusat Desa
17	SUWAWA	52.57	III	Pusat Desa
18	BONGOMEME	38.11	IV	Non Pusat Pelayanan
19	WONOSARI	37.87	IV	Non Pusat Pelayanan
20	BATUDAA PANTAI	37.45	IV	Non Pusat Pelayanan
21	TOLANGOHULA	37.42	IV	Non Pusat Pelayanan
22	BOTUMOITO	37.08	IV	Non Pusat Pelayanan
23	ATINGGOLA	37.02	IV	Non Pusat Pelayanan
24	BONEPANTAI	35.70	IV	Non Pusat Pelayanan
25	SUMALATA	29.52	IV	Non Pusat Pelayanan
26	DULUPI	23.84	IV	Non Pusat Pelayanan
27	TOLINGGULA	20.40	IV	Non Pusat Pelayanan
28	ANGGREK	19.59	IV	Non Pusat Pelayanan
29	MOOTILANGO	16.45	IV	Non Pusat Pelayanan
30	LEMITO	14.37	IV	Non Pusat Pelayanan
31	POPAYATO	14.29	IV	Non Pusat Pelayanan
32	RANDANGAN	14.14	IV	Non Pusat Pelayanan
33	PULUBALA	12.14	IV	Non Pusat Pelayanan
34	PAGUYAMAN PANTAI	3.59	IV	Non Pusat Pelayanan

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (lampiran A)

Dari uraian dan Tabel IV.2 dan Tabel IV.5 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pembagian tingkatan menurut metoda Skalogram Guttman dan Metoda Indeks Sentralitas Marshall relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dan jenis fasilitas pelayanan berkembang secara searah. Dengan kata lain suatu pusat dengan jumlah fasilitas tinggi cenderung memiliki fasilitas lebih lengkap.

Namun demikian untuk pembagian hirarki pusat pelayanan dalam studi ini akan digunakan hasil pembagian tingkatan berdasarkan metode indeks sentralitas Marshall. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa metoda indeks sentralitas Marshall dapat lebih riil menggambarkan kemampuan pelayanannya, karena sudah mempertimbangkan jumlah dari masing-masing fasilitas yang lebih menggambarkan tingkat kemampuan dibandingkan dengan metoda Skalogram Guttman yang hanya mempertimbangkan keberadaan dari fasilitas tersebut. Sedang metoda Skalogram Guttman digunakan pada tahapan awal yaitu untuk mendapatkan bobot dari masing-masing fasilitas pada matrik skalogram, yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan dalam metoda Indeks Sentralitas Marshall.

Hasil yang diperoleh pada penyusunan tahap ini masih bersifat sementara, karena penilainnya belum mempertimbangkan tinjauan ruang dalam kaitannya dengan sistem pelayanannya, yang akan dikaji dalam pembahasan selanjutnya.

4.1.2 Analisis Wilayah Pengaruh / Wilayah Pelayanan

Dalam studi ini, jumlah pusat-pusat pelayanan yang akan digunakan sebagai pusat wilayah pelayanan sebagai pendekatan dalam penentuan wilayah pengaruh, adalah pusat-pusat pelayanan kesatu (pusat wilayah/kota regional) dan pusat pelayanan kedua (kelompok kota pasar / kota kecil) dari hasil analisis dengan metoda Indeks Sentralitas Marshall yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut dengan anggapan bahwa pusat pelayanan kedua dan wilayah pengaruhnya adalah merupakan sistem. Sistem tersebut

terbentuk karena adanya interaksi pelayanan antara kedua pusat pelayanan (sebagai pusat pelayanan kedua) dengan pusat-pusat pelayanan dibawah tingkatannya (Rondinelli, 1983 : 210-224). Dengan demikian pusat-pusat pelayanan tersebut masing-masing adalah Gorontalo, Limboto, Marisa, Tilamuta, Telaga, Kabila, dan Kwandang.

Metoda yang akan digunakan untuk mengukur interaksi pusat-pusat pelayanan kedua dengan pusat-pusat pelayanan dibawah tingkatannya di Provinsi Gorontalo adalah metoda analisis gravitasi dan metoda analisis titik henti.

4.1.2.1 Analisis Gravitasi

Dalam studi ini metode analisis gravitasi digunakan untuk mengidentifikasi batas-batas wilayah wilayah pengaruh suatu pusat pelayanan kedua yang merupakan hasil dari analisis sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengukur nilai interaksi antara pusat-pusat pelayanan dengan setiap pusat pelayanan terpilih, dalam hal ini pusat-pusat pelayanan kedua, yang mempertimbangkan jarak antar pusat serta nilai besaran yang menunjukkan ukuran masing-masing pusat pelayanan, dengan menggunakan variabel jumlah penduduk dan kemampuan pelayanan dalam hal ini bobot sentralitas yang dimiliki oleh masing-masing pusat pelayanan.

Nilai interaksi ini kemudian dibandingkan, nilai interaksi terbesar antara suatu pusat pelayanan dengan suatu pusat pelayanan terpilih yang akan menunjukkan bahwa pusat pelayanan yang bersangkutan paling dipengaruhi oleh pusat pelayanan terpilih tersebut, sehingga pusat utama beserta hinterlandnya akan menjadi wilayah pengaruhnya.

Besarnya interaksi antar pusat-pusat pelayanan dengan metoda analisis gravitasi ini dapat dilihat pada Tabel IV.6, adapun pengerjaannya dapat dilihat pada lampiran B.

Dengan menggunakan Tabel interaksi dari perhitungan metoda gravitasi (Tabel IV.6), maka identifikasi wilayah pengaruh pusat-pusat pelayanan akan dilakukan

berdasarkan nilai interaksi terbesar. Oleh karena nilai interaksi terbesar hampir seluruhnya menuju ke Kota Gorontalo (yang juga berperan sebagai ibukota provinsi, dan tidak memberikan gambaran adanya sub sistem pusat-pusat pelayanan), maka nilai interaksi terbesar yang ditinjau adalah antara pusat-pusat pelayanan keduanya. Dengan demikian dapat diidentifikasi pengelompokkan pusat-pusat pelayanan berdasarkan nilai interaksi terkuat. Dalam hal ini hasil pengelompokkan dianggap sebagai wilayah pengaruh pusat-pusat pelayanan.

Dengan demikian berdasarkan nilai interaksi yang dihasilkan dalam perhitungan dengan metoda gravitasi tersebut dapat diidentifikasi wilayah pengaruh pusat-pusat pelayanan sebagai berikut :

1. Pusat pelayanan Limboto, wilayah pengaruhnya meliputi Batudaa Pantai, Batudaa, Bongomeme, Tibawa, Pulubala, Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula, dan Limboto Barat, Telaga dan Telaga Biru.
2. Pusat pelayanan Marisa, meliputi Popayato, Lemito, Randangan dan Paguat.
3. Pusat pelayanan Tilamuta, wilayah pengaruhnya Botumoito, Mananggu dan Dulupi.
4. Pusat pelayanan Kabila, wilayah pengaruhnya meliputi Tapa, Suwawa dan BonePantai.
5. Pusat pelayanan Kwandang, wilayah pengaruhnya meliputi Sumalata, Tolinggula, Anggrek dan Atinggola.

Khusus untuk pusat pelayanan Telaga dengan Telaga biru sebagai wilayah pengaruhnya, dimasukkan kedalam wilayah pengaruh pusat pelayanan Limboto, yang mempunyai nilai interaksi terbesar diantara pusat-pusat pelayanan keduanya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dari hasil perhitungan metoda gravitasi, nilai interaksi Telaga sangat kecil dan hanya mempunyai wilayah pengaruh satu pusat pelayanan yaitu Telaga Biru.

TABEL. IV.6
HASIL PERHITUNGAN ANALISIS GRAVITASI DENGAN MENGGUNAKAN VARIABEL JARAK DAN BOBOT SENTRALITAS

No	KODE	NAMA WILAYAH	NILAI GRAVITASI											PUSAT
			SENTRA- LITAS	GORONTALO	LIMBOTO	MARISA	TILAMUTA	TELAGA	KABILA	KWANDANG	95.15	PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13			
1	0100	GORONTALO	3,031.37	#DIV/0!	2,768.85	12.84	29.40	8,502.15	11,630.76	75.04	75.04	GORONTALO		
6	0600	BATUDDAA PANTAI	37.45	181.64	5.47	0.17	0.41	1.51	3.99	1.14	1.14	Limboto		
7	0700	BATUDDAA	54.95	740.33	14.28	0.29	0.74	3.47	13.18	2.47	2.47	Limboto		
8	0800	BONGOMEME	38.11	288.81	9.90	0.17	0.42	1.54	5.85	1.16	1.16	Limboto		
9	0900	TIBAWA	56.47	178.13	58.69	0.36	1.10	9.12	4.18	5.59	5.59	Limboto		
10	1000	PULUBALA	12.14	25.49	5.87	0.09	0.29	1.20	0.63	0.80	0.80	Limboto		
11	1100	BOLIYOHUTO	56.42	32.99	4.21	0.75	3.26	1.31	0.91	0.86	0.86	Limboto		
12	1200	MOOTILANGO	16.45	9.62	1.23	0.06	0.13	0.38	0.27	0.25	0.25	Limboto		
13	1300	TOLANGHULA	37.42	13.40	1.51	0.11	0.22	0.51	0.38	0.42	0.42	Limboto		
14	1400	SUMALATA	29.52	5.55	0.61	0.05	0.08	0.22	0.18	0.78	0.78	Kwandang		
15	1500	TOLINGGULA	20.40	2.22	0.22	0.03	0.04	0.09	0.07	0.24	0.24	Kwandang		
16	1600	KWANDANG	95.15	75.04	10.51	0.40	0.92	3.55	2.03	#DIV/0!	#DIV/0!	Kwandang		
17	1700	ANGGREG	19.59	10.56	1.32	0.06	0.12	0.42	0.29	11.03	11.03	Kwandang		
18	1800	LIMBOTO	233.83	2,768.85	#DIV/0!	1.21	3.16	236.10	50.86	10.51	10.51	Limboto		
19	1900	LIMBOTO BARAT	67.96	515.03	993.19	0.37	0.21	35.01	10.43	3.67	3.67	Limboto		
20	2000	TELAGA	100.97	8,502.15	236.10	0.46	1.10	#DIV/0!	80.04	3.55	3.55	Telaga		
21	2100	TELAGA BRU	68.41	3,240.25	249.94	0.32	0.78	1,726.84	38.83	2.60	2.60	Telaga		
22	2200	ATINGGOLA	37.02	7.79	0.80	0.07	0.11	0.29	0.23	1.05	1.05	Kwandang		
23	2300	TAPA	63.44	7,692.40	57.95	0.27	0.62	100.09	124.19	1.57	1.57	Kabila		
24	2400	KABILA	95.92	11,630.76	50.86	0.38	0.85	80.04	#DIV/0!	2.03	2.03	Kabila		
25	2500	SUWAWA	52.57	1,593.59	18.18	0.20	0.42	20.73	201.70	0.96	0.96	Kabila		
26	2600	BONEPANTAI	35.70	67.64	2.66	0.11	0.21	2.78	2.80	0.40	0.40	Kabila		
27	2700	TILAMUTA	106.91	29.40	3.16	2.45	#DIV/0!	1.10	0.85	0.92	0.92	Tilamuta		
28	2800	BOTUMOITO	37.08	8.21	0.85	0.83	27.53	0.30	0.24	0.26	0.26	Tilamuta		
29	2900	MANANGGU	54.58	8.56	0.84	2.85	5.05	0.31	0.25	0.23	0.23	Tilamuta		
30	3000	DULUPI	23.84	10.75	1.28	0.40	4.82	0.42	0.30	0.34	0.34	Tilamuta		
31	3100	PAGUYAMAN	62.27	81.93	14.22	0.52	3.01	3.56	2.13	2.57	2.57	Limboto		
32	3200	PAGUYAMAN PANTAI	3.59	3.87	0.61	0.03	0.14	0.16	0.10	0.12	0.12	Limboto		
33	3300	WONOSARI	37.87	25.57	3.40	0.45	2.66	1.03	0.70	0.80	0.80	Limboto		
34	3400	POPAYATO	14.29	0.68	0.06	0.21	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	Marisa		
35	3500	LEMITTO	14.37	0.80	0.07	0.35	0.09	0.03	0.02	0.09	0.09	Marisa		
36	3600	RANDANGAN	14.14	1.09	0.10	1.50	0.17	0.04	0.03	0.03	0.03	Marisa		
37	3700	MARISA	115.35	12.84	1.21	#DIV/0!	2.45	0.46	0.38	0.40	0.40	Marisa		
38	3800	PAGUAT	66.37	9.31	0.90	23.63	4.02	0.34	0.28	0.29	0.29	Marisa		

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (lampiran B).

4.1.2.2 Analisis Titik Henti

Metoda analisis titik henti digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana jangkauan pelayanan atau batas wilayah pengaruh pusat-pusat dengan *hinterland*. Titik henti antara dua pusat permukiman atau kota pada dasarnya berfungsi membagi penduduk yang menggantungkan diri pada pelayanan pusat permukiman yang satu dan penduduk yang menggantungkan diri pada pelayanan pusat permukiman yang lainnya. Apabila dua pusat permukiman tersebut sama besar dan pentingnya, maka titik henti akan terletak di tengah-tengah kedua pusat permukiman tersebut. Akan tetapi apabila tidak sama besarnya maka pusat permukiman yang lebih besar cenderung memiliki tarikan melebihi apa yang dimiliki pusat permukiman yang lebih kecil, demikian halnya lokasi titik hentinya akan mendekati pusat permukiman yang lebih kecil tersebut. (Daldjoeni, 1997 : 212-213). Dengan demikian batas wilayah pengaruh didapatkan dari besaran angka wilayah pengaruh atau kekuatan daya tarik yang terjadi yaitu dimana lokasi titik hentinya. Dalam perhitungan ini variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk dan jarak antar pusat-pusat permukiman yang akan dikaji.

Kriteria pembobotan fasilitas pelayanan pada suatu pusat permukiman dapat menggunakan hasil penilaian dengan metoda analisis indeks sentralitas Marshall. Sedangkan data jarak antar pusat permukiman akan dihitung berdasarkan waktu tempuh, karena waktu tempuh merupakan alasan seseorang untuk menuju ke suatu pusat permukiman sebagai pusat pelayanannya.

Namun demikian, pada studi ini menggunakan variabel jarak dan variabel penduduk maupun bobot sentralitas, walaupun antara jumlah penduduk dan bobot sentralitas fasilitas pelayanan yang ada di Provinsi Gorontalo relatif berkembang searah, yaitu semakin besar jumlah penduduknya maka akan semakin besar bobot sentralitasnya.

Demikian halnya dengan tetap penggunaan variabel jarak dengan pertimbangan bahwa kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat permukiman yang akan dikaji relatif sama, sehingga sebanding dengan waktu tempuhnya.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metoda analisis titik henti, maka letak titik henti dari masing-masing pusat permukiman adalah seperti terlihat pada Tabel IV.7 dan Tabel IV.8 dan Gambar 4.1 sampai dengan Gambar 4.4. Secara rinci pengerjaan dan hasil perhitungan dengan metoda analisis titik henti ini dapat dilihat pada lampiran B.

TABEL IV.7
TITIK HENTI ANTAR PUSAT-PUSAT PELAYANAN KEDUA
DI PROVINSI GORONTALO

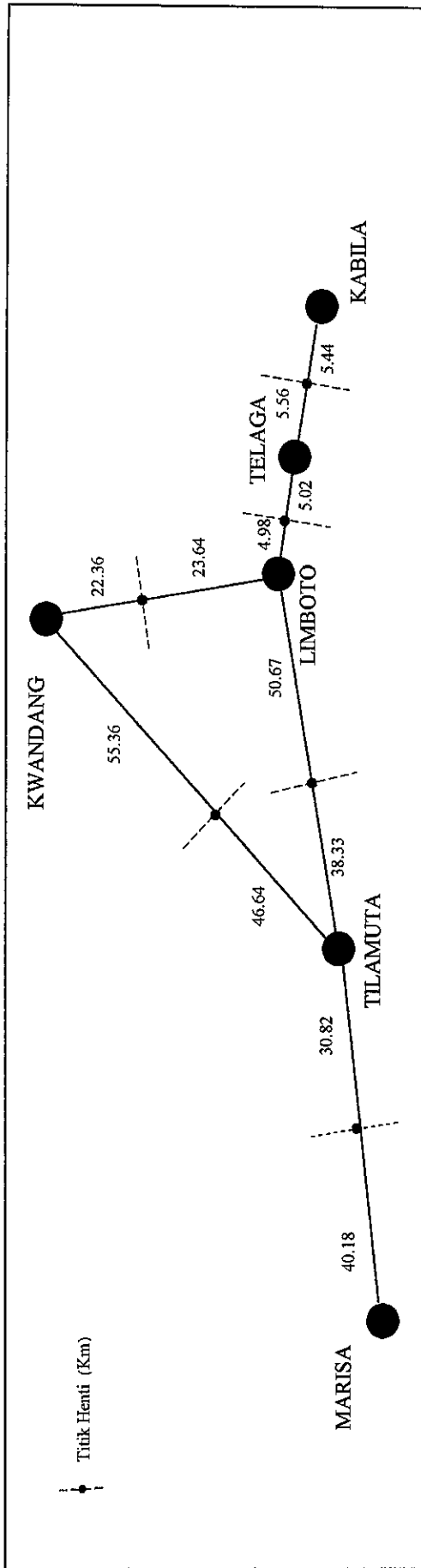
No	Pusat Pelayanan		Titik Henti (Km)		Keterangan
	A	B	A - B	B - A	
1	2	3	4	5	6
1	LIMBOTO	TILAMUTA	50,67	38,33	50,67 km dari Limboto atau 38,33 km dari Tilamuta
2		TELAGA	4,98	5,02	4,98 km dari Limboto atau 5,02 km dari Telaga
3		KWANDANG	23,64	22,36	23,64 km dari Limboto atau 22,36 km dari Kwandang
4	MARISA	TILAMUTA	40,18	30,82	40,18 km dari Marisa atau 30,82 km dari Tilamuta
5	TILAMUTA	KWANDANG	46,64	58,36	46,64 km dari Tilamuta atau 58,36 km dari Kwandang
6	TELAGA	KABILA	5,56	5,44	5,56 km dari Telaga atau 5,44 km dari Kabila

Sumber : Hasil analisis studi, 2004. (lampiran B)

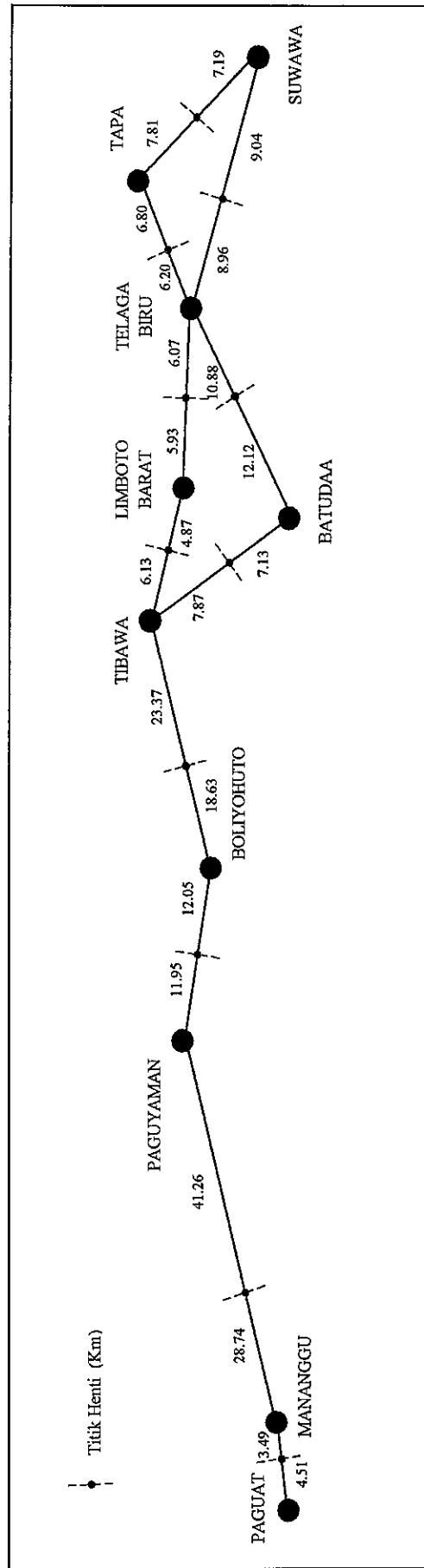
TABEL IV.8
TITIK HENTI ANTAR PUSAT-PUSAT PELAYANAN KETIGA
DI PROVINSI GORONTALO

No	Pusat Pelayanan		Titik Henti (Km)		Keterangan
	A	B	A - B	B - A	
1	2	3	4	5	6
1	TELAGA BIRU	LIMBOTO BARAT	6,07	5,93	6,07 km dari Telaga Biru / 5,93 km dari Limboto Barat
2		TAPA	6,20	6,80	6,20km dari Telaga Biru / 6,80 km dari Tapa
3		BATUDAA	10,88	12,12	10,88 km dari Telaga Biru / 12,12 dari Batudaa
4		SUWAWA	8,96	9,04	8,96 km dari Telaga Biru / 9,04 dari Suwawa
5	LIMBOTO BARAT	TIBAWA	4,87	6,13	4,87 km dari Limboto Barat / 6,13 km dari Tibawa
6	PAGUAT	MANANGGU	4,51	3,49	4,51 km dari Paguat / 3,49 km dari Mananggu
7	TAPA	SUWAWA	7,81	7,19	7,81 km dari Tapa / 7,19 km dari Suwawa
8	PAGUYAMAN	BOLIYOHUTO	11,95	12,05	11,95 km dari Paguyaman / 12,05 km dari Boliyohuto
9		MANANGGU	41,26	28,74	41,26 km dari Paguyaman / 28,74 km dari Mananggu
10	TIBAWA	BOLIYOHUTO	22,37	18,63	22,37 km dari Tibawa / 18,63 km dari Boliyohuto
11		BATUDAA	7,87	7,13	7,87 km dari Tibawa / 7,13 km dari Batudaa

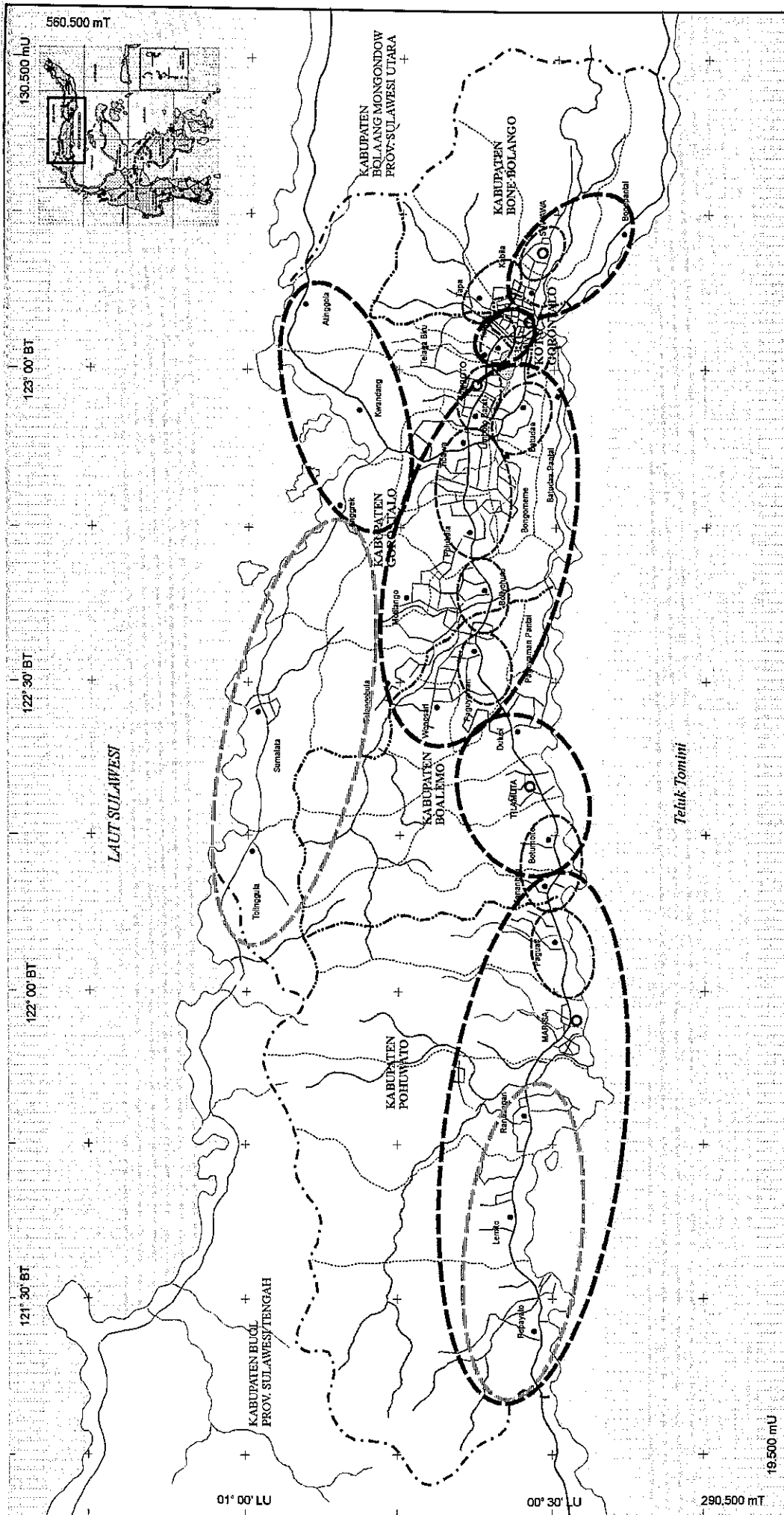
Sumber : Hasil analisis studi, 2004. (lampiran B)



GAMBAR 4.1
TITIK HENTI ANTAR PUSAT PELAYANAN KEDUA DI PROVINSI GORONTALO



GAMBAR 4.2
TITIK HENTI ANTAR PUSAT PELAYANAN KETIGA DI PROVINSI GORONTALO



0 10 20 30 50 km	
UTARA	NO. PETA
	4.4
HALAMAN	
108	
SUMBER	
Hasil analisis studi, 2004	

LEGENDA

	Batas Provinsi		Danu
	Batas Kabupaten		Wilayah pelayanan berdasarkan titik henti antar pusat pelayanan kedua
	Batas Kecamatan		Wilayah pelayanan berdasarkan titik henti antar pusat pelayanan ketiga
	Jalan Negara		Wilayah relatif belum terlayani secara hirarkis oleh pusat-pusat pelayanan yang ada
	Jalan Provinsi		
	Jalan Kabupaten		
	Sungai / Anak Sungai		
	Ibukota Kabupaten		
	Ibukota Kecamatan		

MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN
SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
PROVINSI GORONTALO

PETA

WILAYAH PELAYANAN
BERDASARKAN TITIK HENTI ANTAR PUSAT PELAYANAN

4.2 Analisis Potensi Perkembangan Wilayah

4.2.1 Metoda Analisis Potensi Perkembangan Wilayah

Pendekatan perwilayahan wilayah secara homogen memiliki pengertian bahwa suatu satuan wilayah adalah seragam berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Suatu satuan wilayah homogen dapat dilihat dari sifat-sifat geografi, fisik, sosial, politik dan administrasi, serta sifat-sifat ekonomi (Paelinck dan Nijkamp, 1978: 191-192). Dengan demikian Perwilayahan secara homogen adalah suatu usaha untuk mengelompokkan satuan-satuan wilayah yang ditinjau dari kriteria-kriteria tertentu mempunyai nilai sama atau masih dalam batas nilai kelompok yang sama.

Metoda yang digunakan untuk melakukan perwilayahan dengan pendekatan secara homogen dalam studi ini adalah model analisis faktor. Analisis faktor merupakan bagian dari analisis variasi ganda (*multivariate analysis*) dalam ilmu statistik. Analisis faktor memungkinkan dilakukan pengurangan dari sejumlah besar variabel menjadi dimensi-dimensi dasar yang berjumlah lebih kecil yang menjelaskan pengamatan tersebut pada sifat dasarnya, sementara relevansi statistik dan informasi yang tetap terjaga tidak berkurang (Paelinck dan Nijkamp, 1978: 207). Dari hal tersebut analisis faktor dapat berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersamar yang sebenarnya mendasari variabel-variabel dalam suatu observasi.

Pertimbangan lain penggunaan metoda analisis faktor antara lain adalah :

- Analisis faktor dapat mengurai karakteristik wilayah melalui interpretasi faktor-faktor dasarnya.
- Analisis faktor dapat membantu dalam menentukan apa dan bagaimana setelah perwilayahan dilakukan, karena faktor-faktor yang menjadi penentu homogenitas wilayah dihasilkan dari pengolahan data empiris.

- Loading faktor untuk setiap variabel merupakan merupakan hasil pengolahan data-data sehingga bersifat obyektif dan empiris.

Metode metode analisis faktor dalam studi ini digunakan untuk membantu memahami dan mendefinisikan karakteristik suatu wilayah yang homogen dengan menemukan faktor-faktor dasar apa yang sebenarnya ada dibalik sejumlah variabel dan observasi yang besar. Hasil dari analisis faktor ini berupa potensi perkembangan sosial ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Dalam menggunakan analisis faktor pada studi ini, observasi yang ditinjau sebanyak 376 unit desa / kelurahan pada 38 kecamatan di Provinsi Gorontalo.

4.2.2 Kriteria Penilaian Potensi Perkembangan Sosial Ekonomi

Tujuan dari studi ini adalah melakukan perwilayahan pembangunan di Provinsi Gorontalo, yang diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dalam pelaksanaan dan koordinasi pembangunan daerah serta sebagai upaya untuk lebih menyebarkan pembangunan ke seluruh wilayah provinsi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka perwilayahan pembangunan harus mencerminkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo, serta dengan mempertimbangkan aspek hubungan fungsional yang ada. Dengan demikian parameter yang digunakan dalam melakukan perwilayahan dengan pendekatan homogenitas ini harus mencakup semua potensi, yang secara garis besar meliputi potensi fisik dasar dan potensi perkembangan sosial ekonomi.

A. Potensi Fisik Dasar

Kriteria yang digunakan dalam aspek fisik dasar ini antara lain meliputi topografi, iklim, jenis tanah dan penggunaan tanah. Pemilihan kriteria yang akan dipergunakan sebagai parameter sangat tergantung dari tujuan studi, karakteristik wilayah studi dan data yang tersedia, dengan demikian tidak semua kriteria tersebut harus digunakan. Pada bab III

telah dibahas gambaran umum wilayah studi dari aspek fisik dasar tersebut. Dari karakteristik secara umum tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi penduduknya, dalam banyak hal mempunyai potensi yang relatif homogen dari aspek fisik dasar. Oleh karena itu dalam melakukan penilaian dari aspek fisik dasar ini hanya akan ditinjau dari beberapa kriteria yang penting saja dan yang terlihat jelas heterogenitasnya di wilayah studi, yaitu kemiringan lahan, kemampuan tanah dan penggunaan tanah.

B. Potensi Sosial Ekonomi

Kriteria-kriteria dalam menilai potensi perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah pada dasarnya harus dapat mencerminkan potensi dasar penduduknya dan kegiatan-kegiatannya. Hal tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data, maka ada dua kriteria yang akan digunakan dalam studi ini, yaitu kriteria kependudukan dan sumberdaya manusia, serta kriteria ketersediaan fasilitas.

Untuk melihat potensi perkembangansosial ekonomi pada wilayah studi terdapat 37 variabel yang ditinjau dari 376 unit observasi. Namun demikian setelah dilakukan perhitungan dengan metoda analisis faktor, ternyata dengan menggunakan 37 variabel yang ditinjau tersebut menurut uji statistik hasilnya tidak memuaskan atau tidak dapat diterima, yaitu nilai KMO (*Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sampling*) dibawah 0,5. Untuk itu dilakukan pengelompokkan sebagian variabel-variabel tersebut, dengan melakukan perhitungan berulang hingga mencapai nilai KMO yang memenuhi uji statistik, yaitu dalam studi ini menghasilkan nilai 0,674 dengan menggunakan pengelompokkan sebagian variabel menjadi 18 variabel yang ditinjau dari 376 unit observasi (lihat lampiran C).

4.2.3 Faktor Perkembangan Sosial Ekonomi Provinsi Gorontalo

Analisis perwilayahan secara homogen pada dasarnya adalah berusaha untuk mengenali potensi-potensi perkembangan wilayah di daerah studi, kemudian mengelompokkan unit-unit analisis tersebut berdasarkan kesamaannya dalam suatu potensi perkembangan tertentu. Seperti telah diuraikan pada subbab sebelumnya terdapat dua aspek yang ditinjau dalam analisis ini, yaitu potensi fisik dasar dan potensi sosial ekonomi.

Peninjauan terhadap potensi fisik dasar menggunakan dua kriteria, yaitu kriteria kemiringan lahan dan penggunaan tanah. Wilayah-wilayah homogen berdasarkan kedua kriteria tersebut masing-masing dapat dilihat pada Gambar 4.5, dan Gambar 4.6. Potensi dan pembatas fisik dasar ini kemudian menjadi pertimbangan dalam perwilayahan dan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya setelah perwilayahan.

Seperti telah diuraikan pada subbab 4.2.1, bahwa untuk melihat faktor-faktor yang mendasari perkembangan wilayah di Provinsi Gorontalo adalah menggunakan analisis faktor, dengan 18 variabel dan 376 unit observasi. Metoda analisis faktor dipergunakan untuk memperoleh faktor-faktor perkembangan dilakukan atas anggapan bahwa faktor dapat dideskripsikan dari sejumlah variabel yang memiliki kesamaan karakter.

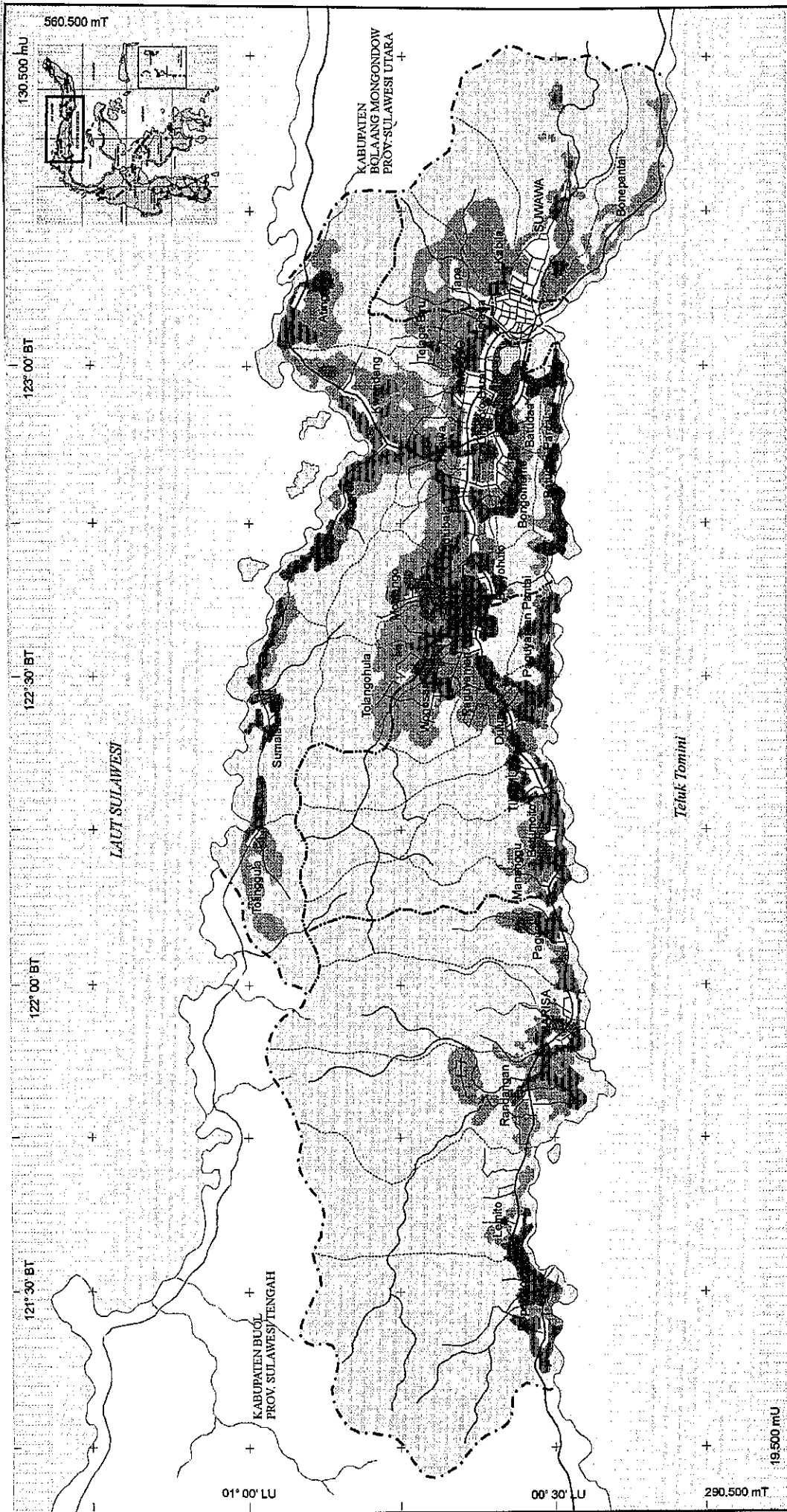
Penggunaan pendekatan dengan analisis faktor, didasarkan pada kemampuannya untuk mengungkapkan karakter tersamar yang dimiliki oleh unit-unit observasi dari jumlah variabel yang besar dan karakter tersamar tersebut merupakan faktor-faktor utama yang berdimensi baru. Jumlah faktor utama tersebut lebih kecil dari jumlah variabel, tetapi nilai informasinya dapat mewakili keseluruhan jumlah variabel yang diamati. Adapun dimensinya dapat diinterpretasikan melalui besarnya kontribusi tiap variabel. Dengan demikian, metoda ini sangat berguna untuk memahami hubungan antara variabel-variabel,

dan mampu mengungkapkan karakter tersamar melalui faktor yang jumlahnya lebih kecil. Disamping itu metoda pendekatan ini juga dapat menunjukkan urutan nilai yang dimiliki oleh setiap kasus pada masing-masing faktor.

Seluruh perhitungan Analisis Faktor dalam studi ini dilakukan dengan bantuan *personal computer* (PC) menggunakan paket program SPSS for windows versi 11.0. Tahapan yang dilakukan dalam perhitungan dengan metoda Analisis Faktor, dapat disebutkan sebagai berikut:

- Penyusunan matrik data dasar
- Penyusunan matriks korelasi
- Proses ekstraksi faktor yang dilakukan dengan metoda *Principal Component Analysis* (PCA).
- Rotasi faktor, menggunakan metoda Ortogonal Varimax with Kaiser Normalization.
- Penilaian faktor utama.

Dalam melakukan interpretasi, variabel yang diperhitungkan hanyalah variabel yang signifikan. Menurut Richard (1976: 276, dalam Simamora, 1987:100). variabel yang signifikan adalah variabel yang harga mutlak faktor loadingnya lebih besar 0,5. Sedang menurut Dillon, dalam banyak hal dengan kasus dibawah 100, suatu variabel dikatakan signifikan jika harga mutlak faktor loadingnya diatas 0,3 (Dillon dan Goldstein, 1984 : 69). Adapun Risfan Munir (1981 : 108) dalam studinya menetapkan harga 0,5 sebagai batas signifikansi. Sementara itu Agung Sugiri (1990: 75) dalam studinya dengan 206 unit observasi, menetapkan harga 0,455 (yang jika dibulatkan, menjadi 0,5) adalah signifikan. Untuk itu dalam studi ini ditetapkan harga mutlak loadingnya 0,5 sebagai batas signifikansi.



UTARA	NO. PETA	HALAMAN
	4.5	114
SUMBER		
BAPPEDA Provinsi Gorontalo		

LEGENDA

	Batas Provinsi		Danau
	Batas Kabupaten		Permukiman / Pekarangan
	Batas Kecamatan		Sawah
	Jalan Negara		Kebun Campuran
	Jalan Provinsi		Tegalan, Semak
	Jalan Kabupaten		Hutan
	Sungai / Anak Sungai		
	Ibukota Kabupaten		
	Ibukota Kecamatan		

MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN
SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH
PROVINSI GORONTALO

P E T A

PENGUNAAN LAHAN PROVINSI GORONTALO

Dari hasil perhitungan yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang ditinjau dalam analisis faktor setelah diekstraksi menjadi 5 (lima) faktor. Faktor loading hasil rotasi dapat dilihat pada Tabel IV.9, sedang proses analisis faktor secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran C. Kelima faktor tersebut dianggap sebagai faktor yang mendasari perkembangan wilayah di Provinsi Gorontalo. Hasil rotasi faktor loading akan memudahkan interpretasi faktor-faktor tersebut.

TABEL IV.9
NILAI FAKTOR LOADING SETELAH ROTASI

No	Variabel	Faktor I	Faktor II	Faktor III	Faktor IV	Faktor V
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk	0,388	0,661	0,186	0,323	0,186
2	Kepadatan Penduduk	0,854	- 0,035	0,034	0,045	0,027
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Primer	- 0,209	0,928	- 0,013	- 0,038	- 0,035
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Sekunder	0,885	0,108	- 0,058	0,084	- 0,082
5	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Tersier	0,924	0,125	0,107	0,197	0,020
6	Jumlah Tenaga Kerja Semua Sektor	0,251	0,928	0,021	0,039	- 0,057
7	Luas Lahan Pertanian	- 0,387	0,189	- 0,067	- 0,021	0,546
8	Proporsi Luas Lahan Pertanian	0,143	- 0,040	0,067	0,021	0,843
9	Fasilitas Kesehatan	0,483	0,123	0,476	0,290	- 0,069
10	Fasilitas Pendidikan	0,487	0,350	0,274	0,429	0,045
11	Fasilitas perdag. / Toko	0,351	0,278	0,449	0,513	0,059
12	Fasilitas Perdag. / Pasar	- 0,173	0,139	0,125	0,629	- 0,240
13	Bank Umum, BPR, KUD	0,237	0,045	0,337	0,676	0,081
14	Kantor Pos	0,046	- 0,038	0,598	0,205	0,042
15	Fasilitas Telepon	0,927	0,028	0,120	0,052	0,032
16	Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota	0,057	- 0,080	0,795	- 0,201	0,046
17	Kantor Pemerintahan Kecamatan	- 0,016	0,188	0,696	0,163	- 0,085
18	Terminal	0,133	- 0,080	- 0,110	0,697	0,092
	Total Variansi (%)	24,252	13,961	12,182	11,835	6,348
	% Kumulatif	24,252	38,213	50,395	62,229	68,577
	Eigen Value	5,656	2,427	1,889	1,251	1,121

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (Lampiran C)

Dari kelima faktor tersamar (*common faktor*) tersebut ternyata dapat menerangkan 68,58% dari total variansi. Interpretasi terhadap kelima faktor dasar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Faktor I

Faktor I merupakan faktor dominan yang mewakili 24,25% variansi total data, terdiri dari 6 (enam) variabel yang semuanya memiliki loading positif, yaitu :

1. Kepadatan Penduduk (0,854)
2. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Sekunder (0,885)
3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Tersier (0,924)
4. Fasilitas Kesehatan yang terdiri dari Sarana dan Tenaga Kesehatan (0,483)
5. Fasilitas Pendidikan (0,487)
6. Fasilitas Telepon (0,927)

Faktor I ini dapat disebut sebagai potensi penduduk, tenaga kerja perkotaan dan fasilitas sosial. Jika dilihat dari variabel-variabel yang dominan adalah fasilitas telepon (0,927), tenaga kerja sektor tersier (0,924), tenaga kerja sektor sekunder (0,885), kepadatan penduduk (0,854), fasilitas pendidikan (0,487) dan fasilitas kesehatan (0,483). Faktor ini adalah yang paling berpengaruh, karena menerangkan 24,25% dari total variansi.

B. Faktor II

Faktor II merupakan faktor dominan yang mewakili 13,96% variansi total data, terdiri dari 3 (tiga) variabel yang ketiga-tiganya memiliki loading positif, yaitu :

1. Jumlah Penduduk (0,661)
2. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Primer (0,928)
3. Jumlah tenaga kerja semua sektor (0,928)

Faktor II dapat disebut sebagai potensi jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja pedesaan. Jika dilihat variabel-variabel yang paling dominan adalah jumlah tenaga kerja sektor primer dan jumlah tenaga kerja semua sektor yang memiliki loading yang sama (0,928).

C. Faktor III

Faktor III merupakan faktor dominan mewakili 12,182% variansi total data, terdiri dari 3 (tiga) variabel yang ketiga-tiganya memiliki loading positif, yaitu :

1. Kantor Pos (0,589)
2. Kantor Kabupaten / Kota (0,795)
3. Kantor Kecamatan (0,696)

Dengan melihat variabel yang dominan, maka Faktor III dapat disebut sebagai potensi pelayanan administrasi pemerintahan. Jika dilihat dari ketiga variabel tersebut yang dominan adalah Kantor Kabupaten / Kota (0,795).

D. Faktor IV

Faktor IV merupakan faktor dominan mewakili 11,84% variansi total data, terdiri dari 4 (empat) variabel yang semuanya memiliki loading positif, yaitu :

1. Fasilitas perdagangan / toko (0,513)
2. Fasilitas Perdagangan / pasar (0,629)
3. Bank Umum, BPR dan KUD (0,676)
4. Terminal (0,697)

Faktor IV ini dapat disebut sebagai potensi pelayanan ekonomi dan transportasi. Jika dilihat keempat variabel tersebut yang dominan adalah terminal (0,697) dan bank umum, BPR, KUD (0,676).

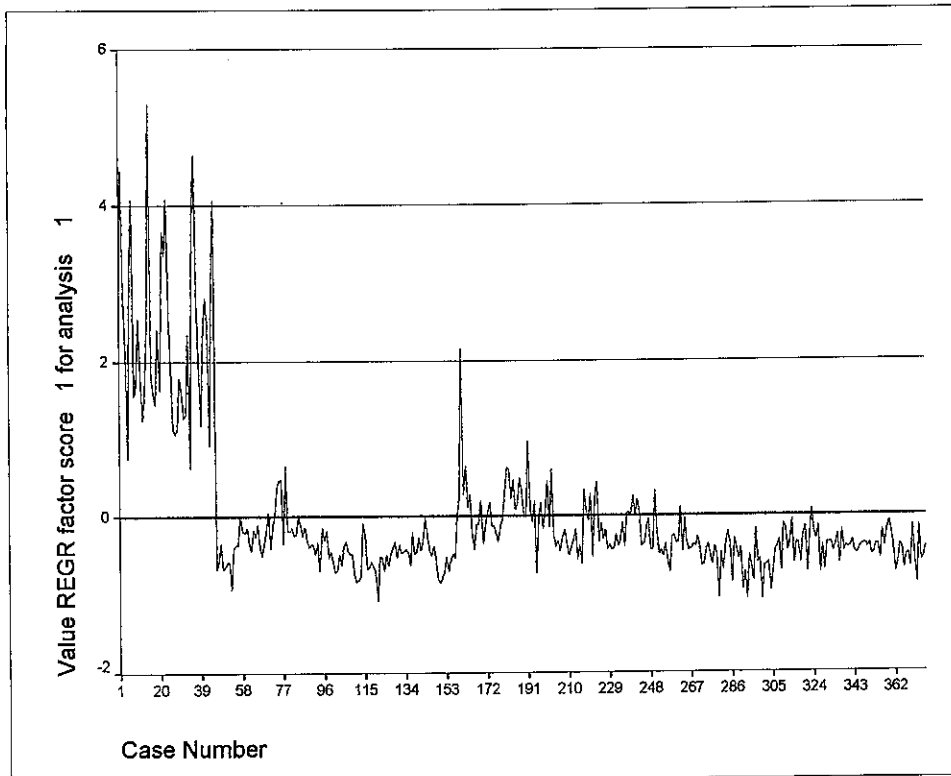
E. Faktor V

Faktor V merupakan faktor dominan yang mewakili 6,35% variansi total data, terdiri dari 2 (dua) variabel yang kedua-duanya memiliki loading positif, yaitu :

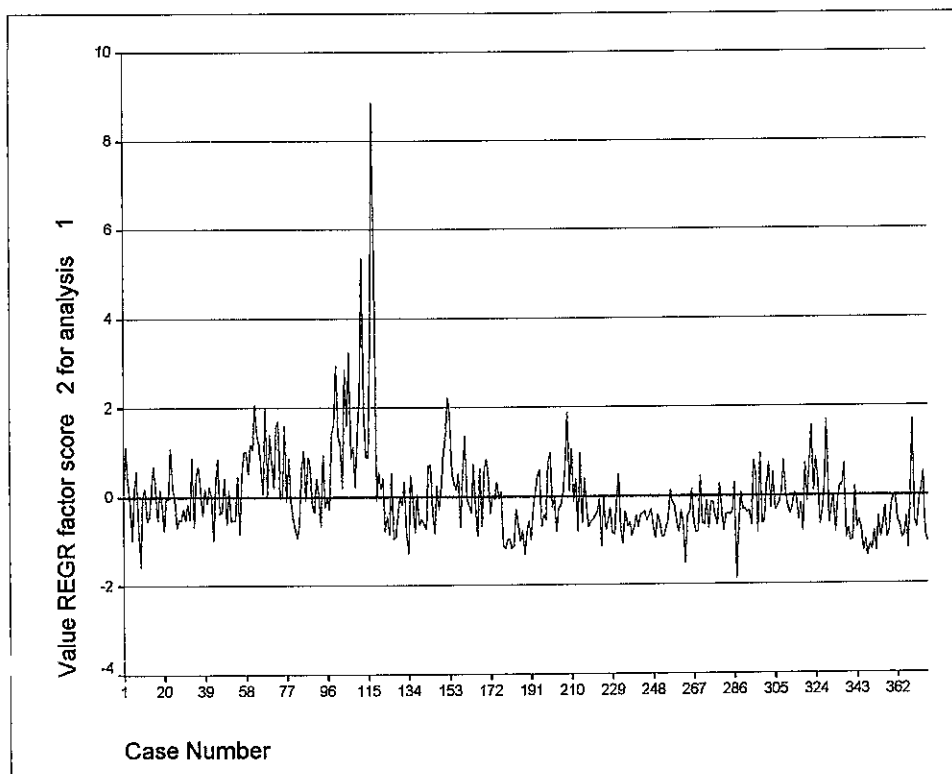
1. Luas Lahan Pertanian (0,546)
2. Proporsi Luas Lahan Pertanian (0,843)

Melihat kedua variabel dominan tersebut, maka Faktor V ini dapat disebut sebagai faktor potensi pertanian.

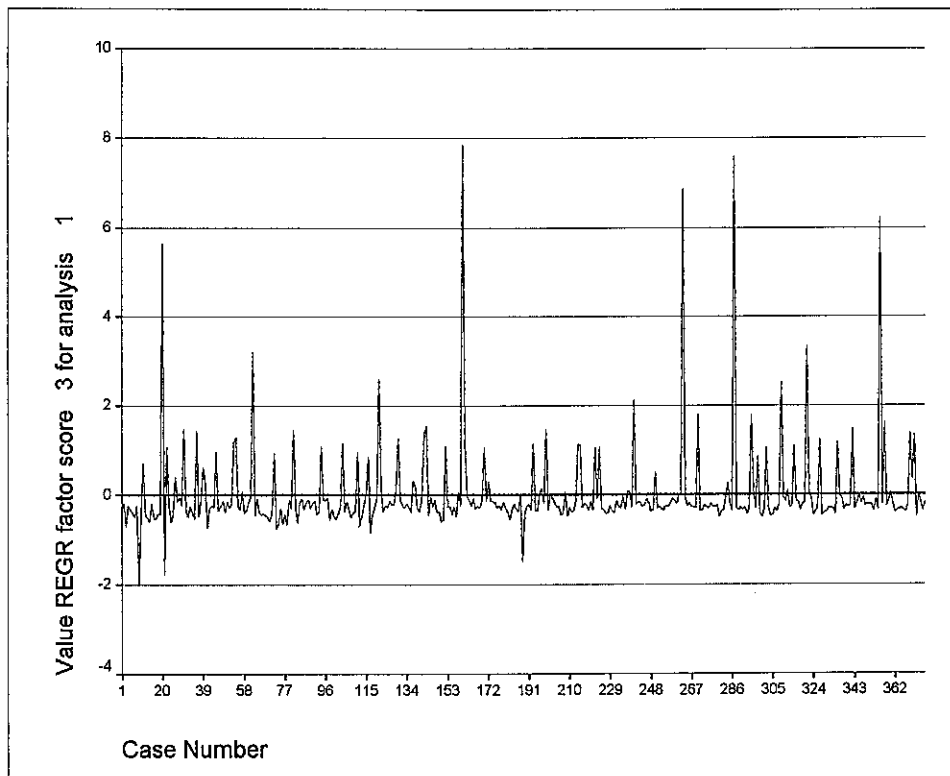
Nilai skor faktor untuk tiap-tiap unit observasi yaitu desa/kelurahan di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel C.10 (Lampiran C). Sedang pola dari masing-masing faktor dasar tersebut diatas digambarkan dalam bentuk grafik skor faktor, seperti dapat dilihat pada Gambar 4.7 sampai dengan Gambar 4.11. Nilai skor faktor adalah nilai yang sudah distandarisasikan, dengan nilai rata-rata nol dan sebagian besar akan berkisar antara -1 dan +1. Nilai skor faktor yang lebih kecil dari -1, berarti rendah sedang yang lebih besar +1 berarti tinggi. Dilihat dari gambar grafik pola dari masing-masing faktor dasar tersebut, pada umumnya pola faktor-faktor potensi perkembangan di Provinsi Gorontalo menunjukkan heterogenitas desa-desanya.



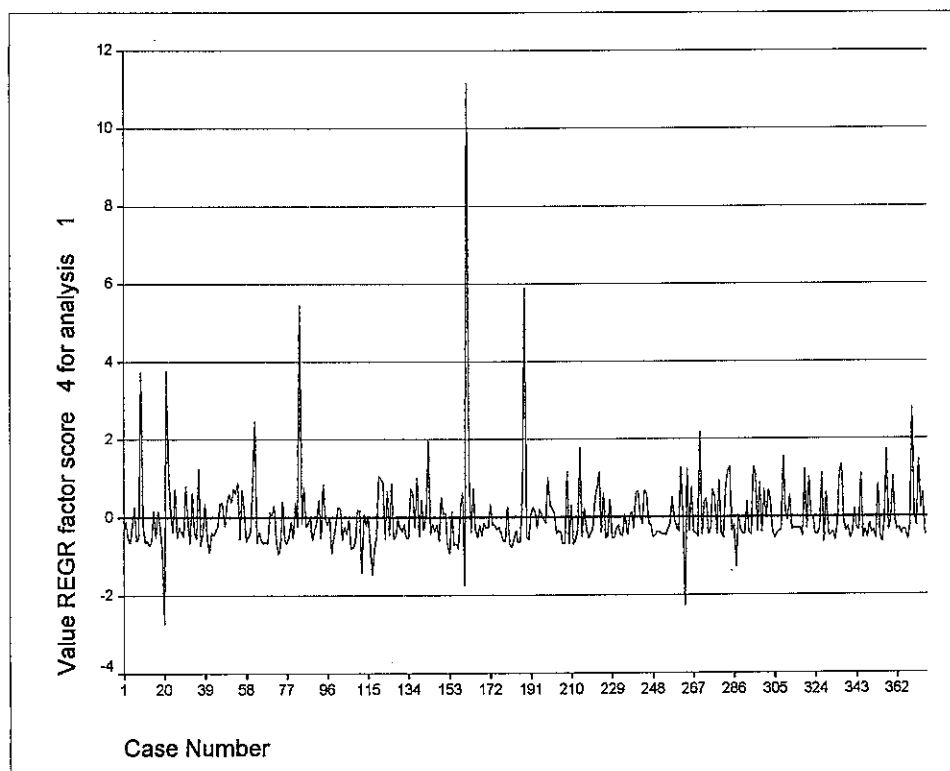
GAMBAR 4.7
GRAFIK POLA FAKTOR I
Sumber : Hasil analisis studi,2004 (Lampiran C)



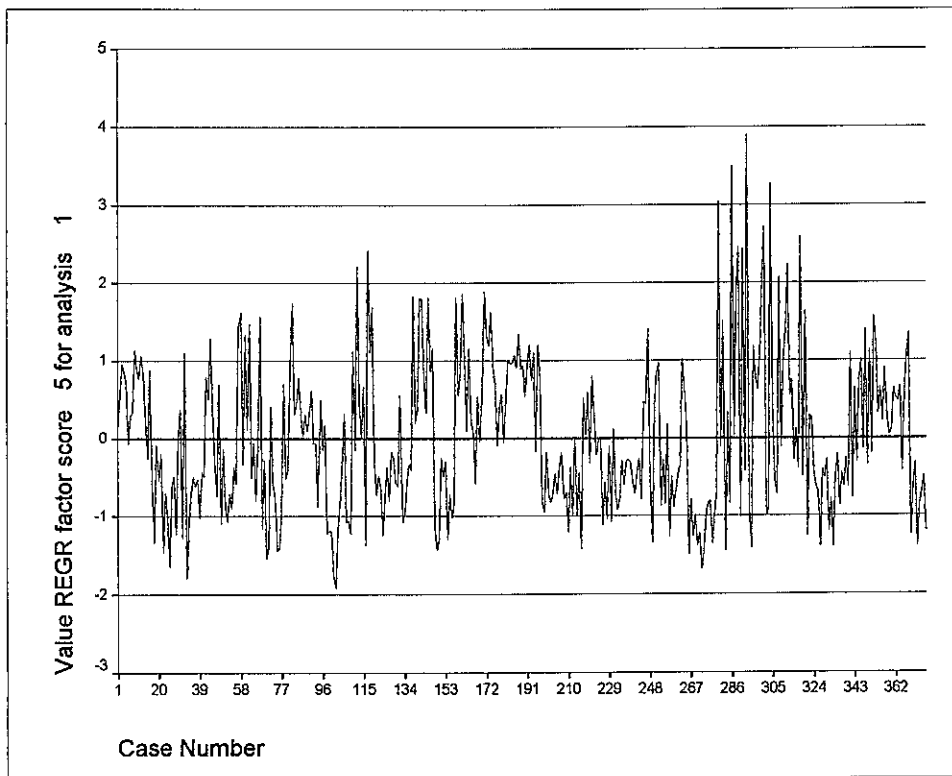
GAMBAR 4.8
GRAFIK POLA FAKTOR II
Sumber : Hasil analisis studi,2004 (Lampiran C)



GAMBAR 4.9
GRAFIK POLA FAKTOR III
Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (Lampiran C)



GAMBAR 4.10
GRAFIK POLA FAKTOR IV
Sumber: Hasil analisis studi, 2004 (Lampiran C)



GAMBAR 4.11
GRAFIK POLA FAKTOR V
Sumber Hasil analisis studi, 2004 (Lampiran C)

4.2.4 Pengelompokan Desa-desa di Provinsi Gorontalo berdasarkan Potensi

Berdasarkan interpretasi terhadap kelima faktor loading yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, selanjutnya dilakukan kombinasi antara dua faktor dengan menggunakan scatter plot untuk mengetahui potensi pada masing-masing desa dengan menggunakan nilai skor faktor. Untuk dapat melihat potensi perkembangan desa-desa/kelurahan di Provinsi Gorontalo, potensi yang akan dilihat meliputi dua aspek utama dalam pengembangan wilayah, yaitu potensi sebagai hinterland dan potensi pusat pelayanan.

Potensi sebagai pusat pelayanan yang ditinjau meliputi dua aspek, yaitu potensi pusat pelayanan sosial dan administratif dengan mengkombinasikan faktor I (potensi penduduk, tenaga kerja perkotaan dan fasilitas sosial) dengan faktor III (potensi pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan pos), dan potensi pusat pelayanan ekonomi yang didapat dari kombinasi faktor I dan faktor IV (potensi pelayanan ekonomi dan transportasi). Potensi sebagai hinterland yang ditinjau adalah potensi sosial hinterland yang didapat dari mengkombinasikan faktor I (potensi pelayanan sosial dan tenaga kerja perkotaan) dengan faktor II (potensi tenaga kerja pedesaan dan jumlah seluruh tenaga kerja) dan potensi ekonomi hinterland yang didapat dari kombinasi faktor II dan faktor V (potensi pertanian).

4.2.4.1 Potensi Pusat Pelayanan Sosial dan Administratif

Berdasarkan potensi pusat pelayanan sosial dan administratifnya desa-desa / kelurahan di Provinsi Gorontalo terbagi dalam empat kelompok. Hal ini adalah berdasarkan pembagian kuadran dari kombinasi faktor I (potensi kegiatan perkotaan dan pelayanan sosial) dengan faktor III (potensi pelayanan administratif kabupaten/kota dan kecamatan). Adapun kriteria pengelompokan desa-desa berdasarkan potensi pusat pelayanan sosial dan administratif dapat dilihat pada Tabel IV.10. berikut.

TABEL IV.10
KRITERIA DESA BERDASARKAN POTENSI
PUSAT PELAYANAN SOSIAL DAN ADMINISTRATIF

Kuadran	Faktor I	Faktor III	Potensi
I	+	+	Pelayanan sosial yang ada baik yang didukung oleh kegiatan perkotaan dan pelayanan administratif yang baik
II	+	-	Pelayanan sosial yang ada baik dan didukung oleh kegiatan perkotaan namun pelayanan administratif rendah
III	-	-	Tidak didukung baik oleh pelayanan sosial dan kegiatan perkotaan maupun pelayanan administratif.
IV	-	+	Pelayanan administratif baik, namun pelayanan sosial yang ada rendah dan tidak didukung oleh kegiatan perkotaan

Sumber : Hasil snalisis studi, 2004

Dilihat dari plotting dalam grafik scatter terlihat pola faktor I kecuali kelurahan-kelurahan di Kota Gorontalo, intervalnya relatif kecil untuk keseluruhan desa-desa di Provinsi Gorontalo, maka faktor III akan lebih berperan dalam kombinasi ini. Dengan demikian desa-desa / kelurahan yang mempunyai potensi pusat pelayanan sosial dan administratif adalah desa-desa / kelurahan pada kuadran I dan II (mempunyai skor faktor positif untuk faktor III).

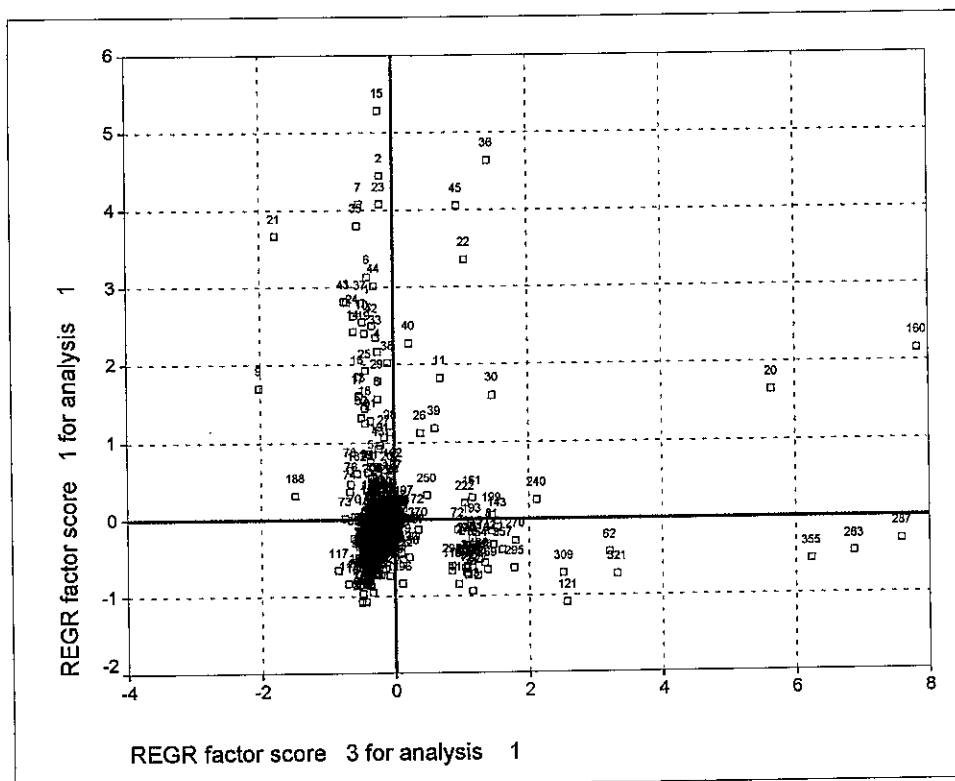
Pada kuadran I terlihat terdapat beberapa desa / kelurahan yang menonjol, yaitu Kelurahan Biawao (20) dan Kelurahan Hunggaluwa (160) yang masing-masing merupakan kelurahan tempat kedudukan ibukota Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, dengan demikian kelurahan ini mempunyai potensi sebagai pusat pelayanan sosial dan administratif yang baik. Selain itu terdapat tiga kelurahan yang juga menonjol dan membentuk kluster tersendiri, yaitu Dulomo Selatan (11), Limba U I (22), Pilolodaa (26), Buladu (30), Ipilo (36), Moodu (39), Heledulaa Selatan (40), Tomulabutao (45),

Kayubulan (161), Tuladenggi (199), Talulobutu (222), Oluhuta (240) dan Toto Utara (250), dari kluster tersebut pada umumnya merupakan ibukota kecamatan.

Desa-desa pada kuadran II juga terlihat beberapa desa yang cukup menonjol yang membentuk beberapa kluster. Kluster pertama yang menyendiri terdiri dari tiga desa yaitu Boludawa (263), Limbato (287), dan Marisa Selatan (355), yang ketiga-tiganya merupakan kedudukan ibukota kabupaten.. Kluster kedua terdiri dari empat desa yaitu Payungga (62), Bulontio Barat (121), Molombulahe (309) dan Makmur (321), kluster ini juga merupakan ibukota kecamatan. Baik kluster pertama maupun kluster kedua tersebut walaupun tingkat kegiatan perkotaannya relatif masih rendah (nilai faktor I negatif), tetapi dapat dikatakan memiliki potensi pusat pelayanan sosial dan adminisratif yang baik

Desa-desa lainnya yang termasuk dalam kuadran I dapat diartikan sebagai desa-desa / kelurahan mempunyai potensi baik sebagai pusat pelayanan administratif (faktor III) ditunjang oleh potensinya dalam kegiatan perkotaan dan pelayanan sosial (faktor I). Desa-desa / kelurahan pada kuadran II adalah desa-desa / kelurahan yang mempunyai potensi dalam pelayanan administratif tetapi kurang ditunjang oleh kegiatan perkotaan dan pelayanan sosial yang baik. Sebaliknya adalah desa-desa / kelurahan pada kuadran IV, tingkat pelayanan administratifnya relatif rendah, meskipun tingkat kekotaan dan pelayanan sosialnya baik. Sedang desa-desa / kelurahan pada kuadran III kurang baik potensinya pada kedua faktor tersebut.

Daftar desa-desa/kelurahan pada masing-masing kuadran disajikan pada Tabel C.1 Lampiran C, sedang plotting kombinasi skor faktor I dengan III dalam grafik scatter dapat dilihat pada Gambar 4.12.



GAMBAR 4.12
PLOTTING KOMBINASI FAKTOR I DAN FAKTOR III

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (Lampiran C)

4.2.4.2 Potensi Pusat Pelayanan Ekonomi

Seperti halnya pada kombinasi faktor I dan Faktor III, potensi pusat pelayanan ekonomi dicerminkan dari kombinasi faktor I dan faktor IV. Kombinasi faktor I dengan faktor IV ini lebih dipengaruhi oleh faktor IV, karena relatif homogenya faktor faktor I untuk seluruh desa-desa di Provinsi Gorontalo, kecuali kelurahan-kelurahan di Kota Gorontalo. Dengan demikian desa-desa / kelurahan yang termasuk pada kuadran I dan II mempunyai potensi yang baik sebagai pusat pelayanan ekonomi, karena mempunyai skor faktor positif untuk faktor IV. Adapun kriteria pengelompokkan desa-desa berdasarkan potensi pusat pelayanan ekonomi dapat dilihat pada Tabel IV.11.

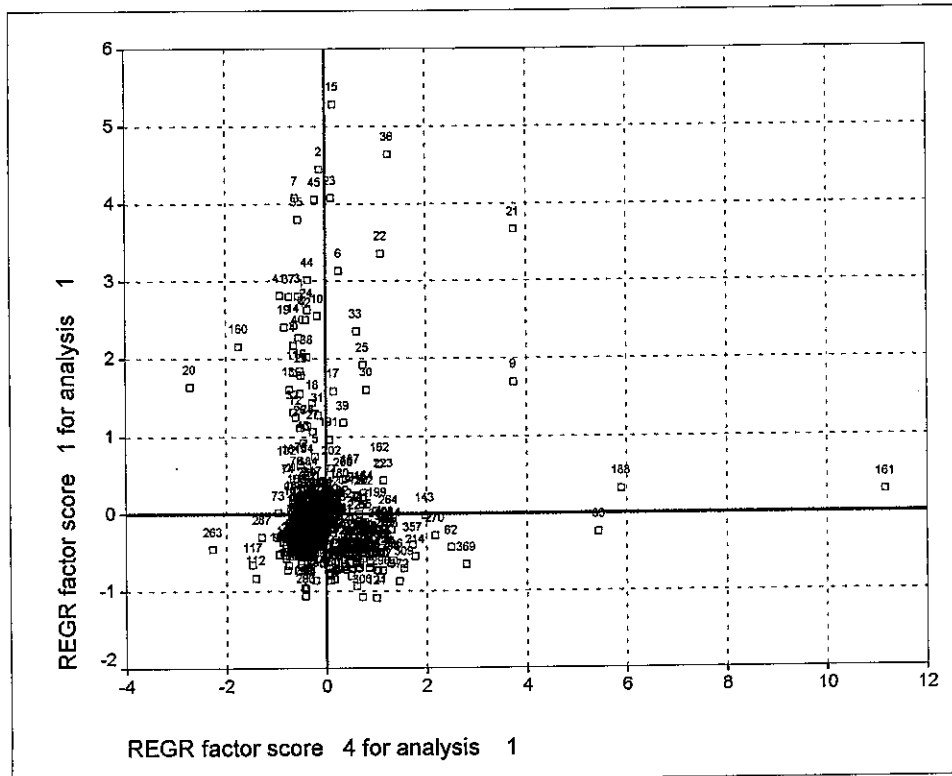
TABEL IV.11
KRITERIA DESA BERDASARKAN
POTENSI PUSAT PELAYANAN EKONOMI

Kuadran	Faktor I	Faktor IV	Potensi
I	+	+	Pelayanan ekonomi yang ada baik dan didukung oleh kegiatan perkotaan
II	+	-	Memiliki potensi kegiatan perkotaan namun pelayanan ekonominya rendah
III	-	-	Tidak didukung baik oleh pelayanan ekonomi yang baik maupun kegiatan perkotaan.
IV	-	+	Pelayanan ekonomi baik, namun tidak didukung oleh kegiatan perkotaan

Sumber : Hasil analisis studi, 2004

Desa-desa yang kelihatan menonjol dan membentuk kluster sendiri diluar kluster utamanya antara lain adalah Liluwo (6), Tapa (9), Tenda (15), Siendeng (17), Limba B (21), Limba U I (22), Limba U II (23), Lekobalo (25), Buladu (30), Ipilo (36) dan Moodu (39). Selain itu ada dua desa yang menonjol yang berada diluar kluster yang ada yaitu Kayubulan (161) dan Bulila (188).

Desa-desa / kelurahan lainnya yang termasuk dalam kuadran I dapat diartikan sebagai desa-desa / kelurahan yang mempunyai potensi baik sebagai pusat pelayanan ekonomi (faktor IV) ditunjang oleh potensinya dalam kegiatan perkotaan dan pelayanan sosial (faktor I). Desa-desa / kelurahan pada kuadran II adalah desa-desa / kelurahan yang mempunyai potensi dalam pelayanan ekonomi tetapi kurang ditunjang oleh kegiatan perkotaan dan pelayanan sosial yang baik. Sebaliknya adalah desa-desa / kelurahan pada kuadran IV, tingkat pelayanan ekonominya relatif rendah, meskipun tingkat kekotaan dan pelayanan sosialnya baik. Sedang desa-desa / kelurahan pada kuadran III kurang baik potensinya pada kedua faktor tersebut. Daftar desa-desa/kelurahan pada masing-masing kuadran disajikan pada Tabel C.2 Lampiran C, sedang plotting kombinasi skor faktor I dengan IV dalam grafik scatter dapat dilihat pada Gambar 4.13.



GAMBAR 4.13
PLOTTING KOMBINASI FAKTOR I DAN FAKTOR IV
Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (Lampiran C)

4.2.4.3 Potensi Sosial Hinterland

Potensi sosial sebagai hinterland dapat tercermin dari kombinasi faktor II (potensi jumlah penduduk, tenaga kerja pedesaan dan jumlah seluruh tenaga kerja) dengan faktor III (potensi pelayanan sosial dan administratif). Adapun kriteria pengelompokkan desa-desa berdasarkan potensi pusat pelayanan ekonomi dapat dilihat pada Tabel IV.12 berikut.

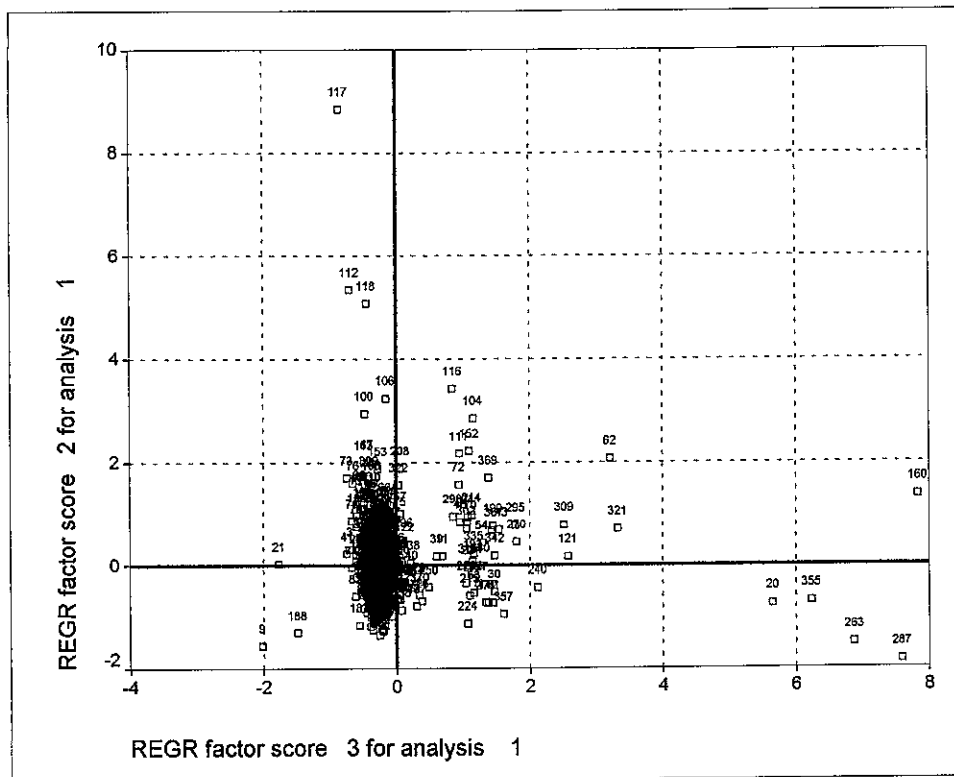
TABEL IV.12
KRITERIA DESA BERDASARKAN
POTENSI PUSAT SOSIAL SEBAGAI HINTERLAND

Kuadran	Faktor II	Faktor III	Potensi
I	+	+	Memiliki potensi pelayanan sosial yang baik dan didukung oleh kegiatan pedesaan
II	+	-	Memiliki potensi kegiatan pedesaan yang baik namun potensi pelayanan sosialnya rendah
III	-	-	Tidak didukung baik oleh pelayanan sosial yang baik maupun kegiatan pedesaan.
IV	-	+	Memiliki pelayanan sosial baik, namun tidak didukung oleh kegiatan pedesaan.

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (lampiran C)

Desa-desa / kelurahan yang termasuk dalam kuadran I dapat diartikan sebagai desa-desa / kelurahan yang mempunyai potensi sosial hinterland yang baik. Desa-desa / kelurahan pada kuadran II adalah desa-desa / kelurahan yang mempunyai potensi dalam pelayanan sosial dan administratif tetapi kurang ditunjang oleh jumlah penduduk dan tenaga kerja pedesaan. Sebaliknya adalah desa-desa / kelurahan pada kuadran IV, tingkat pelayanan sosial dan administratifnya relatif rendah, meskipun potensi penduduk dan tenaga kerja pedesaannya baik. Sedang desa-desa / kelurahan pada kuadran III kurang baik potensinya pada kedua faktor tersebut. Desa-desa / kelurahan yang terletak pada kuadran I pada umumnya berupa ibukota kecamatan, sedang desa-desa pada kuadran II beberapa diantaranya juga merupakan ibukota kecamatan.

Daftar desa-desa/kelurahan pada masing-masing kuadran disajikan pada Tabel C.3 Lampiran C, sedang plotting kombinasi skor faktor II dengan faktor III dalam grafik scatter dapat dilihat pada Gambar 4.14.



GAMBAR 4.14
PLOTTING KOMBINASI FAKTOR II DAN FAKTOR III

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (Lampiran C)

4.2.4.4 Potensi Ekonomi Hinterland

Kombinasi dari faktor II (potensi jumlah penduduk, tenaga kerja pedesaan dan jumlah seluruh tenaga kerja) dengan faktor V (potensi pertanian) mencerminkan potensi ekonomi desa-desa sebagai hinterland. Adapun kriteria pengelompokkan desa-desa berdasarkan potensi ekonomi sebagai hinterland dapat dilihat pada Tabel IV.13 berikut.

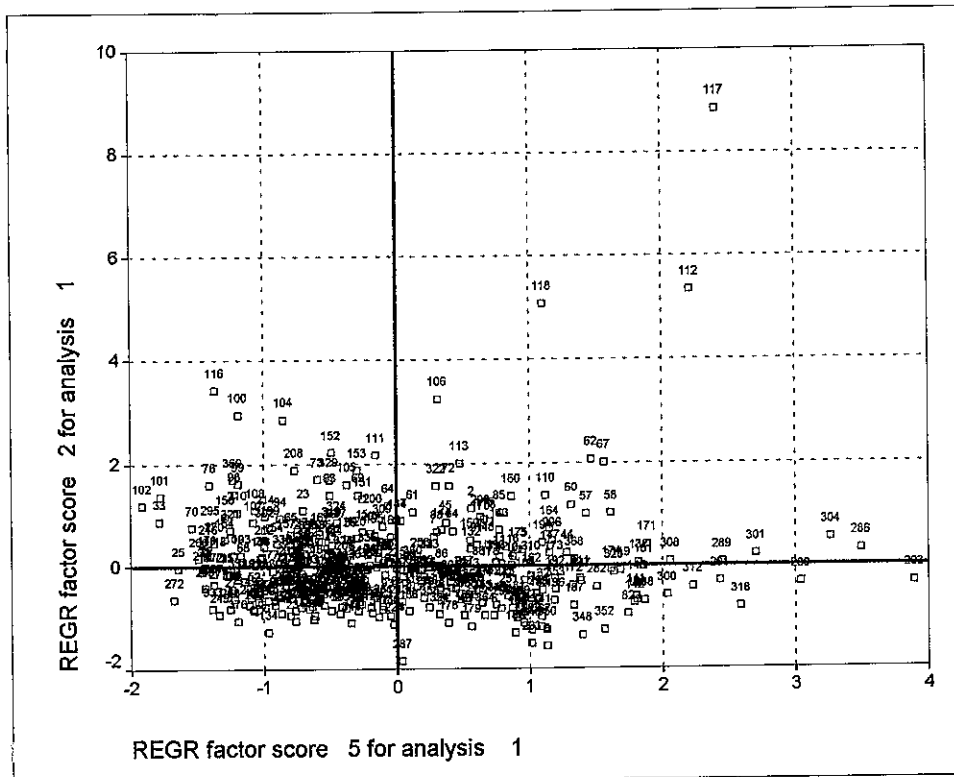
TABEL IV.13
KRITERIA DESA BERDASARKAN
POTENSI EKONOMI SEBAGAI HINTERLAND

Kuadran	Faktor II	Faktor V	Keterangan
I	+	+	Memiliki potensi pertanian baik dan didukung oleh tenaga kerja sektor primer yang baik
II	+	-	Memiliki potensi tenaga kerja sektor primer baik namun tidak memiliki potensi pertanian
III	-	-	Tidak didukung baik oleh potensi pertanian yang baik maupun tenaga kerja sektor pertanian.
IV	-	+	Potensi pertanian yang baik, namun tidak didukung oleh tenaga kerja sektor primer baik

Sumber : Hasil analisis studi, 2004

Desa-desa yang berada pada kuadran I dapat diartikan mempunyai potensi ekonomi yang baik sebagai hinterland. Terdapat beberapa desa yang lebih menonjol pada faktor V (potensi pertanian) dibanding faktor II, yaitu antara lain Pololiyanga (286), Tangga Jaya (304), Salilama (301), Pentadu Timur (289), Tangkobu (308), Hutabohu (171) dan Leboto (138). Sedang yang terlihat menonjol pada kedua faktor baik faktor II maupun faktor V antara lain adalah Lakeya (117), Helumo (112), dan Bululi (118).

Desa-desa pada kelompok kuadran IV diartikan hanya mempunyai potensi tenaga kerja pedesaan tetapi kurang potensi lahan pertanian. Desa-desa pada kuadran ini dapat berarti pertaniannya lebih bersifat intensif. Sebaliknya desa-desa pada kelompok kuadran II dapat diartikan hanya mempunyai potensi yang baik pada faktor lahan pertanian, tetapi kurang potensi pada tenaga kerja pedesaan. Hal ini dapat diartikan bahwa sifat transisi kekotaan mungkin sudah lebih menonjol pada desa-desa ini sehingga sektor tersier dan sekunder lebih berperan, tetapi sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja yang relatif besar meskipun dengan lahan yang semakin menyempit. Pengelompokan desa-desa pada keempat kuadran dapat dilihat pada Tabel C.3 Lampiran C dan plotting kombinasi skor faktor II dan skor faktor V pada Gambar 4.15.



GAMBAR 4.15
PLOTTING KOMBINASI FAKTOR II DAN FAKTOR V

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (Lampiran C)

Secara keseluruhan hasil analisis perwilayahan homogen dapat dipetakan dalam Gambar 4.17 sampai dengan Gambar 4.20. Secara terperinci, proses analisis faktor dapat dilihat pada Lampiran C. Pada studi ini seluruh proses perhitungan dalam metode analisis faktor dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yang tersedia, yaitu dengan menggunakan *software* SPSS 11.0.

4.2.5 Analisis Sektor-sektor Ekonomi Basis di Provinsi Gorontalo

Dalam menganalisis sektor-sektor ekonomi basis dalam studi ini menggunakan metoda analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan sektor-sektor ekonomi pada tiap pusat-pusat pelayanan, yaitu dengan membandingkan sumbangan sektor-sektor yang ada pada suatu pusat pelayanan terhadap sumbangan sektor yang sama pada tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini provinsi.

Sektor-sektor utama yang diharapkan dapat mendorong dan memperkuat perkembangan wilayahnya, adalah sektor-sektor yang memiliki keunggulan di masing-masing wilayahnya. Keunggulan tersebut antara lain dalam hal peranan sektor terhadap perekonomian wilayahnya. Peranan sektor yang semakin besar akan menunjukkan semakin tingginya potensi sektor tersebut dalam mengembangkan perekonomian wilayah, yang selanjutnya akan memperkuat perkembangan wilayah.

Berdasarkan kelengkapan data yang tersedia, maka variabel yang akan dipergunakan adalah jumlah tenaga kerja pada tiap-tiap sektor ekonomi, yang terdiri dari 9 sektor yaitu sektor primer (pertanian; pertambangan dan galian); sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan/konstruksi); dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan; dan sektor jasa).

Hasil dari analisis LQ ini akan menunjukkan sektor yang berperan secara dominan yang menjadi sektor basis dalam perekonomian wilayah serta menunjukkan ada tidaknya potensi ekspor. Potensi ekspor diartikan sebagai kemampuan yang dapat menjadi aktual ekspor. Suatu wilayah tidak dapat menjadi lebih maju atau kaya hanya dengan memproduksi dan mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, tetapi harus menjual sesuatu kepada yang lainnya untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan. Akibat adanya ekspor dapat memberikan ekonomi dasar untuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Struktur perumusan LQ memberikan nilai lebih besar 1, sama dengan 1 atau lebih kecil 1. Dengan kata lain nilai LQ memberikan indikasi sebagai berikut :

- $LQ > 1$, menyatakan sub daerah bersangkutan mempunyai potensi ekspor dalam kegiatan tertentu (juga sering disebut merupakan ekonomi basis).
- $LQ < 1$, menunjukkan sub-daerah bersangkutan mempunyai kecenderungan impor dari sub-daerah/daerah lain.
- $LQ = 1$, memperlihatkan sub-daerah bersangkutan telah mencukupi dalam kegiatan tertentu (seimbang).

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metoda analisis LQ (pada lampiran C), maka peranan sektor-sektor untuk masing-masing kecamatan di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- Sektor Pertanian, memiliki peran dominan hampir diseluruh kecamatan kecuali di Kota Gorontalo, Limboto, dan Telaga. Nilai LQ sektor ini yang terlihat menonjol adalah di Kecamatan Anggrek (1,368), Mootilango (1,354), Boliyohuto (1,344), dan Tolangohula (1,332). Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar perekonomian di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh sektor pertanian, dan kecamatan-kecamatan yang memiliki nilai yang menonjol tersebut, memiliki peranan sektor pertanian yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Gorontalo.
- Sektor pertambangan dan penggalian, nilai LQ untuk sektor ini merupakan sektor basis dan terlihat menonjol di Kecamatan Marisa (dengan LQ : 5,563); Sumalata (4,199); Batudaa Pantai (3,925); Suwawa (3,534); Bonepantai (2,526); Paguat (2,340); dan Kabila (2,014). Hal ini dapat artikan bahwa pada kecamatan-kecamatan tersebut peranan sektor pertambangan dan penggalian memiliki peranan sebagai sektor basis dan mempunyai proporsi yang cukup besar dibandingkan sektor basis lainnya. Selain

kecamatan-kecamatan tersebut, sektor ini juga merupakan sektor basi di Kecamatan Kwandang (1,443); Telaga (1,426); Bongomeme (1,372); Telaga Biru (1,237); Gorontalo (1,226); Randangan (1,059); dan Kecamatan Atinggola (1,052). Namun demikian pada sektor ini masih terbatas pada kegiatan pertambangan dan penggalian yang berskala kecil yaitu berupa pertambangan rakyat baik emas maupun bahan galian golongan C.

- Sektor industri pengolahan, peranan sektor ini merupakan sektor non basis ($LQ < 1$) di hampir seluruh kecamatan di Provinsi Gorontalo. Sektor industri pengolahan ini mempunyai peranan sebagai sektor basis hanya di Gorontalo yang cukup menonjol dengan $LQ : 5,358$ dan di Kecamatan Mananggu (1,229). Hal ini dapat dikatakan bahwa sektor industri pengolahan masih didominasi peranannya oleh Gorontalo, hal ini tentunya sesuai dengan karakteristik sektor ekonomi / kegiatan perkotaan, sedang di Kecamatan Mananggu sektor ini merupakan kegiatan sektor industri kecil/industri rumah tangga.
- Sektor Listrik, gas dan air bersih, sektor ini memiliki peranan sektor basis hanya di Gorontalo, demikian halnya dengan sektor industri pengolahan, hal ini tentunya sesuai dengan karakteristik sektor ekonomi / kegiatan perkotaan.
- Sektor bangunan/konstruksi, peranan sektor ini merupakan sektor basis hanya di Gorontalo (3,543); Tibawa (1,654); Mananggu (1,938); dan Marisa (1,129).
- Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sebagai sektor tersier, peranan sektor ini merupakan sektor basis di kecamatan yang memiliki potensi kegiatan perkotaan seperti di Gorontalo (3,059); Limboto (1,019); Telaga (1,096); Kabila (1,126); Tilamuta (1,124); Mananggu (1,073); Randangan (1,309); Marisa (1,278); dan Kecamatan Paguat (1,340).

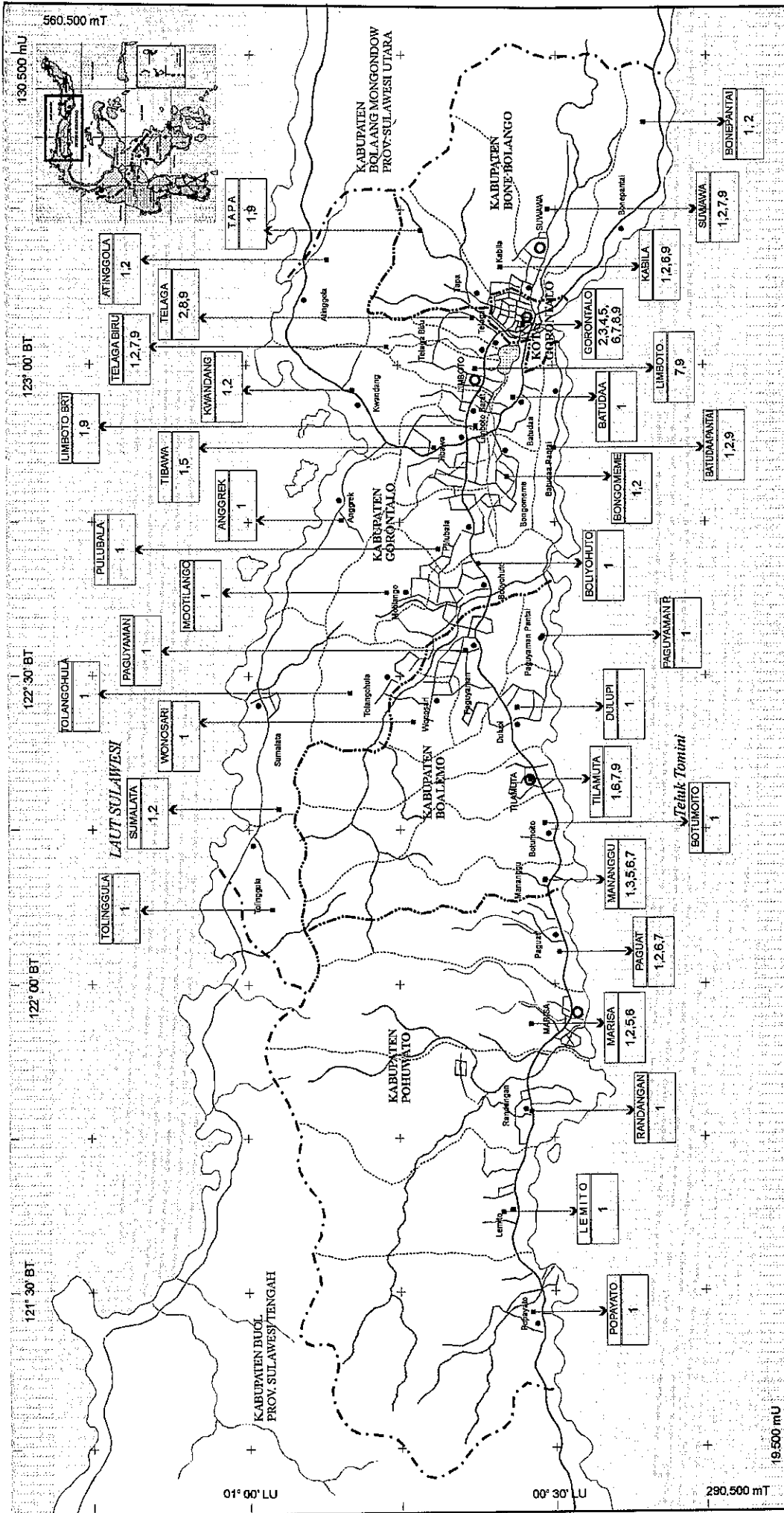
- Sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor ini juga merupakan sektor basis hanya di beberapa kecamatan, yaitu Gorontalo (3,508); Limboto (1,251); Telaga Biru (1,044); Suwawa (1,054); Tilamuta (1,072); Mananggu (1,351); Randangan (1,426) dan Kecamatan Paguat (1,046).
- Sektor keuangan, sektor ini memiliki peranan sektor basis hanya di Gorontalo (4,439) dan Telaga (3,136).
- Sektor jasa, seperti halnya sektor lain sebagai sektor tersier, pada umumnya peranan sektor ini merupakan sektor basis di kecamatan yang memiliki potensi kegiatan perkotaan, yaitu Gorontalo (2,144); Batudaa pantai (1,281); Limboto (2,338); Limboto Barat (1,319); Telaga (1,891); Telaga Biru (1,082); Tapa (1,151); Kabila (1,392); Suwawa (1,143); dan Tilamuta (1,289).

Nilai LQ masing-masing sektor pada masing-masing kecamatan di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel IV.14. dan Gambar 4.16.

TABEL IV.14
NILAI LQ DI MASING-MASING KECAMATAN TERHADAP PROVINSI GORONTALO
MENURUT LAPANGAN USAHA

No	KODE	NAMA WILAYAH	NILAI LQ (SEKTOR)											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	JASA		
			PERTANIAN	PERTAMBANGAN	INDUSTRI	LISTRIK,	BANGUNAN/	PERDAG/	ANGKUTAN	KEUANGAN				
				GALIAN	PENGOLAHAN	GAS & A.B.	KONSTRUKSI	HOTEL, REST	KOMUNIKASI					
1	2													
1	0100	GORONTALO	0.24711	1.22586	5.35843	4.79697	3.54250	3.05943	3.50802	4.43889	2.14423			
2	0600	BATUDAA PANTAI	1.10751	3.92529	0.00000	0.00000	0.00000	0.39950	0.10570	0.00000	1.28107			
3	0700	BATUDAA	1.17943	0.75276	0.00000	0.25292	0.00000	0.64433	0.52746	0.00000	0.65805			
4	0800	BONGOMEME	1.22472	1.37189	0.00000	0.00000	0.98175	0.31530	0.24887	0.00000	0.50689			
5	0900	TIBAWA	1.08961	0.31215	0.00000	0.79063	1.56374	0.70674	0.45725	0.37853	0.93443			
6	1000	PULUBALA	1.21475	0.13018	0.00000	0.00000	0.86456	0.47720	0.30883	0.00000	0.50824			
7	1100	BOLIOHUTO	1.34399	0.16117	0.00000	0.00000	0.16175	0.14987	0.09881	0.05955	0.12233			
8	1200	MOOTILANGO	1.35360	0.15113	0.00000	0.11848	0.16853	0.09206	0.15988	0.00000	0.09041			
9	1300	TOLANGOHULA	1.33165	0.00000	0.00000	0.05218	0.33650	0.15429	0.07042	0.76513	0.16407			
10	1400	SUMALATA	1.14613	4.19852	0.00000	0.58661	0.00000	0.66957	0.51174	0.00000	0.66862			
11	1500	TOLINGGULA	1.23314	0.13072	0.00000	0.00000	0.07774	0.38475	0.13829	0.00000	0.65617			
12	1600	KWANDANG	1.14466	1.44262	0.00000	0.00000	0.00000	0.86732	0.61482	0.00000	0.63970			
13	1700	ANGGREK	1.36825	0.04089	0.00000	0.00000	0.00000	0.06789	0.11273	0.00000	0.06621			
14	1800	LIMBOTO	0.83315	0.25327	0.05110	0.74458	0.31067	1.01884	1.25139	0.62384	2.33841			
15	1900	LIMBOTO BARAT	1.09978	0.22934	0.00000	0.00000	0.01705	0.38943	0.87676	0.00000	1.31986			
16	2000	TELAGA	0.89944	1.42621	0.00000	0.00000	0.71300	1.09641	0.40553	3.13622	1.89099			
17	2100	TELAGA BIRU	1.02187	1.23691	0.00000	1.3223	0.93626	0.93470	1.04360	0.77552	1.08183			
18	2200	ATINGGOLA	1.18194	1.05166	0.00000	0.33882	0.80967	0.40538	0.56529	0.00000	0.66637			
19	2300	TAPA	1.01383	0.80833	0.00000	0.59410	0.98402	0.99349	0.91831	0.00000	1.15071			
20	2400	KABILA	1.00262	2.01369	0.00000	0.00000	0.21839	1.12637	0.20961	0.00000	1.39247			
21	2500	SUWAWA	1.03983	3.53463	0.00000	0.00000	0.31533	0.73167	1.05382	0.00000	1.14276			
22	2600	BONEPANTAI	1.15087	2.52588	0.00000	0.00000	0.00000	0.55421	0.54494	0.00000	0.82167			
23	2700	TILAMUTA	1.00437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.12404	1.07236	0.00000	1.28930			
24	2800	BOTUMOITO	1.26529	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.42861	0.18207	0.00000	0.41893			
25	2900	MANANGGU	1.02564	0.84646	1.22958	0.00000	1.93817	1.07321	1.35137	0.00000	0.51169			
26	3000	DULUPI	1.18389	0.00000	0.00000	0.47251	0.00000	0.37039	0.23186	0.00000	0.97864			
27	3100	PAGUYAMAN	1.09571	0.00000	0.00000	0.61777	0.89825	0.73063	0.69049	0.43133	0.94751			
28	3200	PAGUYAMAN PANTAI	1.25796	0.00000	0.00000	0.00000	0.85645	0.41184	0.00000	0.00000	0.37635			
29	3300	WONOSARI	1.17139	0.00000	0.00000	0.00000	0.99792	0.51331	0.32275	0.00000	0.73961			
30	3400	POPAYATO	1.25493	0.68761	0.91448	0.00000	0.92422	0.25087	0.07936	0.00000	0.30581			
31	3500	LEMITO	1.18179	0.15250	0.95173	0.00000	0.93721	0.70370	0.46934	0.00000	0.31553			
32	3600	RANDANGAN	1.02303	1.05876	0.00000	0.00000	0.00000	1.30890	1.42556	0.00000	0.85718			
33	3700	MARISA	1.00772	5.56371	0.00000	0.00000	1.12875	1.27817	0.44007	0.00000	0.81108			
34	3800	PAGUAT	1.00040	2.34008	0.00000	0.97123	0.10233	1.34011	1.04585	0.47468	0.97328			

Sumber : Hasil analisis studi, 2004 (lampiran D)



MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	TESIS PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO		UTARA	NO. PETA 4.16	HALAMAN 138
	PETA		SUMBER Hasil analisis studi, 2004		
LEGENDA					
	Batas Provinsi			Sektor Pertanian	
	Batas Kabupaten			Sektor Pertambangan dan Galian	
	Batas Kecamatan			Sektor Industri Pengolahan	
	Jalan Negara			Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	
	Jalan Provinsi			Sektor Bangunan / Konstruksi	
	Jalan Kabupaten			Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran	
	Sungai / Anak Sungai			Sektor Angkutan / Komunikasi	
	Ibukota Kabupaten			Sektor Keuangan	
	Ibukota Kecamatan			Sektor Jasa	
	Danuau				
	KECAMATAN Sektor Ekonomi Basis				

4.3 Rangkuman Analisis Perwilayahan Pembangunan sebagai Strategi Pengembangan Wilayah

Analisis perwilayahan pembangunan yang telah dilakukan di atas pada dasarnya adalah berusaha untuk mengenali berbagai karakteristik yang ada di Provinsi Gorontalo, sesuai dengan tujuan studi. Karakteristik-karakteristik tersebut meliputi kriteria fisik dan sosial ekonomi yang kemudian dituangkan dalam bentuk perwilayahan fungsional dan homogen. Karakteristik sosial ekonomi dituangkan dalam sebuah perwilayahan fungsional dan empat pengelompokan desa yang mencakup lima faktor dasar perkembangan dan karakteristik fisik dicerminkan oleh perwilayahan homogen yaitu kemiringan tanah dan penggunaan tanah. Masing-masing karakteristik fisik tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6.

Secara spasial, pengelompokan desa-desa berdasarkan potensi pelayanan sosial dan administratif dapat dilihat pada Gambar 4.18 dan pengelompokan berdasarkan potensi pelayanan ekonomi pada Gambar 4.19. Pengelompokan berdasarkan potensi sosial sebagai hinterland dapat dilihat pada Gambar 4.20 dan Gambar 4.21 pengelompokan berdasarkan potensi ekonomi sebagai hinterland. Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan pada sub-bab sebelumnya, pada sub bab ini akan dirangkum mengenai hasil analisis secara keseluruhan.

4.3.1 Perwilayahan Fungsional

Dari hasil analisis hirarki pusat-pusat pelayanan dan wilayah pengaruh yang telah dilakukan sebelumnya, dari 34 pusat pelayanan yang diidentifikasi ditemukan 6 pusat pelayanan yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo sebagai pusat utama dan 5 sub-wilayah pelayanan. Adapun masing-masing wilayah fungsional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Utama Gorontalo,

Berfungsi sebagai pusat pelayanan hirarki I dan berperan sebagai pusat utama pelayanan wilayah Provinsi Gorontalo, sehingga mempunyai pengaruh pelayanan tertinggi dibandingkan dengan pusat-pusat pelayanan lainnya. Adapun pengaruh pusat pelayanan Gorontalo meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

2. Subwilayah Limboto

Berpusat di Limboto yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kedua (hirarki II) dengan wilayah pengaruh pelayanannya meliputi Batudaa Pantai, Batudaa, Bongomeme, Tibawa, Pulubala, Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula, dan Limboto Barat, Telaga dan Telaga Biru.

3. Subwilayah Marisa

Berpusat di Marisa yang berperan sebagai pusat pelayanan kedua (hirarki II), adapun wilayah pengaruh pelayanannya meliputi Popayato, Lemito, Randangan dan Paguat.

4. Subpusat Tilamuta,

Berpusat di Tilamuta yang juga berfungsi sebagai pusat pelayanan kedua (hirarki II) dengan wilayah pengaruh pelayanannya meliputi Botumoito, Mananggu dan Dulupi.

5. Subwilayah Kabila

Berpusat di Kabila yang merupakan pusat pelayanan kedua (hirarki II) dengan wilayah pengaruh pelayanannya meliputi Tapa, Suwawa dan BonePantai.

6. Subwilayah Kwandang

Berpusat di Kwandang, berstatus sebagai pusat pelayanan kedua (hirarki II) dengan wilayah pengaruh pelayanannya meliputi Sumalata, Tolinggula, Anggrek dan Atinggola.

4.3.2 Potensi Pelayanan dan Kegiatan Perkotaan

Provinsi Gorontalo, berdasarkan potensi pusat pelayanan sosial dan administratifnya terlihat tingkat pengelompokan yang rendah dan relatif menyebar. Wilayah-wilayah yang mempunyai potensi pusat dan menonjol antara lain adalah Biawao, Hunggaluwa. Pengelompokan yang menonjol terjadi di Gorontalo, Limboto dan Kabila, kelompok ini mempunyai potensi kegiatan perkotaan dan pelayanan sosial yang baik.

Berdasarkan potensi pusat pelayanan sosial dan administratif tersebut, terdapat empat kelompok wilayah. Kelompok pertama seperti telah disebutkan diatas, sedang kelompok kedua dapat disebut mempunyai potensi pelayanan sosial dan kegiatan perkotaan namun tidak didukung oleh potensi pelayanan administratif, kelompok ini pada umumnya merupakan desa-desa yang berdekatan dengan ibukota kecamatan. Kelompok ketiga merupakan wilayah yang potensi pelayanan sosial dan administratifnya rendah, mencakup sebagian bagian besar (232 desa) wilayah di Provinsi Gorontalo. Kelompok keempat merupakan wilayah yang mempunyai potensi pelayanan administratif namun tidak didukung dengan potensi pelayanan sosial dan kegiatan perkotaan, kelompok ini meliputi 72 desa.

Berdasarkan potensi pelayanan ekonominya, Provinsi Gorontalo juga dapat dibagi dalam empat kelompok wilayah. Kelompok pertama mempunyai potensi pusat pelayanan ekonomi yang baik, meliputi wilayah timur-selatan terutama wilayah Gorontalo dan Limboto. Kelompok kedua relatif menyebar meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, memiliki potensi kegiatan perkotaan namun tidak didukung potensi pelayanan ekonomi. Kelompok ketiga merupakan wilayah dengan potensi pelayanan ekonomi rendah. Kelompok keempat meliputi 58 desa, merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi, namun tidak didukung potensi kegiatan perkotaan.

4.3.3 Potensi sebagai Hinterland

Berdasarkan potensi sosialnya sebagai hinterland, terlihat menyebar pada seluruh wilayah.. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi sosial sebagai hinterland cukup merata, hal ini dapat diartikan bahwa potensi kegiatan pedesaannya tinggi. Kelompok pertama meliputi 37 desa dengan potensi sosial sebagai hinterland yang baik. Kelompok kedua dapat disebut mempunyai potensi kegiatan pedesaan namun tidak didukung oleh potensi pelayanan sosial, kelompok ini meliputi 35 desa. Kelompok ketiga merupakan wilayah yang potensi sosial sebagai hinterland rendah, mencakup 191 desa di Provinsi Gorontalo. Kelompok keempat merupakan wilayah yang mempunyai potensi pelayanan sosial namun tidak didukung dengan kegiatan pedesaan, kelompok ini meliputi 113 desa.

Seperti halnya kelompok potensi lainnya, berdasarkan potensi ekonominya sebagai hinterland juga terbagi dalam empat kelompok. Hampir semua kelompok potensi ini tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kelompok pertama dapat dikatakan mempunyai potensi ekonomi sebagai hinterland yang sangat baik. Kelompok kedua merupakan wilayah dengan potensi tenaga kerja pedesaan namun tidak didukung dengan potensi lahan pertanian. Kelompok ketiga merupakan wilayah dengan potensi ekonomi sebagai hinterland rendah. Kelompok ketiga ini wilayahnya kurang lebih sama dengan wilayah kelompok kedua, yaitu meliputi 122 desa. Kelompok keempat dapat diartikan mempunyai potensi lahan pertanian namun tidak didukung oleh tenaga kerja pedesaan pertanian, meliputi 90 desa yang menyebar hampir merata di seluruh wilayah.

4.3.4 Perwilayahan Hasil Studi

Pada bagian ini akan dikemukakan suatu sintesis dari hasil-hasil analisis penentuan pusat pelayanan dan potensi perkembangan wilayah tersebut diatas, yaitu berupa perwilayahan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Perwilayahan pembangunan ini

didasarkan pada karakteristik keterkaitan fungsional yang terjadi dan tergambar dari perwilayahan fungsionalnya, dikaitkan dengan kondisi fisik serta potensi sosial ekonomi yang tergambar dari perwilayahan homogenya.

Perwilayahahan pembangunan yang terbentuk berdasarkan gambaran dari hasil analisis sebelumnya, dalam studi ini didapat 5 subwilayah pembangunan, yaitu :

1. Wilayah Pembangunan Limboto

Berpusat di Limboto dengan cakupan wilayah pembangunannya meliputi Batudaa Pantai, Batudaa, Bongomeme, Tibawa, Pulubala, Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula, dan Limboto Barat, Telaga dan Telaga Biru.

Jika ditinjau dari segi karakteristik sosial ekonominya, perkembangan wilayah pengaruh pusat pelayanan Limboto masih didominasi oleh sektor pertanian, dan sebagian kecil lainnya sudah mulai mengalami transformasi menuju sektor tersier yang ditandai dengan perkembangan sektor sekunder. Hal ini terjadi pada desa-desa yang merupakan ibukota kecamatan.

2. Wilayah Pembangunan Marisa

Berpusat di Marisa dengan cakupan wilayah pembangunannya meliputi Popayato, Lemito, Randangan dan Paguat.

Ditinjau dari karakteristik sosial ekonominya, perkembangan wilayah pengaruh pusat pelayanan Marisa masih didominasi oleh sektor pertanian, yang ditandai oleh potensi perkembangan sektor primer.

3. Wilayah Pembangunan Tilamuta

Berpusat di Tilamuta dengan cakupan wilayah pembangunannya meliputi Botumoito, Manangu dan Dulupi.

Jika dilihat dari karakteristik sosial ekonominya, perkembangan wilayah pengaruh pusat pelayanan Tilamuta juga masih didominasi oleh sektor pertanian, yang ditandai oleh perkembangan sektor primer. Khusus untuk Mananggu terlihat sudah mulai mengalami transformasi menuju sektor sekunder yang antara lain ditandai dengan potensi perkembangan sektor industri pengolahan.

4. Wilayah Pembangunan Kabila

Berpusat di Kabila dengan cakupan wilayah pembangunannya meliputi Tapa, Suwawa dan BonePantai.

Seperti halnya dengan sub-wilayah pelayanan lainnya, jika ditinjau dari karakteristik sosial ekonominya, perkembangan wilayah pengaruh pusat pelayanan Kabila juga masih didominasi oleh sektor pertanian.

5. Wilayah Pembangunan Kwandang.

Berpusat di Kwandang dengan cakupan wilayah pembangunannya meliputi Sumalata, Tolinggula, Anggrek dan Atinggola.

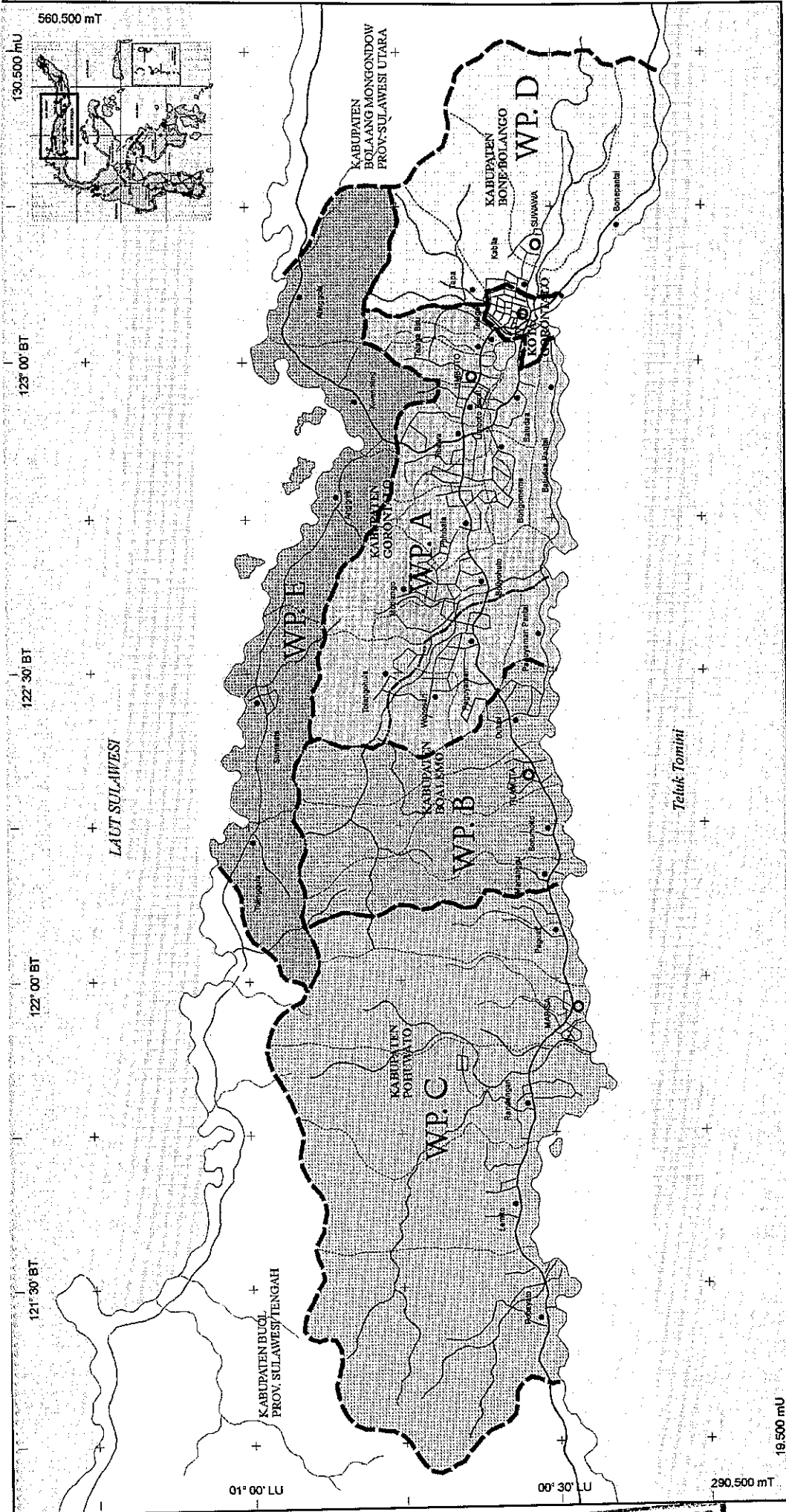
Ditinjau dari segi karakteristik sosial ekonomi seperti halnya dengan sub-wilayah pelayanan lainnya, wilayah pengaruh pusat pelayanan Kwandang masih didominasi oleh sektor pertanian.

Satuan wilayah pembangunan hasil studi dapat dilihat pada Tabel IV.15, dan Deliniasi satuan wilayah pembangunan Provinsi Gorontalo hasil studi dapat dilihat pada Gambar 4.21.

TABEL IV. 15
PERWILAYAHAN EKSTING DAN HASIL STUDI

Pusat Pengembangan Utama	WP Eksisting		WP Hasil Studi		Keterangan
	Pusat Pengembangan	Wilayah Pelayanan	Pusat Pengembangan	Wilayah Pelayanan	
1	2	3	4	5	6
Gorontalo	Limboto	Batudaa Pantai Batudaa Bongomeme Tibawa Pulubala Boliyohuto Mootilango Tolangohula Limboto Limboto Barat Telaga Telaga Biru Tolinggula Sumalata Anggrek Kwandang Atinggola Tapa Kabila Suwawa Bone Pantai	Limboto	Batudaa Pantai Batudaa Bongomeme Tibawa Pulubala Boliyohuto Mootilango Tolangohula Limboto Limboto Barat Telaga Telaga Biru Wonosari Paguyaman Paguyaman-Pantai	(-)Tolinggula Sumalata Anggrek Kwandang Atinggola Tapa Kabila Suwawa Bone Pantai (+)Wonosari Paguyaman Paguyaman-Pantai
	Tilamuta	Botumoito Manangu Tilamuta Dulupi Wonosari Paguyaman Paguyaman-Pantai Popayato Lemito Randangan Marisa Paguat	Tilamuta	Botumoito Manangu Tilamuta Dulupi	(-)Wonosari Paguyaman Paguyaman-Pantai Popayato Lemito Randangan Marisa Paguat
			Marisa	Popayato Lemito Randangan Marisa Paguat	Pembentukan WP baru
			Kabila	Tapa Kabila Suwawa Bone Pantai	Pembentukan WP baru
			Kwandang	Tolinggula Sumalata Anggrek Kwandang Atinggola	Pembentukan WP baru

Sumber : Hasil analisis studi, 2004.



UTARA	NO. PETA	HALAMAN
	4.21	150
SUMBER		
Hasil analisis studi, 2004		

LEGENDA	
	Batas Provinsi
	Batas Kabupaten
	Batas Kecamatan
	Jalan Negara
	Jalan Provinsi
	Jalan Kabupaten
	Sungai / Anak Sungai
	Ibukota Kabupaten
	Ibukota Kecamatan
	Danau
	Pusat Wilayah
	Wilayah Pembangunan (WP) A
	Wilayah Pembangunan (WP) B
	Wilayah Pembangunan (WP) C
	Wilayah Pembangunan (WP) D
	Wilayah Pembangunan (WP) E
	Batas Wilayah Pembangunan (WP)

<p>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>
<p>TESIS</p> <p>PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN SEBAGAI MASUKAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI GORONTALO</p>
<p>PETA</p>
<p>SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN HASIL STUDI</p>

UPT-PUSTAK-UNDIP

4.4 Implikasi Sistem Perwilayahan Hasil Studi terhadap Kebijakan Perwilayahan

4.4.1 Pembahasan Konsep Pendekatan Pengembangan Wilayah, Perwilayahan Eksisting dan Perwilayahan Hasil Studi

Perwilayahan pembangunan sebagai pendekatan dalam pengembangan wilayah antara lain merujuk pada teori tentang kutub pertumbuhan, tempat pusat. Teori-teori tersebut dipergunakan untuk mempercepat perkembangan daerah terbelakang melalui pemusatan investasi dalam suatu daerah tertentu, sehingga terjadi keuntungan ekonomi pada wilayah pengaruh (Hansen, 1972; Richardson, 1976). Kutub-kutub pertumbuhan maupun pusat-pusat pertumbuhan pada hakekatnya adalah sebagai upaya untuk menimbulkan pertumbuhan ke daerah-daerah yang terbelakang atau daerah-daerah yang mengalami kemunduran (Darwent, 1975). Pada dasarnya konsep tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan wilayah melalui kutub atau pusat pertumbuhan, dan selanjutnya diharapkan terjadi dorongan perkembangan ke wilayah sekitarnya, sehingga dapat memperkecil ketidak-seimbangan antardaerah. Dalam hal ini terdapat dua hipotesa yang mendasari (Miller dalam Warsilan, 1993), yaitu: pertama, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dimulai dan mencapai puncaknya pada sejumlah pusat-pusat tertentu; kedua, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dijalarkan dari pusat-pusat pertumbuhan secara kewilayahan melalui jentang pusat-pusat pelayanan ke daerah belakangnya. Dengan demikian agar pendekatan pengembangan wilayah melalui pusat pertumbuhan dapat berjalan sebagaimana diharapkan, maka tiap pertumbuhan harus mempunyai fungsi dan peran yang jelas secara hirarkis dalam sistem pusat pertumbuhannya. Karena tanpa adanya hirarki pusat-pusat pertumbuhan yang jelas sangat sulit diharapkan adanya hubungan timbal balik antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan struktur ruang yang dipergunakan menjadi dasar dalam kebijakan perwilayahan pembangunan yaitu terdiri dari atas Wilayah Pembangunan Utama dan Satuan Wilayah Pembangunan. Provinsi Gorontalo merupakan wilayah pengembangan utama Gorontalo, yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dengan pusat pengembangan di Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi. Adapun satuan wilayah pembangunannya adalah: Satuan Wilayah Pembangunan I, meliputi Kota Gorontalo dan sekitarnya, sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan utama terhadap Provinsi Gorontalo; Satuan Wilayah Pembangunan II, meliputi Kabupaten Gorontalo dan sekitarnya dengan pusat pengembangan di Limboto; Satuan Wilayah Pembangunan III, meliputi Kabupaten Boalemo dan sekitarnya dengan pusat pengembangan di Tilamuta. Deliniasi kebijakan perwilayahan pembangunan di Provinsi Gorontalo tersebut dapat dilihat pada Tabel III.6 dan Gambar 3.5.

Kajian perwilayahan pembangunan yang dilakukan dalam studi ini mendapatkan hasil yang agak berbeda. Berdasarkan hasil analisis perwilayahan pembangunan sebagai strategi pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo yang telah dilakukan dalam studi ini, ditemukan satu pusat pelayanan utama (hirarki I) yaitu Gorontalo dan lima pusat pelayanan yang cenderung atau mempunyai potensi menjadi pusat pelayanan kedua (hirarki II) yaitu pusat pelayanan Limboto, Marisa, Tilamuta, Kabila dan pusat pelayanan Kwandang. Adapun satuan wilayah pembangunan yang terbentuk dengan menggunakan deliniasi wilayah pelayanan dari masing-masing pusat pelayanan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Satuan Wilayah Pembangunan Limboto, meliputi: Batudaa Pantai, Batudaa, Bongomeme, Tibawa, Pulubala, Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula, dan Limboto Barat, Telaga dan Telaga Biru; Satuan Wilayah Pembangunan Tilamuta, meliputi Botumoito, Mananggu, Dulupi dan Tilamuta sendiri; Satuan Wilayah Pembangunan

Marisa, meliputi: Popayato, Lemito, Randangan dan Marisa; Satuan Wilayah Pembangunan Kabila, meliputi: Tapa, Suwawa, Kabila dan Bone Pantai; serta Satuan Wilayah Pembangunan Kwandang, meliputi: Tolinggula, Suwawa, Anggrek, Kwandang dan Atinggola. Deliniasi perwilayahan pembangunan hasil studi di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel IV.15 dan Gambar 4.21. Memahami teori yang dipergunakan sebagai pendekatan dalam studi ini, terdapat beberapa perbedaan antara kebijakan perwilayahan Provinsi Gorontalo yang ada saat ini dengan perwilayahan hasil studi, baik dari segi keterkaitan fungsional maupun dari segi potensi pengembangannya.

Berdasarkan tinjauan dari segi keterkaitan fungsional, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa kebijakan perwilayahan pembangunan yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo saat ini, belum mempertimbangkan pemahaman keterkaitan fungsional antar pusat-pusatnya secara optimal. Jika ditinjau dari hasil analisis perwilayahan fungsional dalam studi ini, diketahui bahwa dalam penentuan pusat-pusat subwilayahnya masih terdapat kerancuan atau belum sesuai dengan potensi yang ada. Kerancuan atau perbedaan yang ada pada kebijakan perwilayahan pembangunan Provinsi Gorontalo dan perwilayahan pembangunan hasil studi, antara lain adalah:

- Belum ada deliniasi yang jelas atas wilayah pelayanan dari masing-masing pusat subwilayah pembangunan yang ditentukan pada kebijakan perwilayahan yang dirumuskan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Dari hasil analisis perwilayahan fungsional pada studi ini didapat deliniasi yang lebih jelas, meskipun relatif masih kasar karena menggunakan pendekatan batas wilayah administrasi kecamatan. Namun ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan koordinasi pembangunan sesuai dengan administrasi pemerintahan.

- Penetapan Limboto dan Tilamuta sebagai pusat belum optimal, karena wilayah yang diharapkan sebagai wilayah belakangnya, sebagian sangat terpengaruh oleh pusat-pusat lain yang juga berperan sebagai pusat pelayanan kedua (hirarki II), sehingga peran yang diharapkan dari Limboto dan Tilamuta sebagai pusat pelayanan kedua (hirarki II) menjadi tidak efektif. Dari hasil analisis pada studi ini diketahui bahwa interaksi akan terjadi secara langsung antara pusat-pusat pelayanan kedua dengan wilayah pengaruhnya masing-masing, karena selain Limboto dan Tilamuta, ditemukan tiga pusat pelayanan lain yaitu Marisa, Kabila dan Kwandang yang berperan sebagai pusat pelayanan kedua (hirarki II).

Dari tinjauan segi potensi pengembangan yang dilakukan dengan pendekatan homogenitas hanya terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan antara kebijakan perwilayahan yang ada saat ini dengan perwilayahan hasil studi tersebut adalah: bahwa pembagian perwilayahan yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo belum diidentifikasi karakteristik potensi dari masing-masing desanya. Dalam perwilayahan hasil analisis studi ini dapat diidentifikasi karakteristik desa-desa berdasarkan potensinya, sehingga dari penelaahan potensi tersebut dapat diusulkan deliniasi kawasan-kawasan dengan fungsi tertentu.

4.4.2 Implikasi Perwilayahan Hasil Studi Terhadap Kebijakan Perwilayahan

Tercapainya pertumbuhan dan pemerataan secara sekaligus tidak dapat tercapai dengan hanya menggantungkan kepada rumusan strategi perwilayahan pembangunan tersebut dalam satu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Hal ini memerlukan pengkajian kembali, baik terhadap rumusan dan penjabaran pelaksanaannya maupun langkah-langkah kebijaksanaan yang terkait dengan strategi tersebut. Pengkajian tersebut dilakukan melalui penetapan kembali pusat-pusat pelayanan sebagai pusat pertumbuhan.

Dari beberapa pertimbangan dalam penerapan konsep perwilayahan pembangunan, khususnya analisis sistem pusat-pusat pelayanan, serta adanya kecenderungan untuk mengarahkan kebijakan pembangunan sektoral pada pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada dan lebih maju. Dengan demikian strategi yang lebih tepat untuk diterapkan dalam kebijakan pengembangan wilayah adalah dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.

Struktur perwilayahan pembangunan yang dihasilkan dalam studi ini telah mempertimbangkan aspek-aspek penting, termasuk jenjang pusat-pusat pelayanan yang ada secara hirarkis mendekati landasan konseptualnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil yang optimal. Namun untuk menjamin supaya struktur perwilayahan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka masih diperlukan berbagai upaya pemañtapan berupa tindakan-tindakan sebagai implikasin kebijaksanaannya. Selain itu agar mekanisme perkembangan daerah dapat berlangsung melalui pengembangan sistem perwilayahan pembangunan, maka juga perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat menunjang berlangsungnya mekanisme perkembangan tersebut.

Pusat-pusat pengembangan dalam struktur perwilayahan pembangunan hasil studi perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya, serta faktor pendukung aksesibilitas ke wilayah pengaruhnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jangkauan pengaruhnya. Dengan mengembangkan faktor-faktor pendukung tersebut, maka akan dapat diharapkan terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan baik antar pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya. Dengan demikian mekanisme pengembangan daerah melalui sistem perwilayahan pembangunan akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, jika pusat pelayanan dikonotasikan sebagai kota, maka yang dimaksud adalah kota fungsional. Dengan pengertian ini dapat lebih bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan. Pada tingkatan pusat-pusat pertumbuhan tersebut, faktor-faktor

perkembangan akan disebarakan dari pusat-pusat pertumbuhan atau kota-kota yang lebih tinggi hirarkinya ke pusat-pusat yang memiliki hirarki lebih rendah.

Selanjutnya untuk mengembangkan wilayah Provinsi Gorontalo, melalui sistem pusat-pusat pertumbuhan dalam arti pengembangan sistem hirarki perkotaan, maka diperlukan adanya usaha penyempurnaan jaringan transportasi, hal ini bertujuan untuk menjamin bekerjanya mekanisme sistem pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan dimulai serta dijalarkan dari pusat pertumbuhan, secara regional Provinsi Gorontalo dari pusat-pusat pelayanan ke daerah belakangnya masing-masing. Secara umum implikasi kebijakan dari struktur perwilayahan hasil studi dapat dirangkumkan pada Tabel IV.16. Dengan demikian kegiatan pembangunan dapat tersebar secara merata diseluruh Provinsi Gorontalo, dan selanjutnya masalah-masalah ketertinggalan dengan wilayah lain secara bertahap dapat diatasi.

TABEL. IV.16
IMPLIKASI KEBIJAKAN
STRUKTUR PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN HASIL STUDI

No	Pusat Satuan Wilayah Pembangunan	Implikasi Kebijakan	
		Tindakan	Sasaran
I	GORONTALO	-	-
II	WP A / LIMBOTO	Peningkatan fungsi dan peranan	Meningkatnya kualitas pelayanan
III	WP B / TILAMUTA	Peningkatan fungsi dan peranan	Meningkatnya kualitas pelayanan
IV	WP C / MARISA	Peningkatan fungsi dan peranan	Meningkatnya kualitas pelayanan
V	WP D / KABILA	Peningkatan fungsi dan peranan	Meningkatnya kualitas pelayanan
VI	WP E / KWANDANG	Peningkatan fungsi dan peranan serta keterkaitan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan aksesibilitas ke wilayah pengaruh maupun ke pusat pengembangan.

Sumber : Hasil analisis studi, 2004

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengkajian atas berbagai aspek penting dalam penerapan pendekatan pengembangan wilayah yang dilakukan melalui perwilayahan pembangunan adalah sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap suatu sistem wilayah. Dari pembahasan perwilayahan pembangunan sebagai strategi pengembangan wilayah pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan dan direkomendasikan sebagai salah satu pendekatan dalam mengimplementasikan konsep pengembangan wilayah di Provinsi Gorontalo.

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis perwilayahan pembangunan sebagai strategi pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo, melalui pengkajian atas karakteristik fisik, dan karakteristik sosial ekonomi yang digambarkan dalam perwilayahan fungsional dan perwilayahan homogen, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pendekatan perwilayahan fungsional yang dilakukan melalui analisis hirarki pusat-pusat pelayanan dan wilayah pengaruh, menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pelayanan riil saat kajian ini dilakukan pada masing-masing pusat pelayanan, membentuk struktur perwilayahan atau sistem kota-kota yang tersusun secara hirarkis. Struktur perwilayahan hasil analisis studi telah mempertimbangkan hirarki sistem pusat-pusat pelayanannya, dimensi-dimensi spasialnya dan aksesibilitas dari wilayah pengaruh ke pusat-pusat pengembangannya. Sistem pusat-pusat pelayanan dengan berbagai karakteristik dan tingkatan hirarkinya berperan penting dalam usaha pengembangan wilayah. Hirarki pusat-pusat pelayanan berkaitan dengan

mekanisme penyebaran perkembangan berjalan secara hirarkis. Dengan demikian sistem pusat-pusat yang tersusun secara hirarkis perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pengembangan wilayah, dalam hal ini berupa struktur perwilayahan pembangunan. Hasil analisis studi di wilayah Provinsi Gorontalo, tersusun struktur perwilayahan yang terdiri dari : satu pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan I (pusat wilayah); 6 pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan II (kota pasar/kota kecil); 10 pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan III (pusat desa); dan 17 pusat pelayanan sebagai pusat pelayanan IV (non pusat pelayanan).

Sebagai pusat wilayah adalah Gorontalo, yang juga berfungsi sebagai ibukota provinsi. Pusat-pusat pelayanan berfungsi sebagai Pusat pelayanan II meliputi Limboto, Marisa, Tilamuta (ketiga-tiganya merupakan ibukota kabupaten), dan Telaga, Kabila serta Kwandang. Sebagai pusat pelayanan III meliputi Telaga Biru, Limboto Barat, Paguat, Tapa, Paguyaman, Tibawa, Boliyohuto, Batudaa, Mananggu dan Suwawa. Sedang pusat pelayanan IV meliputi, Bongomeme, Wonosari, Batudaa Pantai, Tolangohula, Botumoito, Atinggola, Bonepantai, Sumalata, Dulupi, Tolinggula, Anggrek, Mootilango, Lemito, Popayato, Randangan, Pulubala dan Paguyaman Pantai.

2. Berdasarkan pendekatan perwilayahan homogenitas, dari hasil interpretasi terhadap faktor-faktor loading dapat diidentifikasi karakteristik potensi dari masing-masing wilayah observasi yang dikaji serta pengelompokkannya berdasarkan karakteristik potensi tersebut. Dari hasil analisis studi, di Provinsi Gorontalo menunjukkan karakteristik potensi kegiatan perkotaan serta pelayanan sosial dan administratifnya (faktor I) relatif homogen dengan potensi yang masih rendah, kecuali di wilayah Kota Gorontalo yang rata-rata mempunyai potensi yang relatif baik yaitu diatas rata-rata skor faktor I. Karakteristik potensi kegiatan pedesaan (faktor II) di Provinsi Gorontalo

juga relatif homogen, kecuali di sebagian besar wilayah Kecamatan Pulubala, Boliyohuto, Mootilango dan Kecamatan Tolangohula. Potensi pelayanan administratif dan sosial (faktor III) memiliki karakteristik yang relatif heterogen dan menyebar. Potensi pelayanan ekonomi (faktor IV) memiliki karakteristik yang relatif homogen. Sedang potensi pertanian (faktor V) mempunyai karakteristik yang heterogen.

Pengelompokkan berdasarkan potensi sebagai pusat pelayanan sosial dan administratif (kombinasi faktor I dan III), sebagian besar (sebanyak 232 desa) tidak memiliki potensi yang baik dan hanya sebanyak 21 desa yang memiliki potensi baik, yaitu memiliki potensi kegiatan perkotaan dan pelayanan sosial serta pelayanan administratif yang baik. Untuk desa-desa lainnya yaitu sebanyak 51 desa memiliki potensi pelayanan administratif baik tetapi kurang ditunjang dengan kemampuan pelayanan sosial yang baik, sedang 72 desa memiliki potensi pelayanan sosial dan kegiatan perkotaan baik namun kurang didukung oleh pelayanan administratif yang baik.

Pengelompokkan berdasarkan potensi sebagai pusat pelayanan ekonomi (kombinasi faktor I dan IV), sebanyak 188 tidak memiliki potensi yang baik dan hanya sebanyak 35 desa yang memiliki potensi baik, yaitu memiliki potensi kegiatan perkotaan dan pelayanan ekonomi yang baik. Untuk desa-desa lainnya yaitu sebanyak 95 desa memiliki potensi pelayanan ekonomi yang baik tetapi kurang ditunjang dengan potensi kegiatan perkotaan yang baik, sedang 58 desa memiliki potensi kegiatan perkotaan yang baik namun kurang didukung dengan potensi pelayanan ekonomi yang baik.

Pengelompokkan berdasarkan potensi sosial sebagai hinterland (kombinasi faktor II dan III), sebagian besar desa yaitu sebanyak 191 desa tidak memiliki potensi yang baik dan sebanyak 37 desa yang memiliki potensi sosial sebagai hinterland yang baik, yaitu memiliki potensi kegiatan pedesaan maupun pelayanan sosial yang baik. Kelompok

lainnya yaitu sebanyak 35 desa memiliki potensi pelayanan sosial baik tetapi tidak memiliki potensi kegiatan pedesaan yang baik, sedang 113 desa memiliki potensi kegiatan pedesaan baik namun kurang didukung oleh pelayanan sosial yang baik.

Pengelompokkan berdasarkan potensi ekonomi sebagai hinterland (kombinasi faktor II dan V), sebanyak 122 desa tidak memiliki potensi yang baik dan sebanyak 60 desa memiliki potensi ekonomi sebagai hinterland yang baik, yaitu memiliki potensi kegiatan pedesaan maupun potensi pertanian yang baik. Kelompok lainnya yaitu sebanyak 104 desa memiliki potensi pertanian baik tetapi tidak memiliki potensi kegiatan pedesaan yang baik, sedang 90 desa memiliki potensi kegiatan pedesaan baik namun kurang didukung oleh potensi pertanian yang baik.

3. Batasan wilayah pengaruh dari masing-masing pusat pelayanan yang dikaji, dapat digunakan sebagai deliniasi dalam merumuskan struktur perwilayahan secara lebih riil sesuai keadaan pada saat kajian ini dilakukan. Seperti telah dikemukakan pada Bab III, bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2016 telah dirumuskan suatu kebijakan perwilayahan yaitu dengan membagi ke dalam wilayah pembangunan utama dan tiga satuan wilayah pembangunan.

Deliniasi satuan wilayah pembangunan dalam studi ini digunakan pendekatan batasan wilayah pengaruh. Dengan pertimbangan untuk mempermudah dalam implementasi dan disesuaikan dengan batasan kewenangan wilayah pemerintahan, maka penentuan batasan wilayah pengaruh digunakan pendekatan batas wilayah administrasi kecamatan yang ada. Walaupun pada kenyataannya banyak ditemukan kurang sesuai dengan interaksi antar wilayah yang lebih nyata di lapangan dan tidak selalu sejalan dengan batas administrasi yang ada.

Berdasarkan batasan wilayah pengaruh yang dihasilkan, di Provinsi Gorontalo terbentuk satu pusat pembangunan utama dan lima satuan wilayah pembangunan. Pusat pembangunan utama meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dengan pusat pelayanan Kota Gorontalo yang juga berfungsi sebagai pusat wilayah. Sedang lima satuan wilayah pembangunan meliputi Wilayah Pembangunan Limboto; Wilayah Pembangunan Marisa; Wilayah Pembangunan Talamuta; Wilayah Pembangunan Kabila dan Wilayah Pembangunan Kwandang.

Jika dibandingkan dengan hasil studi, dalam kaitan dengan satuan wilayah pembangunan Provinsi Gorontalo saat ini, ternyata menunjukkan adanya perbedaan dalam jumlah dan besaran wilayahnya. Provinsi Gorontalo saat ini terbagi dalam satu wilayah pembangunan utama dan tiga satuan wilayah pembangunan. Pada studi ini ditemukan satu wilayah pembangunan utama dan lima satuan wilayah pembangunan. Satuan Wilayah Pembangunan Limboto dalam kebijakan struktur ruang Provinsi Gorontalo, menurut hasil studi ini terbagi menjadi dua Satuan Wilayah Pembangunan yaitu Limboto dan Kwandang. Demikian juga Kecamatan Wonosari, Paguyaman dan Paguyaman Pantai termasuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan Limboto, sedang dalam struktur ruang yang ada termasuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan Boalemo.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan tujuan studi dan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan dalam terbentuknya perwilayahan pembangunan yang tepat guna, yang diharapkan dapat mendorong pengembangan wilayah di Provinsi Gorontalo seperti yang diharapkan, sebagai berikut:

1. Sistem hirarki pusat-pusat pelayanan hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam memantapkan sistem hirarki pusat-pusat pelayanan dalam perwilayahan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian akan mengurangi terjadinya interaksi langsung antara wilayah pedesaan dengan Kota Gorontalo sebagai pusat regional. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, seperti misalnya dalam kapasitas dan pemenuhan kebutuhan pelayanan, serta biaya transport, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perkembangan bukan saja wilayah-wilayah yang jauh dari pusat regional, tetapi juga bagi Kota Gorontalo sebagai pusat regional itu sendiri.
2. Karakteristik potensi perkembangan sosial ekonomi yang ditemukan dalam studi ini dapat dijadikan dasar menyusun langkah-langkah kebijakan di dalam menentukan program-program pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo, dalam sistem wilayah secara keseluruhan.
3. Dengan tidak bermaksud mempertentangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi, maka struktur perwilayahan pembangunan hasil studi ini dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan satuan wilayah pembangunan sebagai salah satu strategi dalam upaya pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo. Hal ini terutama erat kaitannya dengan pengembangan peranan dan fungsi pusat-pusat pelayanan di Provinsi Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afifi, A.A, Virginia Clark. 1990. *Computer-aided multivariate analysis*, New York: Van Nostrand Reinhold
- Ambardi, Urbanus.M, Prihawantoro, Socia (eds). 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah – Kajian Konsep dan Pengembangan*, Jakarta: BPPT
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE
- Bendavid-Val, Avrom. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, London: Praeger Publishers.
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Blair, P, John dan Premus, Robert. 1995. *Theories of Local Economic Development*, California: Sage Publications.
- _____. 1995. *Local Economic Development Analysis and Practice*, California: Sage Publications.
- Bryant, Coralie dan Loise G. White. 1987. *Management Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta: LP3ES
- Dajan, Anto. 1984. *Pengantar Metoda Statistik*, Jakarta: LP3ES
- Darwent, D.F. 1975. *Growth Poles and Growth Centers in Regional Planning, A Review*, in : Friedmann, J. and Alonso. W (eds) *Regional Policy, Readings in Theory and Applications*, Mit Press.
- Daldjoeni, Nathaniel. 1992. *Geografi Baru*, Bandung: Alumni
- Dillon, William dan Matthew Goldstein, 1984. *Multivariate Analysis and Application*, New York: John Wiley and Sons Inc.
- Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (ESCAP). 1979. *Guidelines for Rural Centre Planning*, New York: United Nations.
- Friedmann, John and Alonso, William (eds).1975. *Regional Policy : Reading in Theory and Application*, Massachuset: MIT Press.
- _____. and Weaver, Clyde. 1977. *Teority and Function : The Evolution of Regional Planning*, London: Edward Arnold (Publishers) Ltd.
- George, Darren and Paul Mallery. 2001. *SPSS for Windows Step by Step A Simple Guide and Reference*, Boston: Allyn & Bacon A Pearson Education Company.
- Glasson, John. 1978. *An Introduction to Regional Planning, Concepsts, theory and practice*, Hutchinson & Co.
- Hadjisarosa, Poernomosidi. 1982. *Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Pekerjaan Umum.

- Jayadinata, T. Johara. 1992. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung: Penerbit ITB.
- Jhingan, ML. 1996. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raya Grafindo Persada.
- Johnson E.A.J. 1975. *The Organization of Space in Developing Countries*, Massachusetts: Harvard University Press.
- Kunarjo.1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mayer, Robert, R and G. Freenwood, Ernest. 1984. *Pandangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Terjemahan: Sutan Zanti dan Wayan Dana, Jakarta: Rajawali Press.
- Miller, J.C. 1974. *Regional Development : A. Review of The State of the art*, Office of Urban Development, Bureau of Technical Assistance, Agency for International Development, US Department of State Washington DC.
- Nasution, S. 2001. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nie, Norman, H., et al. 1975. *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*, Second edition, New York: Mc Graw-Hill Book Company.
- Oppenheim, Norbert. 1980. *Applied Models in Urban and Regional Analysis*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Paelinck, Jean H.P., dan Peter Nijkamp. 1978. *Operational Theory and Method in Regional Economics*, England : Saxon House.
- Richard S.B. 1976. *Computer and Statistical Techniques for Planners*, London : Methuen and Co Ltd.
- Richardson, Harry, W. 1979. *Regional Economic*, London: University of Illinois Press.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rondinelli, Denis, A dan Kenneth Ruddle. 1978. *Urbanization and Rural Development : A Spatial Policy for Equitable Growth*, New York: Preager Publishers.
- _____. 1985. *Applied Method of Regional Analysis*, Colorado: West View Press. Inc.
- Sugiarto et al. 2001. *Teknik Sampling*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono. 1976. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Membangun Daerah*, Jakarta: LPFE UI.
- _____. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: LPFE UI.
- Tjokroaminoto, Bintoro. 1993. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Haji Masagung.
- Todaro, Michael, P. 1983. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Warpani, Suwarjoko. 1984. *Analisis Kota dan Daerah*, Bandung: Penerbit ITB.

MAJALAH/JURNAL/TERBITAN TERBATAS

- Haeruman, Herman. *Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antardaerah*, Prisma, Tahun XXV, 1996, LP3ES.
- Sugandhy, Aca. *Penataan Ruang Wilayah, Daerah dan Kota*, Prisma, Nomor 6, 1984, LP3ES
- Sujarto, Djoko. *Pemekaran Kota atau Dekonsentrasi Planologis*, Prisma, No. 6, Juli 1976, LP3ES
- Tjahyati, Budhy. 2000. *Pembangunan Kota dalam Rangka Menghadapi Otonomi Daerah*, Makalah pada Kuliah Perdana pada acara Stadium General, UNDIP

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Andusti, Nopian. 1995. *Strategi Alokasi Kebutuhan Investasi untuk memperkecil Disparitas antar Daerah Tingkat II di Propinsi Bengkulu*, Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana ITB.
- Bulkin, Imron. 1983. *Studi Penentuan Fungsi dan Peranan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Rangka Pengisian Konsep Pengembangan Wilayah Gerbangkertosusila*, Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITB.
- Djalante, Dody, P. 1996. *Evaluasi Penerapan Strategi Pusat-pusat Pertumbuhan Dalam Rangka pengembangan Wilayah Kabupaten Kendari*. Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana ITB.
- Munir, Riswan. 1984. *Peninjauan Terhadap Alternatif Strategi Pengembangan Ruang Wilayah*. Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana ITB.
- Sugiri, Agung. 1990. *Pengkajian Kebijakan Perwilayahan Kabupaten Madiun*, Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITB.
- Warsilan. 1993. *Evaluasi Penetapan Pusat Pertumbuhan Untuk Pengembangan Wilayah Propinsi Kalimantan Timur*, Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana ITB.

HASIL PENELITIAN

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo 2001-2015*, Bappeda Provinsi Gorontalo, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang *Penataan Ruang*.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 1999 tentang *Pembentukan Kabupaten Boalemo*.
- Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang *Pembentukan Provinsi Gorontalo*.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang *Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo*.